

KAJIAN PENANGANAN ANAK
JALANAN DI KOTA MEDAN
MENGGUNAKAN SISTEM PANTI
DAN NON PANTI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan penelitian berjudul Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti yang telah dilakukan peneliti dalam urun waktu bulan Februari sampai dengan Juni tahun 2022. Dalam kajian ini peneliti menggambarkan upaya pemerintah Kota Medan menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis di Kota Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Medan serta bekerjasama dengan Kepolisian Kota Medan. Pencegahan, Penanganan dan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan dengan sistem panti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dan Sistem Non Panti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Medan belum memberikan dampak maksimal, sehingga direkomendasikan pendekatan Asset Base Community di masyarkat dengan kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Kota Medan dengan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) sebagai pilot project. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi Pemerintah Kota Medan dalam mencegah, menangani, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan di Kota Medan. Sehingga Kota Medan dapat menuju menjadi Kota Layak Anak (KLA), sesuai dengan Visi Walikota Medan Tahun 2021-2024. "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif".

Sinergi antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara diperlukan untuk memperkuat pencegahan, pelayanan dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan sehingga menghasilkan dampak lebih maksimal.

Hasil kajian ini kiranya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Medan dalam mengambil kebijakan, langkah-langkah strategi baik dari sisi pencegahan, penanganan serta fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan serta Rumah Perlindungan Sosial (RPS) menggunakan *Asset Base Community* menjadi model pencegahan, penanganan serta fasiltiasi bagi anak jalanan di Kota Medan.

Salam Hormat.

Medan, Juli 2022

Tim Peneliti.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa serta menghasilkan model pencegahan, penanganan, dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan di Kota Medan. Penelitian dilakukan di Kota Medan. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder serta informan penelitian menggunakan teknik purpossive sampling yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu yang telah disepakati tim peneliti. Hasil penelitian menggambarkan (1). Proses perkembangan anak jalanan street on the child dan street of the street menjadi manusia silver, badut, pengemis, (pengamen, pedagang, pembersih mobil dll) adalah anak jalanan baru dikarenakan Covid 19 mereka bersekolah secara daring (dalam jaringan) sehingga lebih banyak bekerja sebagai anak jalanan, (2) upaya Pemerintah Kota Medan dalam pencegahan, penanganan dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 perlu dievaluasi dan menerbitkan peraturan yang baru selain itu perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara tentang Penanganan, Pencegahan serta Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan, (3) Model Asset Base Community menjadi tawaran solusi bagi Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan, Pencegahan serta Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khusunya Anak Jalanan di Kota Medan.

Kata Kunci: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Anak Jalanan, , *Asset Base Community*. Rumah Perlindungan Sosial (RPS), *Pilot Project*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
ABSTRAK		
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang Masalah		1
1.2. Identifikasi Masalah		10
1.3. Pembatasan Masalah		11
1.4. Rumusan Masalah		11
1.5. Tujuan Penelitian		12
BAB II TINJAUN PUSTAKA		
2.1. Penelitian Anak Jalanan	l	13
(State of The Art)		
		19
2.3. Perlindungan terhadap Anak		24
Jalanan		
	l	25
Panti dan Sistem Non Panti		
Untuk Pemerlu Pelayanan		
Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
khususnya Anak Jalanan		
-	f	26
Base Community		
(Pemberdayaan Melalui Asset		
Komunitas) bagi anak jalanan		
di Kota Medan		
BAB III METODE PENELITIA	N	
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian		31
3.2. Lokasi Penelitian		32
3.3. Teknik Pengumpulan Data		32
3.4. Teknik Analisa Data		33
BAB IV HASIL PENELITIAN D	OAN PEMBAHAN	
4.1. Hasil Penelitian		35
4.2 Process markembancon analy		
jalanan street on the child dan		76
street of the street menjadi		
manusia silver, badut,		
,		
pengemis, (pengamen,		
pedagang, pembersih mobil		
dll) yang menjadi Pemerlu		
Pelayanan Kesejahteraan	-	

Sosial (PPKS) di Kota Medan

4.2.1. Manusia Silver		79
4.2.2. Anak Badut		80
4.2.3. Anak Penjual Jipang		81`
		81
Covid-19		
4.3. Upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengantisipasi, penanganan dan memfasilitasi masalah Anak Jalanan yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di		84
Kota Medan.		
Kota Medan wujud dari Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2003.		86
dalam penanganan anak jalanan di Kota Medan		93
4.4. Sistem Panti dan Non Panti dalam memberikan pelayanan kesejahteraan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan di Kota Medan.		95
4.5. Model Pencegahan, Penanganan dan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Khususnya Anak Jalanan di Kota Medan.		99
4.6. Menyongsong Kota Layak Anak (KLA) Nindya di Kota Medan Tahun 2022		104
4.7. Hambatan dan Tantangan		110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	1	
5.1. Kesimpulan		111
5.2. Saran		112
Daftar Pustaka		11/

Lampiran	 115
_ampiran	 115

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tipologi Anak	 97
Jalanan	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.: Wawancara	
bersama Badan Penelitian dan	
Pengembangan Kota Medan Gambar 4.2.Wawancara bersama Bagian Hukum Sekretariat Kota Medan	
Gambar 4.3. Wawancarabersama Evaluasi Kerjasama Setda Kota Medan.	40
Gambar 4.3. Wawancarabersama Bagian Tata Laksana dan Organisasi Kantor Pemerintah Kota Medan	4:
Gambar 4.4. Wawancara Bersama Anak Manusia Silver di Simpang Lampu Merah Jalan Sudirman	43
Gambar 4.5. Wawancara di Yayasan KKSP Medan	
Gambar 4.6. Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan.	47
Gambar 4.7. Wawancarabersama anak badut di Simpang Lampu Merah Jalan Sudirman	49
Gambar 4.8. Wawancarabersama Kepala Pembina PAUD dan Pendidikan Non Formal	5

Gambar. 4.9. Wawancara bersama Pengelola Rehabilitasi Sosial	 55
Gambar 4.10. Wawancara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kota Medan	 56
Gambar 4.11. Wawancara bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan	 58
Gambar 4.12. Wawancara bersama Yarja Wijaya (Penjual Jipang) di Lampu Merah Jalan Iskandar	 59
Gambar. 4.13. Wawancara bersama Panti Asuhan Anak Gembira.	 61
Gambar 4.14. Wawancara bersama Karoline (Penjual Jangek) di Lampu Merah Jalan Karya Wisata.	 63
Gambar 4.15. Wawancara bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	66
Gambar. 4.16. Wawancara bersama Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan	 68
Gambar 4.17. Wawancara bersama Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan	 70
Gambar 4.18. Wawancara bersama Pekerja Sosial yang Berada di Panti Asuhan Binjai	 74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan sangat erat dengan masalah sosial lainnya, terutama kemiskinan. (Aruan dan Halawa, 2019). Akibatnya banyak orangtua yang mengorbankan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan mengerahkan anak-anaknya untuk mencari uang dengan meminta-minta dan memelas di jalan raya ataupun di perempatan lampu merah. Hal tersebut yang menyebabkan semakin meluasnya anak jalanan di Indonesia sehingga persoalan ini menjadi semakin kompleks di setiap wilayah di Indonesia. (Suyanto, 2010).

Kehidupan anak jalanan bukanlah pilihan hidup yang diinginkan oleh siapapun. Kehidupan anak jalanan merupakan suatu keterpaksaan yang harus diterima oleh karena adanya sebab atau faktor tertentu. Secara psikologis anak jalanan adalah anakanak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentuk mental dan emosional yang kokoh, sementara pada saat yang bersamaan mereka harus bergelut di jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan pribadinya. Usia mereka bahkan relatif masih muda dan seharusnya masih dalam jenjang pendidikan serta bermain dengan teman-teman selayaknya seorang anak. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Dimana labilitas emosi dan mental mereka ditunjang dengan penampilan yang kumuh, suka mencuri, dan kebanyakan dianggap menjadi sampah m asyarakat yang harus diasingkan (Muhsin & Sukamto, 2012).

Anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya (Shalahuddin, 2000). Anak jalanan merupakan sebagian dari anak-anak yang hidup dan tumbuh di jalanan tanpa ada pemantauan dan tumbuh secara mandiri (Irwanto, 2003). Kehidupan anak jalanan bagi sebagian anak jalanan mempunyai dampak yang positif misalnya anak menjadi tahan kerja keras karena sudah terbiasa kena panas dan hujan, anak jalanan bisa belajar bekerja sendiri, bertanggung jawab dan membantu ekonomi orang tuanya (Sarwoto, 2002). Salah satu program pembangunan sosial dan budaya adalah program kesehatan dengan kegiatan pokok memberdayakan anak terlantar termasuk anak jalanan. Program upaya kesehatan tersebut bertujuan meningkatkan status kesehatan sistem reproduksi bagi wanita usia subur pada anak dan remaja jalanan (Wahyu, 1999). Kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga menurut (Tata Sudrajat dalam Shalahuddin 2004)

Berdasarkan hubungannya dengan keluarga, Tata Sudrajat dalam Shalahuddin (2004) mengelompokkan jenis anak jalanan menjadi tiga, yaitu :

- 1. Children on the Street
- 2. Children of the Street
- 3. Children in the street or children from the families of the Street. (Shalahuddin, 2004)

Menurut Surbakti dkk, berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi-sebagai pekerja anak di jalanan,

tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti (Surbakti dkk 1997).

Karakteristik anak jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis mereka adalah:

1. Ciri-ciri fisik

a. Penampilan dan warna kulit kusam

- b. Rambut kemerah-merahan
- c. Kebanyakan berbadan kurus
- d. Pakaian tidak terurus

2. Ciri-ciri psikis

- a. Mobilitas tinggi
- b. Acuh tak acuh
- c. Penuh curiga
- d. Sangat sensitif
- e. Berwatak keras
- f. Kreatif (Kalida dan Sukamto, 2012:11).

Tindakan mereka seringkali menimbulkan tindakan tidak terpuji seperti sering berkata kotor, mengganggu ketertiban jalan, merusak *body* mobil dengan goresan, merokok dan melakukan tindak kriminal lainnya. Keberadaan di jalanan pada akhirnya seringkali membuat mereka menjadi obyek kekerasan. Mereka menjadi kelompok sosial yang rawan dari berbagai tindak kekerasan baik kekerasan fisik, emosional, seksual maupun kekerasan sosial (Huraerah, 2007). Model Pelayanan Sosial Anak Jalanan mengembangkan 3 (tiga) model pelayanan sosial bagi anak jalanan yaitu:

1. Community Based Social Services

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lingkungan masyarakat dimana anak dan keluarga anak jalanan bertempat tinggal. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anak dan keluarga anak jalanan serta anggota masyarakat yang lainnya dalam proses pelayanan.

Tujuan pelayanan sosial ini adalah mencegah anak dari keluarga miskin terutama anak yang mempunyai resiko tinggi (children at high risk) menjadi anak jalanan.Diupayakan agar mereka tidak mungkin mempunyai peluang terjun ke jalan dan dimungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga mereka.

2. Street Based Social Services

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lingkungan jalanan atau tempat publik lainnya, dimana anak jalanan menjalani hidup dijalan. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anak jalanan dan para pihak yang bersinggungan dengan kehidupan anak jalanan dalam proses pelayanan. Tujuan pelayanan sosial ini adalah mencegah anak jalanan dengan kategori anaka yang bekerja dijalan (*children of the steet*) untuk tidak terjerumus dan menjadi pelaku kejahatan.Diupayakan agar mereka menjalani kehidupan seperti semula dan dapat dipertemukan kembali dengan keluarga mereka

3. Centre Based Social Services

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lembaga pelayanan khusus dalam bentuk panti atau yang sejenisnya. Anak diambil dari lingkungan jalanan atau tempat publik lainnya. Mereka diberi fasilitas untuk dapat menjalani hidup seperti semula. Selain itu, pelayanan ini dilakukan untuk mengisolir mereka dari lingkungan yang dapat menjadikan diri mereka berperilaku melanggar norma. Tujuan pelayanan ini adalah untuk menyembuhkan anak jalanan dari luka-luka fisik maupun

psikologis dan sosial yang dialaminya. Mereka menerima pelayanan ini untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan setelah sembuh dari pengaruh kehidupan jalanan, kemudian mereka dapat dikembalikan kepada keluarga mereka..

Kota Medan merupakan salah satu penyumbang angka anak jalanan terbesar di Indonesia dengan segala aktivitas anak jalanan yang beranekaragam. Mereka melakukan berbagai macam aktivitas, diantaranya ialah sebagai pengamen, pedagang rokok, pedagang koran, penjual kerupuk, pembersih mobil dan lain sebagainya (Aruan dan Halawa, 2019).

Pada Juli 2020. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi telah memberikan Instruksi kepada Dinas Sosial Sumatera Utara untuk meningkatkan penertiban terhadap anak jalanan. Data Dinas Sosial Sumatera Utara menunjukkan jumlah anak jalanan yaitu sebanyak 525 anak dengan rincian 436 laki-laki dan 89 perempuan.

Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan seputar anak jalanan. Pada bulan April 2021, Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan kegiatan operasi penertiban anak jalanan dan gelandangan pengemis yang dilakukan di jalan, *traffic light*, pelataran masjid-masjid dan jembatan-jembatan penyebrangan serta kegiatan ditempat-tempat umum, taman-taman, pinggiran sungai, bawah jembatan dan tempat lainnya di Kota Medan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Penertiban Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis, Dinas Sosial Kota Medan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak Instansi/OPD dari internal maupun external seperti Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Polrestabes Kota Medan, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia

Sumut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai amanat Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Peraktek Susila di Kota Medan (Berita: Website Dinas Sosial Kota Medan 2021).

Dalam melaksanakan operasi penertiban atau razia terhadap anak jalanan, Dinas Sosial Kota Medan tidak hanya sendiri. Dinas Sosial bersama-sama dengan Polresta, Satpol PP, Dinas Sosial Provinsi, serta tenaga lapangan Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Medan melakukan operasi penertiban atau razia. Unit Reaksi Cepat (URC) ini merupakan tenaga honor yang direkrut oleh Pemerintah Kota yang ditempatkan di Dinas Sosial Kota Medan. Setelah terjaring razia, anak jalanan akan di bawa ke Dinas Sosial untuk melanjutkan tahapan penertiban tersebut.

Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi dari anakanak jalanan yang terjaring razia. Pada tahap ini, staff Dinas Sosial akan meminta dan mengumpulkan informasi serta keterangan anak jalanan seputar nama, alamat tempat tinggal, status pendidikan, keberadaan orang tua, pekerjaan orang tua, nomor telepon orang tua dan lain sebagainya.

Setelah pihak Dinas Sosial melakukan pendataan tersebut, anak jalanan juga diminta keterangan untuk mengungkap penyebab anak tersebut turun ke jalanan. Di samping itu, Dinas Sosial menghubungi keluarga dari anak jalanan tersebut dan meminta orang tua atau keluarga anak jalanan untuk datang dan menjemput anak yang terjaring razia. Adapun terdapat orang tua yang tidak memiliki alat komunikasi serta berdomisili di Kota Medan, pihak Dinas Sosial akan menghubungi orang tua

dari anak jalanan melalui kepala lingkungan maupun pihak kelurahan tempat tinggal anak jalanan.

Pada tahap ini, pemberian tindakan lanjutan dari Dinas Sosial terhadap anak jalanan yang terjaring operasi penertiban dikelompokkan berdasarkan keberadaan orang tuanya, yaitu:

1. Terhadap anak jalanan yang memiliki orang tua

Orang tua dan/atau keluarga dari anak jalanan akan diverifikasi terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa pihak yang hadir merupakan orang tua asli dari anak jalanan. Verifikasi tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan data anak jalanan dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang dibawa oleh orang tua dan/atau keluarga dari anak tersebut. Jika data sesuai, Dinas Sosial akan meminta pihak orang tua dan/atau keluarga dari anak jalanan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang mengandung substansi bahwa anak tidak akan mengulangi kesalahannya menjadi anak jalanan lagi. Orang tua dan/atau keluarga diperbolehkan untuk membawa anaknya pulang setelah seluruh rangkaian proses administrasi di Dinas Sosial Kota Medan terselesaikan.

2. Terhadap anak jalanan yang tidak memiliki orang tua

Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kota Medan, anak jalanan yang tidak memiliki orang tua anak dirujuk ke Panti Gepeng di daerah Binjai. Anak tersebut dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan akan di proses lebih lanjut oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Dinas Sosial Kota Medan sendiri tidak memiliki rumah singgah, melainkan *Shelter*. *Shelter*

tersebut hanya dapat memfasilitasi orang-orang terlantar seperti lansia selama hanya 3 hari saja. Untuk anak jalanan hasil operasi penertiban atau razia yang dalam hal ini tidak memiliki orang tua tidak dibawa ke shelter.

Kota Medan menjadi magnet bagi kabupaten kota lainnya di Propinsi Sumatera Utara, Kota Metropolitan terbesar ke 3 di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kota Surabaya tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengadu nasib ke Kota Medan, ketimpangan ekonomi dan pendidikan antara kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara dengan Kota Medan, ketidaksiapan bersaing baik dari ekonomi, pendidikan dalam mencari pekerjaan ataupun membuka usaha di Kota Medan menjadi salah satu penyebab banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan yang berasal dari luar Kota Medan.

Melihat kondisi ini sudah merupakan hal yang penting dilakukan untuk melakukan kajian penelitian Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan sistem pelayanan Panti dan Non Panti.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Sasaran Penelitian.

- Perkembangan anak jalanan street on the child dan street of the street
 menjadi manusia silver, badut, pengemis, (pengamen, pedagang, pembersih
 mobil dll) yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di
 Kota Medan.
- 2. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka mengantisipasi, penanganan dan memfasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Mengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan.
 - a. Layanan tindak lanjut dan status penanganan
 - b. Rujukan akhir.
- 3. Hal-hal yang sudah dilakukan OPD terkait dalam penanganan anak jalanan yaitu Kordinasi antara Dinas Sosial Kota Medan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Tim Reaksi Cepat (TRC Kota Medan) dan rencana Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Kota Medan
- 4. Hambatan dan tantangan
- 5. Solusi atau rekomendasi.

- 1.2.2. Ruang lingkup penelitian.
 - 1. Wilayah administrasi Pemerintah Kota Medan.
 - Pengambilan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dari instansi maupun organisasi sosial masyarakat serta individu yang dianggap memahami persoalan penelitian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menjadi bias, maka peneliti membatasi penelitian sebagai berikut:

- Penelitian ini terbatas pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 khususnya anak jalanan yang berada di wilayah Kota Medan.
- 2. Anak jalanan dalam kajian ini adalah anak jalanan *street on the child* dan *street of the child* yang berusia dibawah 18 tahun.
- Unit Pelayanan Teknis (UPT) Panti Gelandangan dan Pengemis milik
 Kementerian Sosial yang berada di Kota Binjai Provinsi Sumatera Uatara

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana proses perkembangan anak jalanan street on the child dan street of the street menjadi manusia silver dan badut yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan?
- Bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengantisipasi, penanganan dan memfasilitasi masalah Anak Jalanan yang menjadi Pemerlu Pelayanan

- Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan?
- 3. Bagaimana Sistem Panti dan Non Panti dalam memberikan pelayanan kesejahteraan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 4. Model Pelayanan apa yang diberikan oleh Pemerinta Kota Medan untuk menangani permasalahan anak jalanan di Kota Medan

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1. Mengetahui dan menganalisa proses perkembangan anak jalanan street on the child dan street of the street menjadi manusia silver, badut, pengemis, (pengamen, pedagang, pembersih mobil dll) yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan?
- 2. Mengetahui dan menganalisa upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengantisipasi, penanganan dan memfasilitasi masalah Anak Jalanan yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan?
- Mengetahui dan menganalisa Sistem Panti dan Non Panti dalam memberikan pelayanan kesejahteraan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 4. Menemukan model penanganan anak jalanan di Kota Medan

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1. Penelitian Anak Jalanan (State of The Art)

Penelitian 5 tahun terakhir tentang Anak Jalanan menjadi landasan atau kerangka peneliti dalam kajian ini sehingga dapat ditarik benang merah dan dijadikan *state of the art* dalam penelitian ini, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitia sebagai berikut:

Syahruddin, dkk tahun 2021 dengan judul penelitian Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa strategi dinas sosial dalam penanganan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis, dinas sosial kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan sosial dengan melakukan pendataan dan pemberian arahan, adapun beberapa hambatan dalam penanganan anak jalanan yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitas di kota Makassar untuk menampung anak jalanan guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi jumlah anak jalanan di kota Makassar.

Larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan juga tidak efektif hal ini dapat dilihat dari hasil kajian Syahruddin, dkk tahun 2021 menyatakan bahwa Setelah di lakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan melalui kegiatan patroli kemudian selanjutnya Dinas Sosial Kota Makassar akan menggelar kegiatn kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan peraturan nomor 2 tahun 2008 sebagai

pengikat dan juga akan memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan membiasakan memberikan uang di jalanan. Kegiatan kampanye di lakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk dan baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media maupun tulisan dan secara langsung melalui ceramah, interaksi secara langsung kepada masyarakat atau anak jalanan. demikian juga upaya yang di lakukan oleh pihak satpol-PP untuk menghalau anak jalanan yang masih ada di titik-titik tertentu, dengan menangkap kemudian di bawakan ke kantor untuk di tindak lanjuti sesuai Peraturan Daerah yang telah di terbitkan,

Titi Stiawati, dkk, tahun 2019 dengan judul Penanganan Anak Jalanan di Kota Serang Provinsi Banten. Hasil Penelitian kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang melibatkan beberapa unsur, diantaranya Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait seperti dinas sosial dan tenaga kerja. Sumberdaya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana dimana setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasam Dan menguatkan. Karakteristik pelaksana terdiri dari pelaksana penjaringan dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik dilakukan melalui pendekatan kebijakan dengan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan dikembalikan pada lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Sikap pelaksana bagi instansi yang ditunjuk dilakuan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali kerumahnya dan bisa mencari pekerjaan yang

lebih baik dan lebih layak.

Fauzi Rahman, tahun 2020 dengan judul Model Penanganan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam penanganan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2007 belum dilaksanakan secara maksimal hal ini berhubungan dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang kurang memadai.2) Penanganan anak jalanan dalam teori dramaturgi memaparkan peran dari petugas sebagai pembina sekaligus pengasuh anak jalanan dapat menjadi jenis alternatif dalam merubahperilaku anak jalanan.

Penelitian Ronawaty Anasiru (2011) dengan judul "Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar" penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan anak jalanan di Kota Makassar, kebijakan penanggulangan, implementasi kebijakan, mengenali faktor pendukung dan penghambat modelmodel kebijakan penanganan serta mencari alternatif penanggulangan untuk menjangkau hasil yang lebih efektif dan efisien Hasil penelitian Ronawaty Anasiru (2011) tersebut didapatkan gambaran bahwa implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya digunakan empat model pendekatan yakni: (1) model pendekatan berbasis panti sosial atau institutional based services, (2),model pendekatan berbasis keluarga atau family based services,(3) model pendekatan berbasis mesyarakat atau community based services dan (4) model pendekatan berbasis semi panti sosial atau half-way house services. Adanya political will dan kemauan keras serta keseriusan Pemda Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar untuk menjadikan Makassar menjadi kota yang aman, tertib dan

bebas dari anak jalanan, yang penanggulangannya dilakukan oleh para pelaksana program melalui model-model pendekatan di atas, sangat mendukung program penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam menanggulangi anak jalanan merupakan suatu hambatan dalam implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Persamaan penelitan dengan penelitan Ronawaty Anasiru yaitu sama mengkaji terakit implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan. Sementara perbedaannya, lokus penelitian yang berbeda dan fokus program penanganan anak jalanan yang dikaji akan lebih spesifik dikaji lebih mendalam.

Penelusuran tinjauan pustaka lain mengenai penanganan anak jalanan yaitu dilakukan Sylfia Rizzana, dkk (2013) dengan judul "Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca)". Penelitiannya mengkaji mengenai fenomena anak jalanan di Kota Malang, dengan berbagai kasus eksploitasi yang dekat dengan kehidupan anak jalanan. Penanganan masalah anak jalanan di Kota Malang mempunyai kebijakankebijakan terkait masalah perlindungan anak jalanan, salah satunya adalah Keputusan Walikota No.88 Tahun 2011 tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang, menganalisis dampak implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang, dan menganalisis upaya alternatif dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang. (Stiawati, dkk. 2019)

Hasil penelitian Sylfia Rizzana, dkk (2013) didapatkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang dinilai belum cukup berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program-program pananganan terhadap anak jalanan.

Selain itu juga pada program pemberian bantuan (stimulant) pada anak jalanan, dimana bantuan yang diberikan seringkali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Persamaannya dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah samasama mengkaji mengenai analisis kebijakan perlindungan anak jalanan. Namun, perbedaanya dengan lokus yang berbeda, kemudian fokus penelitian yang dilakukan Sylfia Rizzana, dkk (2013) lebih pada perlindungan anak jalanan dari eksploitasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Sementara yang dilakukan peneliti, lebih fokus pada implementasi program-program pemerintah daerah Kota Serang yang diberikan kepada anak jalanan sebagai bentuk penanganan pemberdayaan anak jalanan. (Stiawati, dkk. 2019)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka *state of the art* kajian ini memfokuskan pada *Asset Base Community* yang ditawarkan pada Pilot Project Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Kota Medan. Selama ini Upaya Pemerintah Kota Medan dalam menanganai anak jalanan di dasarkan pada Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis sera Praktewk Tuna Susila di Kota Medan. Razia yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan belum memberikan efek jera bagi anak jaanan, dikarenakan mereka turun ke jalan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Adapun hasil dari razia tersebut setelah di data dan di assesment oleh Dinas Sosial Kota Medan menjadi 2 yaitu jika mereka masih punya keluarga maka akan dikembalikan kepada keluarganya, dan jika mereka tidak memiliki keluarga lagi maka akan diteruskan ke Panti Gelandangan dan Pengemis di Kota Binjai yang merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, selain di daerah Kota Pematangsiantar dan Kota Sobolga.

Pendekatan yang selama ini digunakan baik oleh Pemerintah Kota Medan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus kepada pemberdayaan anak jalanan menggunnakan Sistem Pelayaan Panti dan Sistem Pelayanan Non Panti. Panti asuhan atau

panti gelandangan dan pengemis milik pemerintah selalu mengedepankan intervensi *direct service*, biasanya program yang diberikan di panti asuhan ataupun panti-panti milik Kementerian Sosial adalah program dari atas ke bawah (*top-buttom*). Program ini dirasa kurang baik karena apapun permasalahan dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selalu mendapatkan program sablon, salon, jahit, montir baik kendaraan maupun montir barang elektronik sehingga dirasa kurang efektif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejhateraan Sosial, belum lagi setelah program tersebut selesai di panti selama 3 atau 6 bulan tidak ada monitoring dan evaluasi sehingga tidak bisa diukur indikator keberhasilan program yang telah diberikan tersebut.

Sistem pelayanan non panti pun juga memiliki kekurangan, dikarenakan program tersebut dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki keterbatasan dana, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta banyak hal lainnya. Sehingga sistem pelayanan non panti juga dirasa tidak begitu berhasil dalam pencegahan, penanganan dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan. Progrm-program yang dijalankan selalu menggunakan assesment yang baik dan melibatkan partisipasi dari anak jalanan, serta dijalankan dengan community group work. Namun kelemahan program ini selain keterbatasan dana, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana sera lainnya adalah program ini dinilai membuat suatu siklus bagi ketergantungan anak jalanan. Rumah singgah adalah salah satu program yang paling menonjol dari sistem pelayanan non panti, tujuan utama dari rumah singgah tersebut adalah mengurangi waktu anak berada dijalanan sehingga nak jalanan memiliki tempat tinggal yang dapat disinggahi untuk tidur dengan fasilitas yang layak, makan 3 kali sehari, belajar dan mengembangkan kemampuan diri seperti bermain musik, dan keterampilan lainnya. Namun program rumah singgah ini dinilai membuat suatu ketergantungan baru bagi anak jalanan sehingga seolaholah mendukung kegiatan anak jalanan bukan mengentaskan anak jalanan.

Model Asset Base Comunity saat ini menjadi populer dikalangan pekerja sosial atau community worker dalam pemberdayaan masyarakat atau komunitas baik ditingkat keluarga, dan lingkungan kecil dari masyarakat. Kajian ini menawarkan pendekatan Asset Base Community kepada Pemerintah Kota Medan, dikarenakan pertama Pemerintah Kota Medan tidak memiliki panti khusus bagi anak jalanan, ke dua, biaya untuk mendirikan panti anak jalanan terlalu mahal. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan merancang Rumah Perlindungan Sosial (RPS) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan, dan model pelayanan yang diberikan pastinya dengan sistem pelayanan panti yang dinilai sudah usang dan tidak efektif dalam pencegahan, penanganan, dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan di Kota Medan. Ketiga Pemerintah Kota Medan selama ini kurang bersinergi bekerja sama antara Organiasi Perangakat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus kepada pemberdayaan anak khususnya anak jalanan di Kota Medan, sehingga model Asset Base Commnity ini dengan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) sebagai pilot project ditawarkan sebagai solusi kepada Pemerintah Kota Medan dalam pencegahan, penanganan serta fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan.

2.2. Anak Jalanan

Kementerian Sosial Republik Indonesia mencatat dari tahun ke tahun terdapat pengurangan anak jalanan di seluruh wilayah Indonesia. Dari 33.400 anak pada 2015, jumlahnya menurun menjadi 20.719 anak pada 2016. Kemudian turun menjadi 16.416 anak pada 2017. (Rahman, 2020).

Permasalahan sosial yang dihadapi anak jalanan antara lain, anak tidak terpenuhi hak untuk tumbuh kembang secara wajar, Anak jalanan juga sering mendapatkan perilaku salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sehingga

mempengaruhi tumbuh kembangnya sebagai anak. Dalam proses pertolongan, peran pekerja sosial sangat beragam tergantung pada konteksnya. Tugas utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional pekerjaan sosial. (Putri, 2015)

Alasan utama adalah bahwa anak jalanan adalah fenomena sosial yang mencemaskan dunia (Suharto, 2007; 231) dalam (Rahman, 2020). Dimana pelaku berusia paling banyak berusia dibawah 10 tahun. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang-barang bekas, yang lebih parah lagi adalah mengemis, mengamen, mencuri, mencopet, atau terlibat dalam perdagangan sex. Di jalan mereka memiliki pengalaman buruk dengan Polisi Pamong Praja, Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah lebih sering bersifat sementara dan tindakan kekerasan yang menimbulkan trauma. Kehidupan anak jalanan di lingkungan masyarakat tidak jauh dari berbagai macam kekerasan. Kekerasan rumah tangga sering terjadi dalam keluarga miskin, dimana nya adalah orang dekat seperti orangtua anak. Hak anak untuk hidup dalam keceriaan dilanggar setiap hari oleh orang tua sendiri. Anak-anak diekploitasi, di pekerjakan dalam lingkungan yang buruk, dan berbagai diskriminasi masih sangat sering dijumpai terutama dikota dan dalam keluarga miskin. karena miskin maka anak dipaksa mengemis di jalanan. (Rahman, 2020).

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, namun masih

memiliki hubungan dengan keluarganya (Suyanto, 2010). Menurut Departemen Sosial RI (1999), pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan.

UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu *Street child are those* who haec abondoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life. Berdasarkan hal tersebut, maka anak jalanan adalah anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan berpindah-pindah di jalan raya (Sordijar, 1998).

Anak jalanan atau gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang secara yuridis tidak berdomisili secara otentik. Disamping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, menurut ukuran masyarakat pada umumnya dan sebagian besar dari mereka tidak mengenal nilai-nilai keluhuran. (Sudarsono, 2009).

Anak jalanan, anak gelandangan, atau disebut juga secara eutimstis sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak uang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang. Kebanyakan dalam usia yang relatif dini mereka sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, serting terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum (Suyanto, 2016). Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal

karena mereka melakuan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya., kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, dari segi kesehatan maupun sosial. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar (*bergaining position*) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari keluarga, ulah preman, atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab (Suyanto, 2010).

2.2.1. Jenis anak jalanan

Sebagai bagian dari pekerja anak (*child labour*), anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang *homogen*. Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua serta jenis kelaminnya (Farid, 1998). Berdasarkan kajian lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok (Surbakti, 1997).

- a. Childreen on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya (Soedijar, 1984). Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
- b. *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih

mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu.

c. Children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya.

2.2.2. Faktor penyebab anak menjadi anak jalanan.

Dari berbagai hasil penelitian diketahui penyebab paling dominan seorang anak menjadi anak jalanan di Kota Medan adalah faktor ekonomi keluarga. Kemiskinan atau ketidakberdayaan ekonomi keluarga sering kali menjadi faktor dominan seorang anak menjadi anak jalanan baik *child on the street* maupun *child of the street*. Bekerja di jalanan baik didasari keinginan sendiri seorang anak untuk membantu perekonomian keluarga ataupun karena paksaan orang tua semuanya dikarekan ketidakberdayaan ekonomi keluarga yang merampas hak anak untuk belajar dan bermain.

Penelitian yang dilakukan Hairani Siregar (2004) dengan judul penelitian Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan keluarga, kehidupan sosial keluarga, disorgasisasi keluarga signifikan terhadap lahirnya anak jalanan di Kota medan. Dari variabel-variabel yang telah diukur maka faktor kemiskinan keluarga merupakan faktor yang dominan dalam melahirkan anak jalanan di Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan Listorina, P pada tahun 2005 dengan judul penelitian

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan. Hasil penelitian Menunjukkan Diantara sekian banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan, ternyata faktor ekonomi (kemiskianan) keluarga merupakan faktor yang paling dominan menjadikan anak menjaoi anak jalanan di kota Medan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa semakin rendah status ekonomi keluarga maka semakin tinggi kecenderungan untuk menjadi anak jalanan. Selanjutnya

Disorganisasi keluarga merupakan akibat yang muncul belakangan dimana anak jalanan sangat jarang berkumpul di rumah. Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa anak jalanan di Kota Medan cenderung bekerja di jalanan melebihi sembilan jam per hari. Oleh karena itu dapat dikatakan mereka ini merupakan anak jalanan murni yaitu anak jalanan yang menghabiskan waktu dijalanan baik bermain maupun untuk bekerja di atas sembilan jam sehari.

2.3. Perlindungan terhadap Anak Jalanan

Perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan anak di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 11 dijelaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 dijelaskan pula pada pasal 21 bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan anak-anak bangsa, tidak terkecuali anak jalanan yang notabene kurang memperoleh hak mereka sebagai seorang anak.

2.4. Pemberdayaan melalui Sistem Panti dan Sistem Non Panti Untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan

Model penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan selama ini dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan sistem pelayanan panti dan sistem pelayanan non panti. Kedua cara penanganan tersebut dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Kementerian Sosial (Komensos) seperti Panti Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Binjai, Kota Pematangsiantar dan Kota Sibolga yang berada di Porpinsi Sumatera Utara umumnya dilakukan dengan model sistem pelayanan panti. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada pemberdayaan anak (khususnya anak jalanan) juga memberikan pelayanan sistem panti dan sistem non panti seperti yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan an Komisi Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) Kota Medan, dan ada juga yang membuka panti asuhan anak yang memberikan pelayanan sosial kepada anak jalanan seperti Panti Asuhan Anak "Gembira' yang berada di Jalan Jamin Ginting Simpang Pos Kota Medan.

2.5. Empowerment with *Asset Base Community* (Pemberdayaan Melalui Asset Komunitas) bagi anak jalanan di Kota Medan

Asset Based Community Development Dalam praktik pekerjaan sosial, community development menjadi sebuah metode dalam intervensi praktik bersama komunitas. Green dan Haines (2002), menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan upaya yang terencana untuk menghasilkan asset yang meningkatkan kapasitas warga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan berbasis asset bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan asset yang berwujud dan tak berwujud yang tersedia bagi masyarakat daripada mencari kekurangan (Kretzmann dalam Green dan Haines, 2002). Pada community assets, dijelaskan bahwa community development dilakukan berdasarkan potensi-potensi ataupun modal yang ada dan dapat digali dari masyarakat itu sendiri. Proses pemetaan asset dalam komunitas adalah proses mempelajarai dan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang terdapat dalam masyarakat (Green dan Haines dalam Isbandi Rukminto Adi, 2012).

Asumsi dari pengembangan berbasis asset adalah bahwa yang dapat menjawab suatu masalah masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dan segala usaha perbaikan ini harus dimulai dari perbaikan modal sosial. McKnight dan Kretzman percaya bahwa salah satu masalah sentral dalam masyarakat kita adalah bahwa modal sosial telah rusak oleh profesionalisasi kepedulian dalam perencanaan dan layanan sistem. Lingkungan dan penduduk hanya dipandang sebagai objek yang "membutuhkan" dan dipandang sebagai "masalah" yang harus diselesaikan (McKnight, 2010 dalam Fuadillah, 2015). Aset terdapat dalam beberapa bentuk di dalam suatu komunitas. Green dan Haines (2002) menyatakan

terdapat lima konsep utama dalam *asset based community development*, yaitu kapital manusia/sumber daya manusia, kapital sosial/ modal sosial, kapital fisik/infrastruktur, kapital keuangan dan kapital lingkungan/sumber daya alam pital lingkungan/sumber daya alam.

- 1. Modal Manusia (Human Capital) Human capital didefinisikan sebagai keterampilan, bakat pengetahuan masyarakat. dan tentang anggota keterampilanketerampilan tersebut termasuk keterampilan pasar tenaga kerja, kemampuan memimpin, latar belakang pendidikan umum, pengembangan seni dan apresiasi, kesehatan dan keterampilan lainnya (Green dalam Philips dan Pittman, 2009). Green (2002) menyatakan bahwa modal manusia adalah kemampuan dan keterampilan para pekerja yang mempengaruhi produktivitas mereka. Kapital manusia merupakan kapital yang terus bergerak, karena manusia sering datang dan pergi di dalam suatu komunitas, maka dari itu, seiring dengan berjalannya waktu, kapital manusia dapat berubah. Dalam kata lain, keterampilan, bakat dan pengetahuan dapat berganti seiring dengan perubahan dalam mekanisme kultus, sosial dan institusi. Menurut Fuadillah (2015), untuk memiliki modal manusia yang baik, salah satunya yaitu membangun individu dengan meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan keterampilan. Syarat yang dibutuhkan dalam pembangunan kapasitas individu adalah memiliki tenaga kekrja yang memadai, terampil dan terlatih.
- 2. Modal Sosial (*Social Capital*) *Social capital* merupakan sumber daya yang dapat dipandang sebagai intervensi. Modal sosial sering mengacu pada hubungan sosial dalam masyarakat yang merujuk pada kepercayaan, norma dan jaringan sosial yang telah terbentuk (Green dalam Philips and Pittman, 2009). Aiyar (dalam Adi, 2012:259) mengemukakan tiga macam bentuk modal sosial dalam kaitannya dengan perilaku warga masyarakat di dalam dan antar kelompok, yaitu:

- a. Bonding capital yang merupakan modal sosial yang mengikat anggota-anggota masyarakat dalam satu kelompok tertentu.
- b. *Bridging capital* yang merupakan salah satu bentuk modal sosial yang menghubungkan warga masyarakat dari kelompok sosial yang berbeda.
- masyarakat yang lemah dan kurang berdaya dengan kelompok warga masyarakat yang lemah dan kurang berdaya dengan kelompok warga masyarakat yang lebih berdaya (powerful people), misalnya bank, polisi, dinas pertanian dan sebagainya Dalam hal ini Adi (2012:261) mengatakan peran pelaku perubahan adalah untuk mengidentifikasi modal sosial mana yang masih potensial untuk dikembangkan, dan yang masih dalam keadaan krisis. Karena modal sosial bukan hanya mendukung proses pembangunan, tetapi juga melemahkan.

3. Modal Fisik (*Physical Capital*)

Green dan Haines (2002:113) melihat bahwa dua kelompok utama dari capital fisik adalah bangunan dan infrastruktur. Bangunan yang dimaksud seperti, rumah, pertokoan, perkantoran dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana air bersih dan sebagainya. Kapital fisik bersifat bertahan pada periode yang lama dan tidak bergerak atau berpindah tempat. Pada analisis dalam modal fisik, perusahaan perlu memperhatikan infrastruktur apa yang masih belum terpenuhi dalam masyarakat. Infrastruktur seringkali menjadi suatu hal yang penting dalam menunjang kegiatan masyarakat, oleh sebab itu analisis terkait modal fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus tepat.

4. Modal Keuangan (*Financial Capital*) Modal yang diperhitungkan dalam menentukan kesejahteraan suatu komunitas adalah kapasitas keuangan. Indikator yang menggambarkan modal keuangan masyarakat salah satunya adalah dengan

melihat banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Green (2002) mengatakan mengenai keterkaitan antara asset yang satu dengan yang lain, sebagai berikut:

"There is a strong relationship between financial capital and the other forms of capital. Much of the focus on physical capital has been on developing financial mechanisms to provide affordable housing. Human capital strategies focusing on self-employment often emphasize the importance of debt and equity capital to help new businesses start and grow. Strategies for building environmental capital also rely heavily on developing pools of capital to purchase land. Social capital is often intimately tied to access to financial capital in many communities. In many ways financial capital is the life hood of communities".

5. Modal Lingkungan (Environmental Capital) Modal lingkungan memiliki nilai penting karena mencakup beberapa aspek dasar masyarakat, yaitu sumber daya alam. Modal lingkungan sangat kompleks, baik dalam bagaimana masyarakat bekerja dengan lingkungannya, dan bagaimana masyarakat menjaga, melestarikan dan menggunakan kapital dengan tepat dan benar. Masyarakat harus peduli pada lingkungan sekitarnya serta memperhatikan tentang fungsi ekologis sumber daya alam, seperti pengendalian banjir dan asimilasi limbah. (Riyanti, C. dan Raharjo, S.T. 2021)

Tahapan *Asset Based Community Development* itu sendiri terdiri dari tiga menurut Mahyar (2008) dalam (Riyanti, C. dan Raharjo, S.T. 2021), yaitu:

1. *Identifying Local Asset* Mengidentifikasi asset lokal adalah tahap awal dari proses pengembangan masyarakat berbasis aset. Aset-aset tersebut biasanya terdiri dari karakteristik yang ada di dalam masyarakat, seperti insfrastruktur (jalanan), hasil alam maupun buatan manusia (taman dan ruang publik), hubungan sosial dan ekonomi baik di dalam maupun di luar komunitas, serta bentuk kepemimpinan politik. Mengidentifikasi asset sosial dan politik sama pentingnya dengan

mengidentifikasi aset alam. Asset sosial terdiri dari beberapa cara dimana warga memikirkan tentang diri mereka sendiri, kemampuan mereka, potensi dan masa depan bersama. (Riyanti, C. dan Raharjo, S.T. 2021)

2. Leveraging Local Asset Selama tahap kedua, para ahli (case worker, pemerintah, LSM) dan warga setempat mengeksplorasi cara-cara memanfaatkan sumber daya modal fisik dan sosial yang ada. Setelah asset fisik dan sosial diidentifikasi, tahap berikutnya adalah memanfaatkan asetaset tersebut. Dalam tahapan pemanfaatan asset lokal, hubungan antara bonding dan bridging capital sangat berperan dalam dalam memahami keberhasilan dari pendekatan berbasis asset. Selama waktu pengidentifikasian asset, expert knowledge dan local knowledge terus berkomunikasi. Namun, menggabungkan visi dari kedua pihak bukanlah perkara yang mudah. Untuk mencapai kerja sama yang setara, mereka harus menyamakan prioritas, nilai-nilai dan tujuan, dan memahami apa yang di sampaikan oleh setiap pihak. (Riyanti, C. dan Raharjo, S.T. 2021)

3. Managing Local Asset

Setelah tahap pertama dan kedua dilakukan, tahap ketiga yang harus dilaksanakan adalah mempelajari beberapa hal dalam menyusun strategi pengelolaan untuk memastikan agar asset lokal ini tetap terjaga dan bersifat berkelanjutan dengan mengidentifikasi, membagi dan menghargai asset masyarakat yang ada. Pengelolaan asset membantu dalam mempertahankan pembangunan kapasitas dari waktu ke waktu. (Riyanti, C. dan Raharjo, S.T. 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Neuman (2012,) "descriptive research present a picture a specific details of situation, social setting or relationship" (penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang terperinci tentang suatu situasi sosial, hubungan sosial atau setting sosial). Dengan menggunakan jenis penelitian ini dapat menggambarkan dan menganalisa proses perkembangan anak jalanan street on the child dan street of the street menjadi manusia silver, badut, pengemis, (pengamen, pedagang, pembersih mobil dll) yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan, upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengantisipasi, penanganan dan memfasilitasi masalah Anak Jalanan yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan, Sistem Panti dan Non Panti dalam memberikan pelayanan kesejahteraan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Serta menghasilkan suatu model pencegahan, penanganan, dan fasilitasi Pemeru Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan yang tepat bagi Pemerintah Kota Medan.

Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Berdasarkan pandangan tersebut maka pendekatan dalam penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif.

3.2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan dengan *locus* dan *focus* penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Medan yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu pencegahan, penanganan, dan fasiliasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan, yang ada di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan satu panti Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Sosial yaitu Panti Gelandangan dan Pengemis di Kota Binjai.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

- Studi literatur dan dokumentasi dari berbagai jurnal, buku, hasil penelitian dan media lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu pencegahan, penanganan, dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan.
- 2. Observasi mengenai kegiatan aktivitas anak jalanan di berbagai persimpangan jalan (*traffict light*) Kota Medan sebagai anak jalanan (Anak badut, manusia *silver*, pedagang asongan)
- 3. Wawancara mendalam terhadap informan penelitian yang dipilih dengan teknik *purpossive samplling* sebagai berikut:
 - 1. Informan Anak Jalanan penjual asongan dan orangtuanya (2 orang),
 - 2. Informan Anak Badut (2 orang)
 - 3. Informan Anak Manusia Silver (2 orang)

- 4. Informan Anak Penjual Jipang (1 orang)
- 5. Panti Asuhan Anak Gembira Kota Medan (1 orang)
- 6. UPT Panti Gelandangan dan Pengemis Kota Binjai (1 orang)
- Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Komisi Kerja Sosial Perkotaan
 (KKSP) Kota Medan (1 orang)
- 8. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan (1 orang)
- 9. Dinas Tenaga Kerja Kota Medan (1 orang)
- 10. Badan Pusat Statistik Kota Medan (1 orang)
- 11. Balitbang Kota Medan (1 orang)
- 12. Dinas Sosial Kota Medan (1 orang)
- 13. Dinas Pendidikan Kota Medan (1 orang)
- 14. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Medan. (1 orang)
- 15. Dinas Kesehatan Kota Medan (1 orang)
- 16. Bagian hukum Kota Medan (1 orang)
- 17. Bagian Kerjasama Kota Medan (1 orang)
- 18. Bagian Tata Laksana dan Organisasi (1 orang)
- 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan (1 orang)

3.4. Teknik Analisa Data.

Data dalam penelitian ini akan di analasis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh nantinya akan di kelompokkan dan diorganisir sebelum kemudian disajikan sebagai data penelitian baik dalam bentuk naratif, bagan, maupun tabel. Data yang disajikan penulis kemudian dianalisis dengan

menyesuaikan dengan kerangka teori serta metode penelitian yang telah direncanakan sebelum kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Miles dan Huberman (dalam Afrizal, 2016) menyatakan bahwa dalam melakukan analisis data, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan :

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan

2. Penyajian data /Data *Display*

Bermakna sebagai sekumpulan informasi tersususn yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Setelah langkah pertama selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian dengan teks yang bersifat naratif, bagan maupun dalam bentuk tabel

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian (Wawancara, Observasi dan Dokumentasi)

Berikut ini adalah hasil wawancara dan obeservasi serta dokumentasi kajian penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti, sebagai berikut:

Kamis, 02 Juni 2022 pada pukul 13.00 WIB -13.25 WIB peneliti melakukan kunjungan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan mewawancarai Titri. Jabatan sebagai Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan.

"Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memerlukan adanya pembinaannya, tidak hanya ditangkap dari jalanan kemudian di keluarkan kembali, menjadi tidak ada dampaknya. Kebijakaan saat ini Perda Kota Medan No.6 Tahun 2003 tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis di Kota Medan bisa dikatakan tidak efektif dan tidak ada koordinasi diantara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bersangkutan seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Kecamatan atau Kelurahan, bukan kurang efektif, lebih karena kurang pembinaan, karena setelah itu kan tindak lanjut tidak ada hanya sekedar begitu saja. Seperti Satpol PP pekerjaannya sudah bagus, sudah dilakukannya, tapi kan perlu juga rumah semacam pembinaan kepada anak jalanan ini, tidak hanya sekedar dimasukkan ke tempat ini, harus ada berkelanjutannya ada bagi mereka, mereka kan juga butuh makan kan di situ, kita kan gak hanya meminta bersihkan ini kota, orang ini bertolak darimana harus ada juga pembinaan-pembinaan agar mereka tetap hidup, penampungannya seperti apa, itu sebabnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memerlukan penanganan. Tapi tidak rumah singgah saja, harus ada program pembinaannya".



Gambar 4.1. Wawancara bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan faktor utama yang membuat orang menjadi anak jalanan diantaranya adalah faktor ekonomi, mungkin membantu orangtua, kedua lingkungan juga berpengaruh penting, keluar juga mungkin saja dia tidak senang berada di rumah, dia ke jalan akhirnya. Ujungnya adalah ikut bersama kawan-kawannya menjadi anak punk atau ada komunitas tersendiri. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Untuk menjadi Medan sebagai Kota Layak Anak (KLA) bukan persoalan layak tidak layak, mumpuni tidak Kota Medan melakukan hal tersebut, karena kan harus ada kriterianya juga yang mesti ditampung di situ tidak hanya masuk ke situ, dicomot begitu saja. Anak-anak itu bisa

menjadi anak jalanan karena beberapa faktor tadi, ujung yang mana kan, kalau ujung nya hanya untuk memindahkan mereka ke panti tidak ada gunanya juga. Ini kan untuk kepentingan mereka juga, karena mereka ini sebenarnya bisa menjadi seperti ini gitu, cuma memang mereka harus mempunyai wadah untuk mengembangkan kreativitas mereka.

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) PPKS anak jalanan paling utama adalah pembinaan, karena dengan pembinaan ini, anak jalanan itu hidupnya akan lebih terarah khususnya menyangkut masa depannya. Model yang diterapkan hingga hari ini Perda Nomor 6 Tahun 2003 adalah pendekatan hukum, dinilai ini kurang efektif dalam penanganan PPKS khusus anak jalanan bukan kurang efektif, ini harus kembali kepada pembinaan tadi, bila anak jalanan tadi ditangkap, lalu kemudian dikeluarkan lagi akan sia-sia, lebih bagus untuk menekuni di bidang pembinaan itu. Terdapat beberapa pelayanan, diantaranya panti asuhan atau non panti terhadap penanganan anak jalanan sebenarnya lebih baik dimasukkan ke panti dibina terlebih dahulu, setelah dianggap sudah matang untuk kembali ke masyarakat, baru diperbolehkan. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan perlu untuk membangun Panti Khusus Kota, lalu ditelusuri dahulu anak jalanan ini, kalau tidak memiliki rumah masuk kan mereka ke panti itu untuk dibina.

Ada koordinasi antara dinas sosial, universitas, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan lain-lain untuk memberikan pendidikan formal maupun non-formal dan latihan kepada anak jalanan harusnya bisa, karena Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan mempunyai program rencana lima tahun, antara perangkat daerah harus bekerja sama, tetapi terlebih dahulu mengirim usulan tertulis

kemudian dikaji pada tahun tertentu, sesuai kebutuhan atau selama lima tahun ini. Berarti memungkinkan sharing kerjasama dan kordinasi kerja antara dinas yang lain dan harus berkelanjutan.

Kamis, 02 Juni 2022 pada pukul 13.33 WIB -13.59 WIB peneliti melakukan kunjungan ke Bagian Hukum Sekretariat Kota Medan dan mewawancarai Ibu Yunita Sari, S.H. jabatan Kepala Bagian Hukum serta Bapak Albert Yahohe Lase, S.H., M.H. jabatan Analisis Hukum.

"Bagian Hukum Sekretariat Kota Medan menyebutkan sebagai anak jalanan yakni seperti manusia *silver*, penjual jipang, dan pengamen. Hanya batasannya beredar di jalanan, tidak sesedarhana itu. Anak jalanan banyak punya orangtua. Memang ada beberapa factor mengapa anak jalanan di jalan, misalnya faktor ekonomi, mungkin orang tuanya mampu, putus asa, terikut teman makanya bisa menjadi anak jalanan. Dari ekonomi pun, bukan merupakan faktor utama, faktor pergaulan mungkin. Itu sebabnya tentukan batasan anak jalanan ini. Kalau misalnya, masuk kepada anak terlantar, secara hukum ter*cover*."



Gambar 4.2. Wawancara bersama Bagian Hukum Sekretariat Kota Medan.

"Jika berbicara tentang anak jalanan, yang jelas Bagian Hukum Sekretariat Kota Medan sudah memikirkan itu, berbentuk Rancangan Perundang-undangan (Ranper), itu yang dikatakan sebagai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Rancangan Peraturan Daerah tentang anak jalanan. Mungkin karena perokonomian, makanya dibuat anak terlantar. Anak korban eksploitasi, jelas dilindungi. Makanya jelas buat batasan yang mana anak jalanan yang disebutkan ini. Anak jalanan tidak ada perlindungan hukumnya, anak terlantar yang ada. Mungkinkah setiap daerah membuat Perda untuk anak jalanan? Mungkin mengapa tidak, tapi maksudnya begini anak-anak itu diberikan bantuan kebutuhan sesuai pada umurnya, misalnya pendidikan kepada anak-anak itu. Dan yang diperlukan anak-anak itu, seperti didikan, mental, spiritual, sosial, pendampingan, bantuan sosial, bantuan hukum dan re-integrasi keluarga ini sesuai dengan hukum perlindungan anak. Jadi anak jalan gak ada, tapi coba larikan ke anak terlantar. Tapi yang bisa dilihat Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus Pratantigum tadi, lihat di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kota Medan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021. Kemudian ada Ranperda, ini dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak."

Kamis, 02 Juni 2022 pada pukul 14.10 WIB -14.36 WIB Bagian Kerjasama Sekretariat Kota Medan dan mewawancarai Ibu Seri Indrehayu A. S. Sos. M. Si, jabatan Evaluasi Kerjasama Setda Kota Medan.

"Memandang anak jalanan di Kota Medan seperti merusak pemandangan di Medan, melihat kehidupan mereka di jalan. Kalau perlu pelayanan sosial dirangkul, dengan cara pemerintah atau bagaimana bisa anak-anak itu bisa menjadi anak jalanan, karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, entah karena ikut-ikutan seperti anak *punky-punky* karena kehidupan orangtuanya bagus, tapi karena ikut-ikutan bisa. Pemko Medan saat ini akan membuat panti khusus anak supaya menjadi Kota Layak Anak (KLA)? Tetapi digunakan semestinya, anak-anak itu dilihat latar belakangnya kayak mana atau dibina selayaknya, ada ikut andil pemerintah di dalam penataan anak-anak."



Gambar 4.3. Wawancara bersama Evaluasi Kerjasama Setda Kota Medan

"Tapi anak jalanan itu dibina, dikembangkan sesuai ilmunya dan diberikan kepada tempatnya, bermanfaatlah pokoknya yang dikerjakan itu. Penanganan anak jalanan bisa saja bekerjasama dengan pemerintah lain. Rancangan Perda terkait anak-anak jalanan ini mungkin di bagian hukum lalu di eksaminasi setelah diperiksa, dan cocok sama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Bagian Evaluasi Kerjasama Setda Kota Medan ada MoU (Memorandum of Understanding) membuat kesepakatan dalam penanganan anak-anak jalanan mereka membuat hubungan kerja dengan koordinator dengan MoU (Memorandum of Understanding) yang telah disepakati. Tentu sudah dengan draf-draf yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita periksa kembali, apa yang kurang di dalam Perda itu yang mau dibuat, lalu kemudian disampaikan ke bagian hukum untuk dieksaminasi, setelah itu baru kita teruskan ke atas (Pemko). Mungkin sebagai Univeritas perlu untuk membantu, berkeahlian, bidang akademik, demikian juga Dinas Ketenagakerjaan. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pun demikian sesuai porsinya. Menjalin hubungan eksternal dengan Universitas biasanya USU (Universitas Sumatera Utara) ada kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Mereka melakukan kerjasama misalnya pendidikan, atau yang lain. Tapi MoU (Memorandum of Understanding) Pemko. Misalnya lagi Rumah Sakit Pirngadi dengan USU (Universitas kerjasama di bagian bidang kesehatannya. USU Sumatera Utara) (Universitas Sumatera Utara) banyak kerjasamanya, untuk membuat

kerjasama itu nah di sinilah itu letaknya MoU (*Memorandum of Understanding*). Apakah model penanganan anak jalanan ini sudah sesuai, misalnya dirazia, ditangkap dikeluarkan lagi. Tapi keinginan masyarakat ya, maunya bagaimana anak-anak itu bisa tertampung, dan tidak ada lagi yang di jalanan dan mempunyai keluarga yang layak."

Kamis, 02 Juni 2022 pada pukul 14.49 WIB -15.25 WIB pada Bagian Tata Laksana dan Organisasi Kantor Pemerintah Kota Medan dan mewawancarai Bapak Amir Hasan, jabatan Sub-Koordinator Kantor Bagian Tata Laksana Pemko Medan.

"Penanganan anak jalanan itu diatur oleh dinas sosial, sudah dibentuk perangkat daerah, bagaimana teknis pelaksanaannya yang bersangkutan yang paham. Pemerintah Kota Medan tidak memiliki panti khusus anak jalanan, dibuat panti khusus anak jalanan ini dan kaitannya dengan Medan Kota Layak Anak (KLA) merupakan kewenangannya Provinsi, bukan kewenangannya Kota. Sebenarnya KLA (Kota Layak Anak) Medan belum memiliki panti khusus anak jalanan. Teknis pelaksanaan terhadap anak jalanan, dan itu merupakan fungsi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi itu."



Gambar 4.3 Wawancara bersama Bagian Tata Laksana dan Organisasi Kantor Pemerintah Kota Medan.

"Terkait kelembagaannya Bagian Tata Laksana dan Organisasi Kantor Pemerintah Kota Medan sudah membentuk perangkat daerah, yang namanya Dinas Sosial, itu yang ada korelasi tugasnya dengan anak jalanan. Perdanya perangkat daeranya juga yang paham, apa substansinya. Bagian Tata Laksana dan Organisasi Kantor Pemerintah Kota Medan tata laksana hanya membentuk perangkat daerah itu saja. Berdasarkan Undang-Undang 23/ 2014 dan PP 18/ 2016 tentang perangkat daerah. Perda sudah ada muatan teknisnya, Bagian Tata Laksana dan Organisasi Kantor Pemerintah Kota Medan tahu hanya bagaimana lembaga itu kerja yang teknis peraturan perundang, ada undang-undang anak, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait mengatur anak jalanan."

Kamis, 02 Juni 2022 pada pukul 17.45 WIB -16.38 WIB mewawancarai Manusia Silver yang bernama Paskal berusia 15 Tahun dan Bobi berusia 16 tahun yang berada di Lampu Merah Jalan Sudirman.

"Bernama Paskal, umurnya15 tahun dan Bobi berumur 16 tahun. Kenapa menjadi manusia silver salah satunya karena ajakan teman aja dan dari sendiri. Tidak ada faktor orangtua, bahkan orangtua tidak tahu. Orangtua gak tahu ya. Paskal berasal dari daerah Kabanjahe sedangkan Bobi berasal dari Medan, Jermal. Paskal putus sekolah semenjak tahun lalu, sebenarnya mengundurkan diri. Putus sekolah sejak kelas satu SMP. Paskal pernah ke tangkap razia Satpol PP dan sering hingga bolak-balik. Di Lampu merah USU (Universitas Sumatera Utara) baru di Sudirman, Halat dan kami tidak menetap, pindah-pindah."



Gambar 4.4 Wawancara bersama anak manusia silver di Simpang Lampu Merah jalan Sudirman

.

"Prosesnya setelah ditangkap tidak diapa-apain, paling sampai di sana diperingati dan diberi makan. Bahkan dikasih juga uang rokok, baru disuruh balik. Kemudian dikeluarkan lagi paling cuma sebentar dan diberi denda dan mencuci kereta sebagai hukuman dan bersihkan kamar mandi. Jika tidak mengerjakannya akan disepak oleh petugas. Terkadang pulang diantar oleh petugas ke tempat pertama dijemput. Manusia silver ketika ditangkap di bawa ke Pinang Baris Dinas Sosial, Rumah Singgah (Mess), kadang dicampakkan ke Binjai. Sebenarnya, dari pak Satpol PP pernah ngasih saran sendiri, dibanding manusia silver main di lampu merah, bagus kalian main ke kafe-kafe kata dia. Main di kafe. Kalian bisa kerja kayak gini tanpa diganggu oleh petugas, tapi dengan sebaliknya, dengan cara di kafe jangan di lampu merah lagi. Alasan balik lagi ke pinggir jalan karena pihak kafe juga mengusir. Harapan manusia silver ke Pemko Medan harusnya Pemprov yang ngasih kerjaan kepada kami anak jalanan.

Selasa, 04 Juni 2022 tepatnya pada pukul 14.54 WIB-15.36 WIB peneliti melakukan kunjungan ke yayasan KKSP (Kelompok Kerja Sosial Perkotaan) dan

mewawancarai bapak Maman Natawijaya selaku direktur utama Yayasan KKSP (Kelompok Kerja Sosial Perkotaan).

"Terkait dengan anak jalanan, anak jalanan ini sendiri terbagi atas dua jenis antara lain offline dan online. Offline artinya dia memiliki rumah tinggal dengan orang tuanya, sedangkan online adalah dia tidak memiliki rumah tinggal atau si anak berdomisili diluar kota Medan. Terkait manusia silver, badut jalanan, pengamen, dan lain sebagainya itu adalah bentuk atau cara mereka untuk mencari nafkah semata. KKSP (Kelompok Kerja Sosial Perkotaan) sendiri melakukan ada melakukan program yang bersinggungan dengan anak namun tidak dilakukan secara rutin, program tersebut diberi nama program inklusi, dengan tujuan agar kehadiran anak jalanan tersebut bisa diterima di masyarkat umum, agar tidak dipandang buruk. Akses pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya mesti dipermudah, walau kadang terkendala dibagian pendataan, upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya kerjasama orang pemerintah dan orang yang paling dekat dengan mereka, yaitu kepala lingkungan. Rumah perlindungan khusus atau pun panti itu bagus untuk sebagai solusinya, dibutuhkan kerja sama benar-benar yang Pendampingan secara rutin, diberikan pemahaman, pendidikan dan semua dilakukan secara rutin. Perlu dilakukan kerjasama antar pemko dan lain sebagainya, sebagai pegangan hukum bagi semua pihak untuk mengatasi anak jalanan. Kewajiban untuk mengatasi anak jalanan ini adalah tugasnya negara, namun apabila dibutuhkan LSM sendiri sangat siap untuk membantu demi kesejahteraan bersama. Koordinasi semua pihak sangat dibutuhkan demi terjalankannya program ataupun pelatihan sesuai dengan yang direncanakan. Payung hukum, kejelasan pelayanan, SDM, semua perangkat harus jelas menaungi."



Gambar 4.5 Wawancara di Yayasan KKSP Medan

Peneliti melakukan penelitian ke Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada tanggal 06 Juni 2022 dengan mengirimkan beberapa pertanyaan dan kembali lagi pada tanggal 13 Juni 2022

"Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) didirikan sejak tahun 1996 konsern di isu perlindungan anak. Salah satu isu yang ditangani adalah isu anak jalanan dan miskin kota sejak tahun 1998 hingga kini. Selain itu memberikan layanan pendampingan hukum baik litigasi dan non litigasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pendampingan remaja, respon tanggap darurat, pemberdayaan keluarga. Pada awal penanganan anak jalanan dulunya (era tahun 90an sampai 2005), PKPA punya program pendampingan, pemberdayaan keluarga (kertas daur ulang), kegiatan kreativitas (musik) dan penyediaan rumah singgah. Namun seiring waktu PKPA perlahan melakukan evaluasi dan mencari strategi program dengan melakukan:

- a. Outreach/penjangkauan dan pendampingan,
- b. Pengembangan kreativitas minat, bakat dan olahraga (musik, tari, sekolah sepakbola dan kreativitas lainnya) agar anak menyalurkan hobby dan bakatnya serta mengurangi
- c. Mendirikan sekolah PAUD, sebagai upaya memperkenalkan pendidikan sejak dini dan mengantisipasi anak turun ke jalan mengikuti abang/kakak atau temannya.

- d. Dukungan Pendidikan (beasiswa), baik formal (meliputi uang SPP, uang ujian, perlengkapan sekolah) dan non formal (sekolah paket A/B/C atau berbagai pelatihan, seperti otomotif, menjahit, komputer dan lainnya bagi anak yang sudah *Drop Out*)
- e. Pemberdayaan keluarga, membuat kelompok *Credit Union* (CU) untuk orangtua
- f. Membuat RIM (Rumah Industri Marginal), sebuah wadah yang dikelola oleh kelompok ibu yang memiliki usaha yang mereka produksi sendiri. Sudah memiliki izin P-IRT dan Halal MUI.

Mulai tahun 2020, PKPA tidak lagi men*support* langsung seperti beasiswa karena program pemerintah sudah banyak yang seperti itu. Maka PKPA lebih fokus pada kerja-kerja advokasi baik di pemerintah, maupun non pememrintah.

- a. Advokasi kebijakan/peraturan daerah penyelengaraan perlindungan anak sebagai payung hukum untuk pemenuhan dan perlindungan anak di Kota Medan
- b. Lobby dan advokasi partisipasi anak menjadi mainstream dalam program, kebijakan dan anggaran baik di pemmerintah dan non pemerintah (organisasi masyarakat dan sector swasta)
- c. Memperkuat kapasitas CSO dalam memberikan layanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
- d. Pemberdayaan keluarga melalui program *good parenting*, mengingat persoalan anak jalanan adalah persoalan yang kompleks namun sering kali persoalan ini berawal dari keluarga yang disharmoni.

"Penanganan anak jalanan tidak bisa disamakan dengan pengemis, gelandangan dan tuna Susila seperti yang ada di PERDA tersebut. Karena anak jalanan yang menjadi pengemis dan terlantar di jalan sebagaimana yang diatur dalam konstitusi di Indonesia, UUD 1945 pasal 34. Bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya negara dan pemerintah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan pada fakir miskin dan anak terlantar termasuk anak jalanan. Maka ada sanksi berupa denda dan ancaman hukuman kurungan seperti yang ada di PERDA bertentangan dengan dengan amanat Konstitusi dan UU Perlindungan Anak. Jika tetap diterapkan bisa terjadi kriminilasasi terhadap anak nantinya. Umumnya pemerintah mempunyai program yang singkat seringnya lebih besifat bantuan dan bukan pemberdayaan yang bisa dilihat sejauhmana keluarga yang dibantu sudah ada progress kah, tepat sasaran kah?? Karena banyak bantuan yang ternyata penerimanya tidak tepat sasaran, Ini lagi-lagi persoalan pendataan dan verifikasi di lapangan".

"Perlu, karena pada hakikatnya pemenuhan hak anak bersifat inklusif, tidak melihat apakah anak tersebut berasal dari Kota Medan atau luar Medan. Sehingga jika bukan dari Medan maka Pemko Medan merasa tidak punya tanggung jawab. Ini sebenarnya bisa diselesaikan kalau pemerintah paham akan mandatnya sebagai pemangku kepentingan ia mempunyai kewajiban sesuai amanat UU Perlindungan Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali. *Trend* anak jalanan hari ini merambah sampai mejadi badut dan manusia silver, khususnya dimulai saat awal pandemic, awal tahun 2020. Intinya sama, anak masih berada pada situasi yang berisiko di jalanan. Mulai dari terpapar risiko akan kesehatan, rawan kecelakaan (kasus meninggalnya bocah silver, 2020), ancaman kekerasan dan penindasan hingga eksploitasi seksual dan ekonomi. Banyak factor yang membuat trend itu berkembang, ada factor pendorong dan faktor penarik.



Gambar 4.6. Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan

"Selain karena isu ekonomi, ikutan/diajak teman, sekian lamanya anakanak tidak pergi ke sekolah karena pembelajaran dilakukan secara daring hingga membuka peluang bagi sebagian anak yang tidak memiliki gadget/laptop, lemahnya pengawasan orangtua dan tergiur mudahnya mencari uang jajan atau tambahan biaya sekolah. Memang tidak mudah untuk menarik anak-anak tersebut di jalanan, Perlu pendampingan yang intens, penyadaran akan hak-hak dan perlindungan anak baik kepada anak itu sendiri maupu pada orangtua, karena banyak

kasus ditermukan, justru orangtua yang memfasilitasi atau memberi izin anaknya untuk menjadi badut dan manusia silver dengan alasan pendapatannya lebih besar, karena menjadi daya tarik bagi pengendara di jalanan. Ini akan menjadi kabar baik tentunya, namun yang harus diperhatikan RPS nantinya harus memikirkan cara dan strategi penanganan yang tidak bisa disamakan antara kelompok anak dan dewasa. Karena kabar dari Dinas Sosial sendiri mengatakan RPS tersebut akan bergabung dalam satu lokasi. Tentu harus dipikirkan metode penanganan dan pendampingan antara anak dengan dewasa, apalagi kalua mereka semua ditampung dalam satu lokasi yang sama. Ini bisa menimbulkan risiko baru.

"Kalau untuk anak jalanan mungkin lebih tepat penaganannya yang sistim non panti, yaitu sebaiknya kita melakukan reintegrasi kepada keluarga, kerabat dan panti mungkin jalan yang terakhir. Karena memaksa" anak jalanan untuk tinggal di sebuah tempat katakanlah itu panti atau rumah singgah tidak semudah kita menempatkan "korban" misalnya dalam rumah perlindungan. Karena terutama bagi anak jalanan yang sudah lama berada di jalanan, mereka sudah "terlalu nyaman" hidup bebas, tanpa ada aturan dan tidak perlu bertanggung jawab terhadap siapapun. Ketika di tempatkan di panti, banyak anak jalanan yang akhirnya melarikan diri dan Kembali hidup di jalanan. Harus ada program lain yang ikut memperkuat dan melatih lifeskill mereka sehingga secara perlahan mereka bisa tinggal di panti tersebut. Untuk khusus panti anak jalanan, saya pikir kita harus belajar dari program pemerintah yang sebelumnya. Sejauh mana panti atau rumah singgah yang bertebaran di Kota Medan mampu menyelesaikan persoalan anak jalanan tersebut? Lebih banyak berhasil secara program kah? Atau gagal? Jujur, kalau kita melihat malah banyak yang menjadikan program tersebut menjadi project semata untuk oknum tertentu. Dalam satu tahun rumah singgah banyak bermunculan namun setelah itu hilang dan bubar. Sama sekali tidak efektif. Dan sebagian membuat anak-anak menjadi malas untuk pulang ke rumah (bagi yang masih memiliki keluarga) karena merasa asik tinggal bersama teman-temannya".

"Strategi ini jauh lebih baik, karena masalah anak jalanan bukannya hanya menjadi urusan orangtua dan keluarganya saja, tetapi juga masyarakat yang punya tanggung jawab dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan memupuk rasa tanggung jawab mereka apalagi jika didukung oleh pemerintah setempat (kelurahan dan kecamatan) yang komitmen akan mendukung terciptanya sebuah *support system* dalam perlindungan anak. Kolaborasi antara program RPS dengan pelayanan yang berbasis masyarakat untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak serta program pemberdayaan keluarga agar keluarga tidak lagi

melakukan eksploitasi terhadap anaknya. Ketiga factor tersebut saling terkait dan beririsan. Maka diperlukan banyak pihak yang peduli untuk melakukan penjangkauan, asesmen apa yang menajdi persoalan dan kebutuhan mereka agar intervensi program tepat sasaran dan terukur nantinya. Diperlukan payung hukum yang tegas dan ramah anak bukan yang malah mengkriminalisasi anak. Sangat diperlukan, namun selama ini para OPD seolah-olah bekerja sendiri dan lemah secara kordinasi lintas OPD. Saling melempar dan mengelak. Harusnya semua OPD punya tanggung jawab dan komitmen untuk penyelesaian masalah anak jalanan. Kami sudah pernah melakukan audiensi dengan Dians Tenaga Kerja, mereka punya program pelatihan tapi tidak bisa menyasar pada kelompok anak. Target program mereka adalah usia 17 – 35 tahun. Artinya untuk usia anak mereka tidak punya program. Sementara untuk keluarga/orangtua seringya terkendala dengan pendidikan orangtua yang hanya tamat SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali."

Kamis, 02 Juni 2022 pada pukul 17.45 16.07 WIB -16.38 WIB mewawancarai manusia badut yang bernama Hana berusia 13 Tahun dan Teresia berusia 12 Tahun berada di Lampu Merah Jalan Abdullah Lubis.

"Hana berumur 13 tahun menjadi manusia badut dari mulai pukul 13.00 siang sampai dengan pukul 18.00 WIB. Hana masih kelas 2 SMP dan bersekolah di Gajah Mada. Setelah pulang sekolah membereskan rumah dulu di daerah Gajah Mada. Menjadi manusia badut karena memenuhi fasilitas ekonomi, kesulitan ekonomi, bayar uang sekolah sama uang cari makan. Setelah selesai jadi badut Hana pulang ke rumah, belajar setelah itu tidur. Manusia badut pernah ketangkap Satpol PP sebanyak 2 kali."



Gambar 4.7 Wawancara bersama anak badut di Simpang Lampu Merah jalan Sudirman.

"Ketangkap Satpol PP di Simpang Abdullah Lubis. Kemudian dibawa ke Pinang Baris. Kemudian di data dan disuruh pulang dan tidak dikasi makan. Kemudian dipulangkan. Tetapi tidak diantar oleh petugas. Tetapi kalau ada manusia kotak-kotak, yang pakai tulisan itu kotaknya diambil kotaknya. Terus kalau badut sudah ditangkap tiga kali, pakaian badutnya di sita oleh petugas. Kembali lagi ke jalan itu lah kak karena butuh uang sekolah, uang makan, bantu Mamak juga. Mamak jualan tisu di Simpang Abdullah Lubis jualan dan semua turun ke jalan. Harapan kepada Pemko Medan maunya dikasih bantuan, biaya uang sekolah, biaya ekonomi di rumah."

Selasa, 14 Juni 2022 pada pukul 09.36 WIB - 10.10 WIB di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan dan mewawancarai Bapak Ismail Marzuki Siregar, jabatan Kepala Pembinaa PAUD dan Pendidikan Non Formal.

"Bentuk kerjasama Dinas Pendidikan dengan instansi lain terkait menangani anak jalanan dan pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan Selama ini belum ada laporan anak jalanan atau belum ada kontak secara langsung antara anak jalanan dengan Dinas Pendidikan hanya saja Dinas Pendidikan ada program PNF (Pendidikan Non Formal). Pendidikan Non Formal ini diperuntukkan kepada anak yang tidak berkesempatan untuk mengecam pendidikan formal. Pendidikan Non Formal itu ada 2 (dua): Pertama bagian LKP (Lembaga Khusus Pelatihan) dan yang satu lagi PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) itu lah yang disebut dengan kejar Paket A, Paket B, Paket C. Inilah program Dinas Pendidikan yang menangani anak yang putus sekolah, tapi masih ingin mendapatkan layanan pendidikan secara non formal. Kata non formal, tetapi tetap melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Cuma kalau PKBM inikan banyak teknik belajarnya. Ada yang berupa modul, ada yang berupa pertemuan langsung dengan pengajarnya, ada yang mereka datang sendiri."



Gambar 4.8 Wawancara bersama Kepala Pembina PAUD dan Pendidikan Non Formal

"Mencoba untuk menarik anak-anak yang tidak sempat untuk mengecam pendidikan formal supaya tetap melanjutkan sekolah. LKP (Lembaga Khusus Pelatihan) ini diperuntukkan untuk anak-anak yang usia sekolah, tetapi tidak bisa melanjutkan kedunia pendidikan formal. Misalnya untuk melanjutkan ke SMA. Jadi di LKP (Lembaga Khusus Pelatihan) ini mereka di tampung memberikan pembelajaran. Misalnya untuk kecantikan, tata rias pengantin, tata rias busana, desain grafis. Anak-anak putus sekolah kita tarik belajar dengan keahlian-keahlian yang ada. Biasanya Dinas Pendidikan bekerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Dinas Pendidikan SPK (Surat Perjanjian Kerja) tidak ada. Kolaborasi Dinas Pendidikan sesuai dengan hastag Pak Walikota #KolaborasiMedanBerkah misalnya. Dinas Pendidikan mereka minta data ke kita dan sebaliknya kita minta data kemereka mau melakukan kerjasama. Berkolaborasi saja kerjanya. Kalau SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) secara tertulis tidak ada. Hanya kerjasama secara kolaborasi saja. Kendala yang sering dialami di Dinas Pedidikan baik dari anggaran, program, SDM (Sumber Daya Manusia) dalam menangani anak jalanan salah satu nya yaitu Dinas Pendidikan kurang Sumber Daya Manusia (SDM) seperti guru kan kurang. Makanya sekarang menerima guru PPPK sedang besar-besaran. Kemarin ada sekitar 500 (lima ratus) lebih, tahun berikutnya ada 1000 (seribu) lebih, tahun depan nambah lagi 2000 (dua ribu). Kendalanya disitu. Sumber Daya yang kurang".

"Kalau untuk instansi lain atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain selalu memiliki hubungan yang baik, pasti tidak ada tutup menutupi sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jadi apa yang mereka butuhkan pasti tanya kekita. Apa yang kita butuhkan pasti tanya ke mereka. Sama seperti kita bekerjasama tiap bidang. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) akan melaksanan pelatihan ketenagakerjaan. Ada 100 (seratus) orang yang mereka minta. Jadi mereka menghubungi kita. Pak Kabid, kira-kira Dinas Pendidikan gimana? Karena fokusnya ke guru-guru kami butuh 100 (seratus) orang. Dinas Pendidikan melalui saya sebagai penghubung saya sampaikan PAUD 20%, kemudian SD 50%, SMP 30% jadi seperti itu. Kita saling memberikan informasi, saling memberikan data supaya program-program yang ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing bisa terjalankan.

"Sama dengan Dinas Kesehatan bulan Imunisasi Anak Nasional, kan PAUD pesertanya. Kita persiapkan pesertanya. Berapa jumlah yang ingin kita siapkan, setiap Kecamatan tolong kordinasikan. Disana ada lah IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak), Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Akan selalu mulus perjalanan kalau baik secara kordinasinya, seperti yang dituntut oleh Pak Walikota untuk kolaborasi, jangan ada nanti kendala-kendala dilapangan. Kalaupun ada kendala-kendala dilapangan hanyalah komunikasi yang mungkin misalnya tidak sampai komunikasinya karena jaringan atau semacamnya dan mereka akan datang kemari atau kami datang kesana. Kalau yang namanya komunikasi yang tidak baik atau rusak, tidak ada sejauh ini".

Pemerintah Kota Medan belum ada Panti Asuhan Anak, di Dinas Sosial yang ada hanya RPS (Rumah Perlindungan Sosial) bagaimana pandangan Dinas Pendidikan terkait Panti Asuhan tidak diranah kita dan kita setuju kalau ada panti asuhan. Dinas Pendidikan siap membantu kalau ada Panti Asuhan. Sama dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) sedang digalakkan, tapi kan bukan diranah kita. Itu diranah Provinsi yang nangani tetapi kolaborasi dengan kita begitu. Kalau seandainya ada yang menyampaikan bagaimana panti asuhan?

"Kita mendukung lah pada itu. Cuma ditempatkan ditempat yang pas. Dinas sosial dikordinasikan dengan panti asuhan. Kita bisa membantu kordinasikan. Ada tidak kemungkina kerjasama tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bersama dengan Universitas, atau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya untuk rancangan Perda Penanganan Anak Jalanan Itu bisa saja terjadi. Kalau untuk Universitas kita sudah ada PKS nya (Perjanjian Kerja Sama) tetapi tidak dengan itu. Masalah peningkatan Sumber Daya Manusia Guru. Misalnya mereka ada kerja dengan itu Misalnya mau naik kerja sama ke S1 PAUD guru-guru yang masih SMA itu sudah ada kerjasama kita. Kalau untuk pembuatan Perda bisa aja. Nanti untuk Perda Kota Layak Anak (KLA) ini mau kita buat, sedang digalakkan Kota Layak Anak (KLA). Sedang dirancang, semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hadir. Perda Kota Layak Anak (KLA) sedang dibuat, sedang disusun. Semuanya akan ada. Hal yang sama, tetapi sifatnya untuk pelatihan? Untuk pelatihan sudah banyak, sekitar sebulan yang lalu kita buat pelatihan kewirausahaan untuk anak pendidikan non formal. Kemudian pelatihan bahaya narkoba, baru selesai sebulan yang lalu. Kalau untuk pelatihan sudah banyak."

"Saran dan harapan terkait anak jalanan, mulai dari peraturan, Perda, kerjasama antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait masalah anak putus sekolah yang sedang kita jalankan disitu inklud Kota Layak Anak (KLA) sudah ikut semua. Masalah anak jalanan, masalah sekolah anakanak. Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah terkait, kemudian pemerintah sudah mempelopori itu pemerintah daerah. Itu langsung dari pusat, sudah dilaksanakan, sudah dalam proses dalam waktu dekat ini sudah muncul berkas itu. Salah satu indikator Kota Layak Anak (KLA) angka putus seklah berkurang, bagaimana penanganan anak jalanan, bagaimana sekolah anak-anak. Kalau kita Dinas Pendidikan akan selau berkordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain dan juga selalu dalam ranah pendekatan pimpinan. Apa yang diperintahkn pimpinan akan selalu kita kerjakan."

Pada Jum'at 10 Juni 2022, pada pukul 14.00 WIB - 14.25 WIB di Dinas Sosial Pemerintah Kota Medan dan mewawancarai Bapak Lamo Tobing jabatan Pengelola Rehabilitasi Sosial.

"Syarat untuk mendirikan panti salah satunya akta notaris, SK Kementerian Hukum dan HAM, surat domisili panti, struktur organisasi, rekening yayasa, NPWP, foto kegiatan. Pandangan terkait banyaknya anak jalanan di Kota Medan sudah bukan rahasia umum lagi, yang namanya anak jalanan di pusat ibu kota ini tidak akan ada habis. Satu ya mungkin pastinya karena ibu kota, rasa iba orang Medan tinggi. Kalau dari data yang kami buat anak jalanan ini, 70% bukan dari Medan, ada yang datang dari Deli Serdang, dll. Jadi tidak semua memang yang Dinas Sosial tertibkan itu berasal dari Medan. Untuk Kota Medan tidak memiliki wadah atau penampungan. Karena Medan tidak boleh mendirikan yang namanya panti jadi solusinya adalah Dinas Sosial sedang membuat rumah persinggahan sosial, tapi hampir mirip seperti panti. Lalu ada pelatihan pemberian keterampilan untuk anak jalanan, namun setelah covid melanda itu tidak ada lagi, kemarin katanya efisiensi anggaran, sehingga Dinas Sosial tidak ada lagi namanya memberikan pelatihan keterampilan kepada anak jalanan.



Gambar 4.9 Wawancara bersama Pengelola Rehabilitasi Sosial

"Semua kegiatan nya dilaporkan karena Dinas Sosial memberikan surat izin, jadi harus tau seperti apa perkembangannya. Dan yang berhak tinggal RPS mungkin nanti ada SOP nya karena bukan hanya untuk anak saja, bahkan untuk yang gangguan jiwa ada disitu. Untuk kendala yang begitu berat tidak ada. Kalau untuk instansi lain diluar dinas sosial sepertinya bagus, jadikan di produk hukum belum ada produk langsung dalam menangani anak jalanan. Lalu untuk bantuan-bantuan untuk kemudian diberikan ke lembaga nya, karena ada dana rutin tiap tahunnya dari kota Medan. Cuman untuk bantuan langsung ke orangnya atau individu itu tidak ada. Medan ini tidak ada peraturannya yang khusus dalam mengatur penanganan anak jalananan, kiranya ke depan kalau bisa ada lah produk hukumnya. Yang kedua, masalah rumah perlindungan sosial, karena kajian akademis dan kendala lainnya semoga cepat progresnya untuk selesai, sehingga untuk penanganan ke depan Dinas Sosial bisa lebih cepat. Kalau anak jalanan ini kan mereka 90% memiliki keluarga, jadi karena memiliki keluarga kami tidak bisa serta merta Dinas Sosial bawa ke panti, cuma Dinas Sosial selalu membuat datanya dokumentasi kalau memang anak ini dua tiga kali tertibkan kalau memang orang tuanya tidak sanggup lagi mengarahkan anak ini, membimbing, mengarahkan, menafkahi, lebih baik serahkan ke Dinas Sosial."

Rabu, 08 Juni 2022 pada pukul 15.28 WIB -15.45 WIB peneliti mewawancarai Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kota Medan dan mewawancarai Bapak Julroi Perangin-angin.

"Fenoma yang terlihat sekarang ini banyak sekali anak jalanan yang dikatakan untuk mencari makan nya, ada yang menjadi manusia silver, pengamen dll. Memandang fenomena seperti ini disebut fenomena di urban seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan nya.



Gambar 4.10. Wawancara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kota Medan

"UUD (Undang-Undang Dasar) menyatakan negara harus memberikan penghidupan yang layak kepada warga negaranya. Medan pada tahun 2003 Medan mengeluarkan SK Perda No 06 tentang Larangan Menggelandang dan Pengemis Serta Tuna Susila di Kota Medan. Ini bisa dikatakan kurang efektif karena kurang koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan.Karena kurang koordinasi, tapi yang jelas kalau memang itu Perwal itu sudah ada, tentu

ada satpol PP yang tugasnya itu tentu adalah menegakkan Perda atau Perwal. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) sendiri pertumbuhan penduduk Kota Medan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) data Kalo medan itu tidak mengalami pertumbuhan yang relatif, dari tahun 2010-2020. Koordinasi antar lembaga menjadi wadah untuk menangani anak jalanan sangat mungkin tetapi tergantung kemauan, kalo kita mau itu semua bisa dilakukan, tinggalkan. Harapan Badan Pusat Statistik (BPS) kembalikan ke regulasi yang ada artinya ada sebenarnya regulasi tentang anak jalanan, tapi di sisi lain pemerintah juga harus bertanggung jawab meyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak."

Pada Jum'at, 10 Juni 2022 pukul 13.37-14.02 WIB peneliti telah melaksanakan kunjungan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan dan wawancara bersama Adelia Risa Panjaitan, S.E., M. SP. Jabatan sebagai Fungsional Perencanaan.

"Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam hal ini mengatakan PPKS sangat penting keberadaannya karena di dalamnya ada program pembinaan, bukan hanya anak jalanan ini diamankan dari jalanan, namun mereka harus dibina pula agar supaya masa depan mereka lebih terarah. Perwal Kota Medan No.6 Tahun 2003 tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis di Kota Medan menjadi salah satu upaya oleh Kota Medan terlebih menyangkut peraturan. Namun, bila mana peraturan ini kurang dalam pelaksanaannya, harusnya dievaluasi kembali. Dalam pada itu Satpol PP misalnya sudah menjalankan amanatnya dengan baik.



Gambar 4.11. Wawancara bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan.

"Untuk anak jalanan ini sendiri fasilitas harus disediakan secara "lengkap, artinya segala fasilitas yang ada harus digunakan sebaik mungkin supaya solusi yang dituju dapat teracapai. Faktor yang paling utama yang membuat seorang anak itu menjadi anak jalanan adalah karena faktor ekonomi, misalnya menjadi salah satu tulang punggung keluarga. Kedua faktor lingkungan, karena kurang mendapat perhatian di dalam rumah, anak berpotensi ke luar dari lingkungan keluarganya dalam mencari kehidupan yang lebih baik menurutnya, maka ia kemudian pergi ke jalan yang menurutnya itu sudah menjadi solusi terbaik. Dalam mencapai Kota Medan Layak Anak beberapa kriteria terlebih dahulu, diantaranya mempunyai panti khusus. Dengan adanya panti khusus tersebut akan lebih mudah dalam penanganan anak jalanan ke depannya, yang notebenenya seluruh elemen pemerintahan harus bersinergi . Untuk melegitimasi ini semua, Peraturan Daerah (Perda) dapat dijadikan sebagai solusi, karena sebagian besar anak jalanan yang datang ke Medan tidak

berasal dari dalam kota. Dengan demikian, Perda menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini karena cakupannya sudah lebih kompleks. Lebih lanjut, dalam mengembangkan seluruh potensi anak jalanan, Universitas, UMKM, Birokrasi, akan saling mengisi sesuai dengan porsi masing-masing. Sebaiknya anak jalanan itu tidak kembali ke Medan khsusunya yang berasal dari luar kota, dan pemerintah asal harus juga memperhatikan hal demikian."

Pada Kamis, 02 Juni 2022 pukul 17.00-17.25 WIB peneliti telah melaksanakan wawancara bersama salah seorang anak jalanan penjual jipang bernama Yarja Wijaya berusia 10 tahun di Lampu Merah Jalan Iskandar Muda.

"Yarja Wijaya merupakan seorang anak jalanan yang berprofesi penjual jipang di lampu merah Jalan Iskandar Muda, Medan. Usianya sudah 10 tahun dan ia menempuh pendidikan di salah satu SD di Sei Serayu, saat ini ia sudah kelas 5. Setiap pulang sekolah ia bersama kakanya tepatnya sore hari ia menjual jipang di sekitaran lampu merah ini hingga pukul 8 malam. Alasannya mau berjualan jipang untuk tambahan uang sekolah.



Gambar 4.12. Wawancara bersama Yarja Wijaya (Penjual Jipang) di Lampu Merah Jalan Iskandar.

"Orangtuanya setiap hari dari rumahnya di Jalan Bromo mengantar ia bersama kakaknya, setelah selesai berjualan ia dan kakaknya di jemput kembali oleh orangtuanya. Ketika razia Satpol PP ia pernah diamankan, setelah namanya dicatat lalu ia dikembalikan ke orangtuanya. Pernah suatu ketika, setelah ia diamankan oleh petugas, ia dikembalikan lagi ke tempatnya berjualan. Peristiwa yang dialami Yarja ini sebenarnya diketahui oleh orangtuanya, tetapi tidak digubris sama sekali. Mungkin usia Yarja yang masih dini membuat orangtuanya tidak terlalu memikirkan peristiwa yang dialami oleh Yarja. Walaupun Yarja sudah pernah diamankan oleh petugas, ia tetap kembali ke jalan untuk memenuhi uang jajan selama ia menempuh pendidikan."

Pada Sabtu 04 Juni 2022 puku 13.26-14.17 WIB peneliti telah melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Anak Gembira dan mewawancarai Besri Ritonga yang bertindak sebagai Ketua Panti Asuhan Anak Gembira.

"Litbang (Penelitian dan Pengembangan) tentang kota Medan, mengenai anak-anak terlantar, anak jalanan kota Medan/yang termarjinalkan. Untuk anak-anak terlantar dalam penangannya sudah ada anggaran sebesar Rp. 11.000.000.000. Jadi untuk menangani hal seperti ini diperlukan tenaga-tenaga yang langsung bisa survei di lapangan. Saya sering kali berhenti bila ada anak jalanan, bahkan kalau orang tuanya sudah keterlauan saya bawake panti ini. Jika misalnya diperlukan dari panti asuhan anak gembira kami selalu siap untuk melayananinya.



Gambar 4.13. Wawancara bersama Panti Asuhan Anak Gembira.

"Untuk kerjasama antar panti di Sumatera Utara, Kota Binjai yang sudah sering melakukan kerjasama. Terakhir, ada seorang anak jalanan beretnis India yang sudah hidup sebatang kara dia ditemukan mencuri gas tabung karna tidak makan, dan akhirnya dikerubungi massa dibawa ke kantor polisi. Setelah diperiksa psikologi anak, mengapa dia berbuat demikian, karena belum makan. Dia tidur di mesjid, rumah kosong dan pemerintah daerah tidak memperhatikan itu, dinas sosial setempat pun tidak memperhatikan itu, nah ketika terjadi insiden tadi baru heboh. Sampai dia di Dinas Sosial Langkat, ditelusuri ke panti setempat tidak ada yang menerima. Walaupun dia masih dibawah umur, fisiknya sudah kekar, merokok, bahkan sudah berganja, orangnya memang sudah di luar kendali. Karena tidak ada yang ingin menampung dia, maka dia kemudian dibawa ke panti ini dan kemudian saya rawat seperti anak-anak umumnya yang berada di sini, tetapi bertahan satu bulan lebih. Bukan karena dia batasi tinggal sampai berapa lama di panti ini, namun dia sendiri yang memutuskan untuk keluar".

"Beberapa anak jalanan di sini itu memang dititipkan oleh orangtuanya karena tidak sanggup lagi mengurusnya, dan ada juga yang memang langsung kami ambil dari jalanan. Contohnya Paulus saat itu berumur tiga tahun, ditinggalkan ibu nya disini, disewakan kamar, kamar ini sewanya

satu bulan Rp. 300.000, disewa oleh ibunya, anaknya berjumlah dua orang . Memang untuk konsumsi mereka ini awalnya lancar, tetapi tidak tahu alasannya anak-anak ini sudah 10 hari tidak makan, atas inisiatif panti kemudian anak-anak itu kami rawat setelah mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit. Tetapi saudara Paulus mengalami gangguan tuna wicara. Pelayanan pertama yang dilakukan adalah tentang kesehatannya. Saat ini saya sedang mencari anak karena disuruh oleh orangtuanya mengamen namanya Andira. Nah, saat dia datang ke panti ini, ibu tirinya datang kembali menjemputnya, itulah sebabnya ia kemudian lari dari orangtunya dan sampai sekarang belum ditemukan . Itu merupakan contoh kasus sekarang yang sedang ditanganu. Dan saat ini sudah saya koordinasi dengan ojek *online* bilaman berjumpa dengan anak ini segera hubungi saya, serta sudah dilaporkan ke polisi supaya ditindaklanjut dan Dinas Sosial."

"Karena anak ini ibu kandungnya sudah meninggal, bapaknya kemudian menikah lagi, lalu Andira dieksploitasi oleh ibu tirinya, sementara bapaknya Andira sudah bercerai dengan ibu tirinya tadi. Jumlah anakanak di panti ini sekarang sebanyak 21 orang, kami perlakukan mereka seperti anak kandung kami sendiri. Kendala yang dihadapi dalam mendidik anak-anak ini karakter yang berbeda-beda, jadi kami di sini dituntut harus lebih adaptif. Mirisnya lagi di daerah Helvetia tujuh orang Ibu-ibu menyewakan bayinya untuk dijadikan alat mengemis, sesuai dengan kesepakatan mereka di sana. Misalnya berapa sewa perhari bayi tersebut, ini harus menjadi perhatian bersama. Medan saat ini belum layak dikatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA), karena peran pemerintah belum fokus dalam menangani permasalahan ini, peran petugas yang kurang tertata rapi di lapangan, dan sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Artinya terlebih dahulu bekerjasama misalnya dengan panti dan fasilitasi supaya tujuannya lebih mudah tercapai".

"Dengan demikian, program seperti pelatihan kepada anak-anak jalanan yang sesuai dengan minatnya akan lebih mulus dilaksanakan. Saran saya beri pelatihan kepada mereka yang menangani anak di jalanan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Kedua, anak-anak jalanan harus diperhatikan dengan benar, bukan hanya dibawa ke Dinas Sosial, tetapi bawalah ke panti dan penuhi fasilitasnya. Terakhir, Dan yang tumbuhkan harapan, hari esok akan lebih baik daripada hari ini."

Pada Sabtu, 04 Juni 2022 16.06 - 16.42 WIB peneliti telah melaksanakan wawancara bersama salah seorang anak jalanan penjual kerupuk jangek (asongan) bernama Karoline 11 tahun di Simpang Lampu Merah Jalan Karya Wisata.

"Karoline merupakan seorang anak jalanan yang menjual kerupuk jangek di sekitaran lampu merah Jalan Karya Wisata. Saat ini ia sudah berumur 11 tahun dan sedang menempuh di salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Medan Amplas. Ia tinggal bersama orangtuanya di Gang Bakti, tidak jauh dari tempatnya berjualan, aktivitas berjualan ini sudah berlangsung selama dua tahun. Uniknya pengalaman Karoline sebagai penjual jangek tidak pernah diamankan petugas Satpol PP. Biasanya setelah pulang sekolah Karoline dengan berjalan kaki langsung berjualan menyusul ibunya hingga jam 9 malam.



Gambar 4.14 Wawancara bersama Karoline (Penjual Jangek) di Lampu Merah Jalan Karya Wisata.

Alasan Karoline dan ibunya berjualan untuk keperluan pokok sehari-hari. Memang bapak Karoline masih ada, namun tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pemberi nafkah karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung. Selama dua tahun lebih aktivitas ini sudah menjadi rutinitas bagi Karoline bersama ibunya. Sebenarnya Karoline mendapat bantuan pemerintah dari sekolah, sekitar Rp. 450.000 tetapi tidak rutin. Keadaan mereka yang seperti ini mengharuskan untuk turun ke jalan dalam memenuhi hajat hidup. Kalau hari kerja Karoline menyusul ibunya berjualan, tetapi kalau di hari libur Karoline mulai berjualan bersama ibunya dari pukul setengah 10 pagi.

Peneliti telah melaksanakan kunjungan ke Dinas Ketenagakerjaan pada Rabu, 08 Juni 2022 13.35 WIB dan telah mewawancarai Timbul Antonius, S.H yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penempatan.

"Secara organisasi bahwa sebenarnya anak-anak yang berada di jalanan tidak masuk kategori usia kerja. Pada hakikatnya, usia di bawah 15 tahun kewajibannya adalah menempuh pendidikan hingga selesai, karena usia kerja berada pada 15-64 tahun. Pengalaman saya saat tugas di Dinas Sosial dulu, anak-anak yang sudah diamankan oleh petugas, sebenarnya sudah diagendakan untuk tinggal di panti. Apabila orangtuanya masih hidup dan mampu, orangtuanya diberikan kebebasan untuk melihat anaknya, tentu harus mengikuti prosedur yang berlaku. Persoalannya anak-anak yang sudah diamankan oleh petugas, mereka bersikeras untuk kembali ke jalanan karena bagi mereka ini sudah menjadi bagian hidup mereka. Ketika dilakukan peninjauan sampai ke Kelurahan anak-anak ini tetap tidak ingin mengikuti agenda pemerintah, mereka ingin tetap tinggal bersama orangtuanya. Mungkin ini didasari faktor adaptasi yang kurang dalam mengikuti aturan karena selama ini hidup di jalanan itu penuh kebebasan".

"Perda No 6 tahun 2003 tentang larangan menggelandang dan mengemis di Medan telah dapat dijadikan sebagai instrumen, persoalan mendasar itu belum ada pembinaan yang bersifat simultan. Saat saya berada di Dinas Sosial Kasubbag Program, saat itu dirapatkan oleh Kepala Dinas Sosial tentang apakah dinas ini bersedia melaksanakan pelatihan bagi warga dan orang-orang yang berada di jalanan? Dengan tegas Dinas Sosial siap akan program ini, dan harus memenuhi kualifikasi yang telah disepakati bersama, serta sinergitas antar lembaga yang ada benar-benar diperkuat".

"Misalnya sekolompok anak dilatih untuk menambal ban bocor dan fasilitasnya dipenuhi, tetapi janganlah semua fasilitas itu dijual ke orang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih instan. Dinas sosial yang lebih andil dalam hal ini baiknya membuat grand design agar supaya dipahami bersama. Faktor ekonomi bisa membuat seseorang menjadi anak jalanan, kecuali anak punk dan bukan juga sebagai faktor dominan. Artinya faktor ekonomi memungkinkan, selain itu faktor keluarga yang berorientasi hasil yang instan. Menyangkut Grand design sebelumnya programnya berupa panti khusus atau rumah singgah, seperti sebelumnya mempunyai program yang sistematis dalam menunjang kreativitas anak-anak tersebut, harusnya panti-panti ini pun di setiap kecamatan harus ada supaya masalahnya lebih terorganisir dan mudah diselesaikan. dahulu, jangan kita pelatihan yang kurang matang. Agar supaya saling percaya antara pelaksana tugas dan anak-anak jalanan, dimulai dari hal kecil, misalnya kepala lingkungan melakukan pendataan, kemudian diberikan penjelasan yang rasional sampai mereka datang ke panti secara sukarela. Selain Perwal, Perda juga dapat dijadikan alat, bila mana anak-anak jalanan itu berasal dari luar Kota Medan. dalam menunjang kreativitas anak-anak jalanan ini dapat dilakukan kerjamasam dengan kampus dan UMKM sesuai dengan porsi tertentu, dengan catatan sudah masuk di usia kerja. Dan yang lebih penting, grand design itu harus dijadikan sebagai fondasi awal."



Gambar 4.15. Wawancara bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Senin, 20 Juni 2022, pada pukul 11.30 WIB -12.00 WIB peneliti melakukan wawancara di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan dan mewawancarai ibu Evi pada bagian Kasi Kerjasama Bidang Penyajian Data dan Inovasi Pelayanan.

"Tanggapan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Medan terhadap anak jalanan di Kota MedanUntuk saat ini belum ada pendataan untuk anak jalanan baik dari dalam kota Medan maupun dari luar kota Medan. Tetapi Disdukcapil ada bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak, yang memfasilitasi. Terhadap anak jalanan dari luar Kota Medan namun berkegiatan di Kota Medan yang dia punya data Medan kita bantu untuk pengurusan akta kelahirannya untuk anak-anak jalanan. Strategi Disdukcapil untuk Kota Layak Anak (KLA) di Kota Medan itu pemenuhan hak sipil itu, akta kelahir, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Mungkin ada untuk Anak Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK) seperti yang berada di lapas anak dilakukan pendataan yang berusia 0-18 tahun, jadi yang sudah berusia 17 tahun kita buatkan ktpnya. Selain itu ke panti asuhan didata anak-anak yang belum punya NIK kita buatkan NIKnya dengan syarat yang lengkap, misalnya dengan adanya surat serah terima polisi dari panti asuhan. Selain itu dengan lapas anak, panti asuhan, terus anak-anak yang disabilitas, mungkin yang sudah berusia 17 tahun tidak bisa merekam di sini akan dilayani ke rumah, langsung ke rumah sesuai permintaan. Karena Disdukcapil tidak tahu data-data anakanak disabilitas ini ada surat dari keluarganya minta tolong dibuatkan perekaman di rumah, datang ke rumah perekaman KTP. Selian itu juga di Sekolah Luar Biasa (SLB). Untuk yang datang ke rumah ini biasanya ada satu orang per bulannya, kadang campur selain anak-anak ada juga orangtua yang belum punya data. Selain itu di sini sudah Disdukcapil sediakan jalur untuk disabilitas, dan ruangan-ruangan lain yang Pelayanan dan program yang diberikan mendukung aktivitas mereka. Disdukcapil Kota Medan terhadap Anak Jalanan di Kota Medan masih bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak itu, kalau untuk turun langsung ke lapangan belum ada."



Gambar 4.16 Wawancara bersama Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan

"Disdukcapil Kota Medan dalam menangani Anak Jalanan khususnya di Kota Medan masih bekerjasama dengan Lembaga perlindungan anak, dan sampai sekarang yang menjalin kerjasama masih kedua lembaga ini. Masih dengan lembaga tadi, untuk Dinas Sosial sampai saat ini belum ada untuk anak jalanan itu. Tapi kalau untuk anak-anak panti asuhan ada, karena seringkali anak jalanan ini berasal dari luar kota. Nanti bila dibuatkan KTP nya yang bertanggung jawab atas data-data dia tidak ada. Berbeda dengan anak-anak yang ada di panti karena penanggung jawabnya sudah ada. Tapi kalau dia berasal dari Medan maka akan dibantu oleh lembaga perlindungan anak. Disdukcapil Kota Medan terlibat dalam merancang Perda tentang Perlindungan Anak karena Perdanya kan sudah dirancang tapi belum disahkan".

"Disdukcapil Kota Medan membuat kegiatan pelatihan, seminar dan sosialisasi tentang Anak Jalanan di Kota Medan dengan melibatkan Universitas atau pun Lembaga lain Kalau untuk pelatihan yang paling bertanggung jawab itu Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial, untuk Disdukcapil bisa membantu data di bidang kependudukan, kelengkapan Kendala Disdukcapil Kota Medan dalam memberikan hak sipil. pelayanan kepada Anak Jalanan di Kota Medan? Dia tidak warga kota Medan, tidak mempunyai data yang jelas, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas dia berbeda dengan panti punya kepala keluarga yakni ketua panti. Kendala Disdukcapil Kota Medan dengan OPD, Instansi dan Lembaga lain dalam hal kerjasama atau kolaborasi menangani Anak Jalanan di Kota Medan belum ada yang konsentrasi di bidang itu, mungkin Dinas Sosial mau membantu untuk di bawa ke panti sosial. Saran dan harapan Disdukcapil Kota Medan terhadap kebijakan pemerintah, Perda, kerjasama antar OPD, Instansi dan Lembaga lain serta Anak Jalanan di Kota Medan maunya ada lah peraturan khusus untuk menangani anak jalanan ini. Jadi agar supaya lebih mudah untuk membantu mereka khususnya yang berkaitan dengan catatan pendudukan dan sipil."

Selasa, 21 Juni 2022 pada pukul 11.26 WIB – 11.54 WIB peneliti melakukan wawancara di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan dan mewawancarai Ibu dr. Serevia Faradillah pada bagian Sub Koordinator.

"Menurut Dinas Kesehatan anak jalananan tentu mendapat perhatian apalagi terkait dengan hak untuk kesehatannya mereka juga Undang-Undang harus ada tentang anak, walaupun berada dijalanan. Jadi intinya sangat perhatian dengan anak jalanan. Kota Layak Anak (KLA) erat kaitannya dengan Dinas Kesehatan dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di Pemerintah Kota Medan terkait dengan kesehatannya itu terkait 6 (enam) klaster yang menjadi indikator utamanya. Ada yang tentang persalinan, gizi, makanan bayi dan balita, puskesmas anak, kesehatan lingkungan dan yang terakhir kawasan tanpa rokok. Sudah ada pembinaan masing-masing program. Jadi sangat mendukung apalagi membantu dalam penanganan anak jalanan. Kalau Dinas Sosial menampung dulu baru diberikan *assasment*. Dinas Kesehatan program atau kegiatan yang diberikan kepada anak-anak jalanan ini bukan merupakan program khusus, tetapi

sudah mencakup seluruhnya untuk kesehatan anak, jadi anak itu dilayani khususnya kalau ada masalah tentang masalah kesehatannya, puskesmas siap untuk membantu apa yang dibutuhkan untuk pelayanan dasarnya. Jadi untuk pelayanan dasar itukan tidak punya identitas, ada kebijakan mungkin setiap puskesemas itu berbeda tergantung situasi dan kondisinya".



Gambar 4.17. Wawancara bersama Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan

"Terkadang ada tergantung dengan obatnya, ketersedian obat, fasilitas lain yang terbatas. Misalnya seperti Kampung Baru, mereka itu kalau ada yang membutuhkan obat mereka langsung tidak usah meminta-minta tanggapan, boleh. Tetapi ada beberapa puskesmas juga mereka menyiapkan nama atau apa dari yang dimana wilayah ditemukan misalnya di Lingkungan A, atau di Kelurahan apa. Itu sebaiknya ada juga yang mendukung, mungkin dari PKPA atau juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang lebih menguatkan. Suatu saat untuk pelayanan tingkat selanjutnya tindakan rujukan itukan harus ada yang menjaminnya. Untuk harus ada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) itu harus ada yang lebih mengetahui dari mana asalnya, dari mana

dia ditemukan, dimana dia diambil, kita harus tau. Jadi biasanya itu peran Kepala Lingkungan (Kepling) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada disitu yang membantu minta bantuan.

"Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam bentuk kordinasi. Misalnya ada kasus-kasus anakanak jalanan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, kita ada jejaring sosial selain kita ada puskesmas juga yang membantu dilapangan kita memberikan edukasi atau penyuluhan-penyuluhan untuk anak-anak jalanan. Kalau untuk program tidak harus dipersiskan kepada anak jalanan, tidak seharusnya anak itu ada dijalan. Seharusnya anak itu ada di keluarga. Jadi anak itu diharapkan agar dia mengikuti apa arahan kita kembali ke keluarganya. Jadi kalau mereka tidak ada keluarganya ya tetap ada panti-panti melalui Dinas Sosial usahakan. Jadi itu mereka terdata, ada mungkin dibantu juga masalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) nya itu disediakan. Kalau untuk Dinas Kesehatan tidak ada kendala mungkin untuk pelayanan dasar harus tetap diberikan, Cuma kordinasinya kalau anak itu butuh untuk tindakan lanjut, misalnya layanan rujukan ke yang lebih tinggi misalnya rumah sakit itukan mereka perlu identitas lokal, perlu ada siap yang menjaminnya. Kalau dari rumah sakitnya harus perlu khusus. Mungkin penyakit-penyakitnya ada yang berat. Mungkin kordinasinya itu lah yang harus ada. Kendala Dinas Kesehatan dengan OPD lain atau dengan instansi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Universitas Misalnya Dinas Kesehatan akan kelapangan apa yang kurang di Dinas Sosial atau Disdukcapil Paling ya mungkin di pergantian Sumber Daya Manusia (SDM). Selain kendala di Sumber Daya Manusia (SDM) kendala di teknis dilapangan mudah mudahan tidak ada. Dinas Kesehatan bagus kok kordinasinya dilapangan paling miss di Sumber Daya Manusia (SDM). Kalau Dinas Kesehatan pasti terlibat itu melalui perda nanti akan perlindungan anak sudah mencakup semuanya sudah terkait kesehatannya juga. Tentang anak yang berkebutuhan khusus, tentang anak jalanan anak yang sehat normal. Dinas terlibat dengan OPD lain dalam membuat Perda. Dinas Kesehatan melakukan seminar, sosialisasi, pelatihan dengan lembaga atau institusi lainnya tentang kondisi usulanusulan kegiatan karena mungkin itu perlu dana, itu harus juga semua usulan itu diterima. Karena kerja sama dengan universitas masalah gizi itu ada. Itu memang perannya tidak terlalu besar untuk anak jalanan perannya bukan tidak besar terhadap anak jalanan, tapi anak jalanannya itu yang sebenarnya tidak boleh ada dijalanan. Jadi edukasi untuk mereka itulah diperkuat baik semua OPD atau lintas LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) jadi itu tidak baik kalau dia dibiarkan dijalanan. "Kalau dia perlu layanan kesehatannya itu kita layani dia perlu di puskesmas, misalnya dia ada luka, mungkin sakit perut itu datang mereka ke puskesmas diberikan obat untuk istirahat. Sebenarnya dalam mengatur kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) nya, Kartu Sehatnya ke Disdukcapil dulu nanti baru ke Dinas Sosial, nanti baru dilaporkan ke Dinas Kesehatan lagi kalau itu kordinasi. Harapan dan saran Dinas Kesehatan terhadap kebijakan Pemerintah tentang anak jalanan atau Kota Layak Anak (KLA) anak-anak kota Medan itu walaupun dari luar dia tidak ada lagi dijalan, kalaupun dia tidak ada lagi keluarga tetap diberikan bimbingan di panti-panti yang khusus menampung anak-anak jadi mereka diberi keterampilan. Mereka diberikan edukasi yang bermanfaat supaya mereka bisa mandiri, supaya mereka tidak berada dijalanan lagi. Jadi tidak ada anak-anak dijalanan mereka juga bisa berkarya. Kalau untuk Dinas Kesehatan sendiri terhadap kebijakan Pemerintah sendiri apa harapan dan saran khususnya utuk membahas anak jalanan. Kalau dinkes mengusulkan untuk saling kerjsama dan kordinasi untuk membimbing anak-anak tau dia masalah kesehatan dia, masalah HIV Aids, kesehatan anak untuk melakukan penyuluhan mereka kan tau ini yang boleh dan ini yang tidak boleh istilahnya ini tidak boleh dibuat, jadi kesehatannya itu mereka paham. Khususnya untuk kesehatan reproduksinya anak-anak. Karena itukan agak rentan. Apalagi kalau ada anak perempuan dijalanan. Itukan dia mengalami menstruasi, mengalami perubahan-perubahan yang kencang dalam tubuhnya itu harus diwaspadai. Dinas Kesehatan memberikan bantuan kepada anak jalanan Kalau sampai saat ini itu kan yang berwewenang sebenarnya secara khusus belum ada. Itu berkordinasi dengan Dinas Sosial. Kalau untuk Dinas Kesehatan Kota Medan bisa diakses atau tidak websitenya. Bisa liat aja di Pemko Medan kalau mau lihat profil."

Rabu, 29 Juni 2022 pada pukul 14.45 WIB – 15.27 WIB peneliti melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Kota Binjai dan mewawancarai Bapak Purnama Sitepu, AKS. Jabatan sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda Panti Asuhan Binjai.

"Menurut Peksos (Pekerja Sosial) atau Dinas Sosial UPT Panti Binjai memandang anak jalanan sebagai masalah sosial, karena keberadaan anak jalanan mengganggu pemandangan. Mengganggu keindahan, keamanan, ketertiban dan rawan terhadap tindak kekerasan. Kalau minta tidak dikasi mobil dicoret, dilempar, mukul. Rentan terhadap tindak kekerasan. Sebagai generasi penerus bangsa harus diberi pembinaan dengan tujuan mereka tidak menciptakan pengangguran ataupun pengemis. Anak jalanan pola penanganannya belum ada yang spesifik. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara memiliki Panti Sosial yang khusus menangani remaja, bukan anak jalanan. Tapi kalau anak jalanna dibawah umur, sebenarnya rata-rata anak putus sekolah. Jadi Dinas Sosial memiliki panti yang bisa menangani anak anak putus sekolah, anak-anak remaja putus sekolah di Tanjung Morawa. Perkembangan anak jalanan yang makin lama makin meningkat. Bukan lagi sekedar mencari uang, tetapi sudah menjadi trend juga sama anak-anak muda. Buktinya manusia silver dulunya cuma ada di Jakarta, sekarang sudah ke Medan, sampai ke Binjai, dan Stabat serta Kecamatan-kecamatan lain pun sudah ada. Anak jalanan belum ada penanganan khusus terhadap anak jalanan ini makanya pembinaannya belum maksimal".

"Rumah Perlindungan Sosial belum berfungsi, tapi harus difungsikan. RPS (Rumah Perlindungan Sosial) itu kan rumah persinggahan jadi memang diawal fungsi mereka itu sebagai persinggahan ataupun tempat pelaksanaan *assessement* terhadap penyandang masalah sosial. Dari RPS (Rumah Perlindungan Sosial) baru diarahkan ke tempat pembinaan. Jadi RPS (Rumah Pelindungan Sosial) ini macam gudang istilahnya kalau ini orang gepeng, dikirim ke panti gepeng. Disabilitas, dikirim ke Panti Disabilitas. Jompo dikirim ke Panti Jompo, begitu sebenarnya maksud RPS itu. Jadi disitu memang lengkap, baik peralatan medis, peralatan untuk kegiatan sementara sebelum penanganan sementara sebelum diarahkan ke panti-panti ada semua peralatanya. Medan lagi merancang

Kota Layak Anak (KLA) menurut UPT Panti Binjai itu bagus. Kerena gimana anak itu harus dilindungi supaya tidak di eksploitasi tidak disalah gunakan, harus dilindungi, dibina supaya mereka kalau sesuai dengan pengertian kesejahteraan sosial itu mampu menangani masalahnya dan terlebih meningkatkan taraf hidupnya setelah dia dewasa. Tetapi harus dipersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia), keuangannya, fasilitas, sarana dan prasarannya semuanya harus dilengkapi. Kalau kebijakan pemerintah tentang anak jalanan Sebenarnya kebijakan belum tersentuh, karena kalau Panti Anak khusus menangani anak-anak yang ada dalam panti".



Gambar 4.18 Wawancara bersama Pekerja Sosial yang Berada di Panti Asuhan Binjai.

"Lembaga atau pihak swasta dapat bantuan tiap tahun tetapi mereka juga tidak menangkapi anak anak, tetapi kan usaha itu belum maksimal. Artinya, tangkap ini anak, ini mau diapakan supaya tidak lagi kembali ke jalanan. Ini kan belum maksimal usahanya ini memang tetap harus ada upaya gimana supaya anak-anak ini tertangani. Kalau disini kalau bisa anak-anak jalanan itu gak usah kemari. Karena pernah beberapa kali ditangap sama Satpol PP, ditangkap bawa kemari. Apalagi kalau anak *punk* itu paling sulit. Anak *punk* itu ya kalau ditangkap, tapi dia berfikir terus. Nanti mulai jam jam 5 (lima) dia udah susun rencana, kalau ini digembok, ini di jebol, pokoknya di harus keluar. Anak *punk* itu gak semuanya orang tuanya gembel, anak pejabat ada itu. Pernah dulu anak pejabat dia, alasan dia kurang kasih sayang, orang tua sibuk dengan urusan masing-masing. Dia malah menganggap dirinya anak pembantu. Tengok anak *punk* ini kalau menurut kacamata kita ini gimana nanti dimasa tuanya? Sedangkan untuk makan sehari-hari aja

kadang susah. Khusus UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Gelandangan, Pengemis ini memberikan pelayanan rehabilitasi. Cuma didalam pelaksanaannya kan ada bersifat mental, mulai dari kegiatan keagamaan, kalau sosial menumbuhkan kesadaran untuk hidup bermasyarakat, hidup mandiri, hidup bertanggung jawab, hidup bekerja sama. Kalau fisiknya dari kegiatan senam. Keterampilannya ada 2 (dua) ada pertanian dana mengelas. Rumah panti itu mereka keluar dalam arti begini ngantar anak sekolah, karena disinikan gak ada sekolah. Jadi ngantar anak sekolah. Kalau mereka mau berkunjung ke orang tua. Tapi kalau sekarang ini mereka memang kegiatannya fokus kelingkungan".

"Kalau dalam penanganan kesehatan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Binjai kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Binjai. Misalnya Puskesmas, setiap hari rabu dokternya masuk didampingi oleh perawat kita, itu untuk kesehatan. Kalau dalam hal perekrutan warga binaan disini kita kerja sama dengan Satpol PP, lalu dengan Dinas Sosial Kota dan Dinas Sosial Kabupaten se-Sumatera Utara. Mulai dari Langkat sampai Padang Sidempuan. Padang Sidempuan juga ada Panti untuk penanganan Gelandangan dan Pemengis di Pinang Sori. UPT (Unit Pelayanan Terpadu) sendiri terlibat atau tidak dalam pembuatan hanya Dinas Sosial saja karena di Dinas Sosial juga sudah ada staf ahlinya. UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Kota Binjai memungkinkan untuk melaksanakan seminar. Pernah dilaksanakan sosilaisasi ke Kabupaten Kota oleh Kepala dan KTU (Kepala Tata Usaha) disini ke Tebing Tinggi, Labuhan Batu, sudah berangkat kesana. Kalau yang namanya kerjaan pasti tidak semuanya mulus, kendalanya dari segi anggaran tetapi tidak memepengaruhi anggaran anak jalanan arena disinikan warga tetap terpenuhi kebutuhan makan. 3 (tiga) hari sekali makan ditambah dengan susu, roti. Daging itu pun 3 (tiga) kali seminggu, ayam sama daging itu gantian, ikan, telur kalau untuk makanan sudah terjamin. Makanya pelatihan keterampilan pertanian ini tidak pernah berhenti dan diarahkan dalam hal pertanian mandiri. Arti kata itu tanam pertama itu dimodali, tanam kedua modal mereka kan udah ada, udah panen kan udah ada modalnya. Ya itu untuk tanam kedua udah modal sendiri. Tapi kalau dalam hal kerjasama dengan OPD-OPD lain kendalanya karena masing-masing OPD punya tupoksi masing-masing sehingga dalam hal waktu terkendala. Contoh gini aja, bukan kendala tapi dalam hal masalah ujung-ujungnya itu orang Satpol PP ngantar hasil razia itu sore. Udah menjelang jam pulang lah. Kalau ada lagi warga hasil razia bisa aja pulangnya itu malam. Kadang kerjasama ini masingmasing menempatkan kepentingannya ini masing-masing. Disitulah kadang jadi kendalanya. Tapi kalau dalam hal kordinasi sifatnya, jarang ada kendala".

"Kalau kebijakan dalam menangani anak jalanan ini di Indonesia taulah kebijakan ini, tumpang tindih dan ada juga faktor politiknya pun ada. Jadi kalau sarannya kan pertama ditingkatkan dalam hal penguatanpenguatan dalam hal sumber daya yang ikut terlibat dalam penanganan anak jalanan. Penguatan-penguatan ini kan bisa melalui pelatihanpelatihan. Pasti personilnya dulu yang dilatih untuk mengetahui pola penanganannya. Baru orang itu kita tangani. Tingkatkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) juga fasilitasnya, sarana prasarananya, anggaran sudah pasti. Jadi mereka dalam hal penanganan disana tapi yang lebih khusus itu orang disabilitas, tapi mereka sampai kepada tempat kerja penanganannya. Pola penanganan yang lama tetap bagus, tapi harus juga direnovasi. Artinya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan masalah. Supaya kalau terjadi bisa diminimalisir dikurangin tapi memang pemerintah masih sebelah mata juga memandang masalah sosial ini. Sehingga belum terjadi ataupun belum maksimal yang namanya menangani satu masalah ini semua stakeholder duduk bersama. Buat satu pola kebijakan kan bisa aja dibuat seperti Nusakambangan, yang kelas berat ini di Nusakambangan ini pun kan bisa tapi ya walaupun dia kita asingkan ditempat lain tapi kan bukan hukuman fisiknya yang diperkuat. tetapi pembinaan mentalnya dan pemberian keterampilan sesuai bakat dan minatnya. Pokoknya 3 (tiga) tahun dia disana keluar kan udah dapat kerja. Udah gitu lapangan kerja juga harus lebih banyak lagi. Dan memang perusahaan-perusahaan pun harus bekerjasama haru disosialisasikan supaya kan ada lisensi kita ini sudah dibina, ini sudah mengerti ini dipermudah".

4.2. Proses perkembangan anak jalanan street on the child dan street of the street menjadi manusia silver, badut, pengemis, (pengamen, pedagang, pembersih mobil dll) yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan

Kota Medan adalah Kota terbesar ke 3 di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kota Surabaya, kota-kota besar selalu menjadi magnet bagi daerah lainnya untuk mencoba peruntungan, mengubah nasib, mencari pekerjaan, pendidikan, dan segala kehidupan baik dibidang sosial, ekonomi, politik yang tidak di dapatkan pada daerah-daerah lainnya. Kabupaten atau Kota satelit di Provinsi Sumatera Utara seperti

Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan daerah lainnya menjadi kabupaten/kota yang menyumbang anak jalanan di Kota Medan.

Pembangunan Kota Medan yang *massif* menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kabupaten/Kota lainnya di luar Kota Medan, Kota edan diibaratkan taman bunga yang sedang mekar maka banyak kumbang-kumbang yang datang mencari peruntungan disana. Secara tidak langsung terjadi kontestasi bagi masyarakat Kota Medan dan masyarakat lainnya yang ada di Kabupaten/Kota untuk bertahan hidup di Kota Medan. "Kontestasi" tersebut tentunya menghasilkan pemenang dan ada yang kalah. Bagi yang kalah, hal ini tentunya menyisakan 'residu' bagi perkembangan dan kemajuan Kota Medan. "Residu" tersebut menjadi permasalah yang harus diselesaikan Negara Republik Indonesia yang menganut paham "welfare state".

Pendapat yang mengatakan bahwasanya Kota Medan memiliki daya tarik yang tinggi bagi anak jalanan dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara (Simon, 2017) menyatakan bahwa

"Data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2014 terlihat bahwa, jumlah anak jalanan yang berada di Kota Medan menduduki jumlah yang tertinggi yaitu, mencapai 1.526 jiwa (50.26%) dari seluruh anak jalanan yang berada di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena Kota Medan merupakan ibu kota propinsi yang memiliki daya tarik yang lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Alasan lain menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki perkembangan kota yang lebih cepat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang berada di Propinsi Sumatera Utara". (Simon, 2017)

Perkembangan kota di segala bidang tidak hanya memberikan nuansa positif bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan kota melahirkan persaingan hidup sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat makin banyaknya anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat dan hidup merdeka. Banyak kasus yang menunjukkan meningkatnya penganiayaan terhadap anak-anak, mulai tekanan batin, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual, baik oleh keluarga sendiri, teman, maupun orang lain. (Simon 2017)

Kemiskinan perkotaan yang melanda kota-kota besar di Indonesia disebabkan oleh gejolak ekonomi yang semakin menyengsarakan masyarakat telah menimbulkan masalah-masalah baru yang cukup kompleks. Kemiskinan kerap kali menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Mulai dari kesadaran masyarakat hingga kemampuan pemerintah dalam menganalisis masalah dan merencanakan program yang menjanjikan. Faktanya program itu hanya bersifat aturan yang tertulis diatas kertas sedangkan keluh kesah warga keras terdengar di telinga. Fenomena keberadaan anak jalanan yanghingga kini masih menuai masalah tanpa ada solusi yang tepat untuk mengatasinya merupakan salah satu akibat dari kemiskinan. Keberadaan anak yang hidup di jalan saat ini mudah kita temui di sudut-sudut kota besar terutama Kota Medan. Mata kita sudah tidak asing lagi melihat anak-anak yang mengerumuni mobil-mobil dipersimpangan lampu merah. Mereka mendatangi warung-warung

pinggir jalan menawarkan jasa atau sekedar meminta sumbangan. Aktivitasnya dimulai dengan mengamen atau bermain musik, menjual koran, menyemir sepatu hingga meminta sumbangan dengan kotak amal. (Simon 2017)

Baik anak *jalanan street on the child dan street of the street* masih menjadi fenomena yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari semua pihak, Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan. Anak jalanan tersebut baik *child on the street* maupun *child of the street* mengalami perubahan perkembangan trend pekerjaan saat ini.

Dari hasil observasi penelitian diketahui bahwa jarang ditemui lagi anak jalanan yang bekerja sebagai pembersih angkot di terminal, penjual rokok di perempatan lampu merah di jalanan Kota Medan. Pekerjaan anak jalanan tersebut beruah menjadi manusia silver, anak badut, pengemis, (pengamen, pedagang, pembersih mobil). Perkembangan ini adalah perkembangan dari jenis pekerjaan saja dikarenakan perkembangan zaman untuk memperoleh uang yang lebih atraktif dari masyarakat yang kasihan terhadap anak-anak jalanan yang bekerja di jalanan baik *child on the street maupun child of the street*.

4.2.1. Manusia Silver

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak jalanan menjadi manusia silver adalah anak jalanan yang merupakan pendatang dari Kabupaten Karo tepatnya dari Kabanjahe. Mereka putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama dan orang tuanya tidak mengetahui pekerjaan mereka di Kota Medan. Sebelum menjadi manusia Silver mereka menjadi pengamen, untuk memenuhi kebutuhan hidup di Kota Medan,

namun karena tidak mendapatkan hasil yang baik dan kerap kali sering diusir pemilik rumah makan maka mereka mengganti pekerjaan menjadi manusia silver (mengamen dan atau atraksi layaknya seniman yang mengecat seluruh tubuhnya dengan warna silver).

Mereka adalah anak jalanan yang bukan berasal dari Kota Medan, pekerjaan menjadi manusia silver diawali karena kurang maksimalnya bekerja dijalanan menjadi pengamen. Ide untuk menjadi manusia silver karena melihat aksi seniman menjadi patung di internet (Youtube) sehingga mereka mengecat seluruh tubuhnya dengan cat minyak bewarna silver dan berakting seperti seniman yang menjadi patug sambil menadahkan bungkus plastik minuman bekas atau permen sebagai tempat meminta uang kepada pengguna jalan di persimpangan atau perempatan jalanan di Kota Medan.

4.2.2. Anak Badut

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anak badut adalah anak yang masih bersekolah, sepulang sekolah mereka bekerja menjadi anak badut di persimpangan jalan perempatan lampu merah di Kota Medan, sudah beberapa kali ketangkap razia satpol PP dan Dinas Sosial Kota Medan kemudian setelah di data dikembalikan kekeluarga di Medan. Mereka bekerja menjadi badut untuk membantu orang tua mencari nafkah dikarenakan kondisi Covid 19 sekolah diliburkan mereka lebih banyak bekerja menjadi anak badut di Jalanan Kota Medan. Selain itu diketahui juga bahwasanya ada "anak kotak" adalah anak-anak yang meminta sumbangan dengan membawa kotak mengatasnamakan suatu organisasi atau panti asuhan tertentu. Anak kotak ini juga tidak bersekolah kalaupun ada yang bersekolah

dikarenakan Covid 19 belajar sejara daring (dalam jaringan) sehingga lebih banyak menghabiskan waktu mengemis menjadi "anak kotak" di tempat keramaian ataupun persimpangan/perempatan lampu merah di jalanan Kota Medan.

4.2.3. Anak Penjual Jipang

Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penjual Jipang adalah anak yang masih bersekolah di tingkat Sekolah Dasar, setelah pulang sekolah anak tersebut dengan alasan membantu orang tua menjual dagangan jipang di perempatan lampu merah yang telah ditentukan oleh orang tuanya. Berdasarkan keterangan dari informan bahwasanya orangtuanya setiap hari dari rumahnya di Jalan Bromo mengantar ia bersama kakaknya, setelah selesai berjualan ia dan kakaknya di jemput kembali oleh orangtuanya

4.2.4. Anak Jalanan Baru semenjak Covid 19

Selama lebih kurang 3 tahun terakhir tepatnya pada awal Februari tahun 2019 Dunia dihebohkan dengan *Corona Virus Deseases* (Covid 19) yang telah memporak-porandakan segala lini kehidupan manusia di dunia ini. Di Indonesia dan di Kota Medan tentunya merasakan dampak negatif dari tingginya angka kematian dan penyintas Covid 19. Hal ini semakin memperparah khidupan masyarkat khususnya masyarakat miskin.

Bertambahnya anak jalanan baik itu *chlid on the street* dan *child of the street* menjadi fenomena yang semakin sering kita lihat di Kota Medan, aktivitas berjualan, bekerja dan bermain dilakukan dijalanan baik itu atas inisiatif mereka sendiri untuk

membantu perekonomian keluarga ataupun karena dukungan atau paksaan dari pihak lain yang membuat mereka beraktivitas dijalanan.

Berdasarkan banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Medan, menurut data yang diperoleh dari Yayasan Pusaka Indonesia, menaksir jumlah anak jalanan di Sumatera Utara mencapai 4.500 anak dan 1.500 anak diantaranya berada di Kota Medan. Perserikatan Perlindungan Anak (PPAI) Sumatera Utara menghimpun angka yang lebih banyak, yaitu 5000 anak jalanan berada di Seluruh Sumatera Utara dan 1.800 dari jumlah tersebut tiggal di Kota Medan. Menurut Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) ada sekitar 1.150 anak jalanan di seluruh Sumatera Utara pada tahun 2014. (Simon, 2017)

Data di atas merupakan data sebelum terjadi Covid 19, jika kondisi saat ini tentunya data tersebut berubah jauh lebih banyak dikarenakan faktor dominan anak menjadi anak jalanan adalah faktor ekonomi, hal tersebut dikarenakan Covid 19 yang tidak hanya menghancurkan kesehatan masyarakat tetapi juga hancurnya ekonomi masyarakat dengan banyaknya Putuh Hubungan Kerja (PHK) kemudian ditambah lagi dengan pembatasan pergeran manusia atau (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan demikian saat ini fenomena anak jalanan yang semakin banyak di Kota Medan membutuhkan perhatian khusus tidak hanya dari Pemerintah Kota Medan tetapi oleh seluruh masyarakat Kota Medan untuk mengembalikan hak-hak anak jalanan yaitu bermain dan belajar.

Sebahagian besar dari informan (anak penjual jipang dan anak badut) masih berstatus sebagai siswa Sekolah Dasar (SD) dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kota Medan, namun kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kota Medan untuk menyelenggaran pendidikan secara daring (dalam jaringan) membuat mereka semakin banyak berada dijalanan. Terlepas dari persoalan apakah anak jalanan tersebut mengikuti perkuliahan secara daring atau tidak memiliki sarana internet dan *smart phone* untuk mengikuti pembelajaran daring (dalam jaringan). Keberadaan mereka dijalanan beraktivitas bermain, berjualan, dan lainnya menggambarkan kondisi bahwasanya banyak dari anak jalanan tersebut berada dijalanan dikarenakan faktor ekonomi.

Hak anak yang seharusnya belajar dan bermain tidak mereka dapatkan seperti anak-anak lainnya yang tercukupi kebutuhan secara ekonomi dan kasih sayang keluarga.

Fenomena merebaknya anak jalanan merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka seringkali menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar karena mereka adalah saudara kita, mereka juga adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. (Simon, 2017)

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Simon (2017) yang menyatakan bahwa anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan menganggap bahwa mereka lebih baik bekerja dan mencari uang untuk jajan daripada pergi ke sekolah karena malas berfikir. Mereka bisa mendapatkan kurang lebih Rp.20.000

sampai Rp.100.000 per hari dari bekerja di jalanan. Mereka merasa betah berada di jalanan sehingga Anak-anak jalanan menjadi malas jika diajak kehabitat normal umumnya seperti anak seusia mereka.. (Simon, 2017)

4.3. Upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengantisipasi, penanganan dan memfasilitasi masalah Anak Jalanan yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan.

Anak jalanan menjadi salah satu "residu" dari pembangunan Kota-Kota Besar lainnya di Indonesia. Kajian mengenai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan sudah lama dilakukan, sudah banyak program yang diberikan negara melalui Kementerian Sosial, melalui program-program yang telah dilaksanakan dengan kordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota. Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dalam hal ini telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana menangani keberadaan anak jalanan.

Kota Medan Mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis Di Kota Medan, tepatnya pada keramaian (mall), persimpangan jalan, rumah ibadah, gedung perkantoran dan tempat-tempat vital lainnya. Sebagai upaya menindak lanjuti penanggulanan anak jalanan tersebut maka Dinas Sosial Kota Medan dengan Unit Reaksi Cepat (URC) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan kepolisian Kota Medan untuk

melakukan razia gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan selanjutnya di data assesment dan di proses di Dinas Sosial Kota Medan.

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang akan diberfungsikan Dinas Sosial Kota Medan sebagai penampung sementara bagi seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hasil razia Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan merupakan panti penampungan sementara yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas lengkap layaknya panti sementara yang menampung berbagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan.

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) tersebut kika nanti berfungsi akan menggunakan sistem pelayanan panti. Seperti yang telah dibahas sebelumnya sistem pelayanan panti tersebut tidak dapat bekerja maksimal khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak jalanan di Kota Medan. Karena tetap menggunakan sistem panti (dengan fasilitas yang lebih lengkap) dan menampung seluruh PPKS hasil razia di Kota Medan tidak menyelesaikan akar permasalahan anak jalanan.

Pendekatan Asset Base Community ditingkat lingkungan dengan mengoptimalkan peran Organiassi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada pemberdayaan anak dapat ditawarkan sebagai pengganti Rumah Perlindungan Sosial (RPS) menggunakan sistem pelayanan panti

,

4.3.1. Penertiban Anak Jalanan di Kota Medan wujud dari Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2003.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah penertiban diawali dengan kata tertib yang berarti aturan dan penertiban adalah proses, cara atau perbuatan menertibkan dan tindakan (Poerwadarminta, 2003). Menurut Abdillah serta Prasetyo (2009), penertiban berasal dari kata "tertib" yang bagi Pius Abdillah serta Danu Prasetya penertiban berarti tertata serta terlaksana dengan apik serta tertib bagi ketentuan. Penertiban ialah sesuatu aksi penyusunan yang dibutuhkan dalam sesuatu negeri ataupun wilayah. Penertiban dilakukan dalam rangka mewujudkan keadaan negeri ataupun wilayah yang nyaman, tentram serta tertib dalam peneyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, serta aktivitas warga yang kondusif.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik. Pernertiban dan kekacauan merupakan bagian dari asas proses sosial yang mempunyai hubungan tidak berlawanan, tetapi sama-sama ada di dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya. (Rahardjo, 2006). Melihat dari segi pemanfaatan ruang Retno Widjajanti mengatakan penertiban merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Dalam pendapatnya Retno mengatakan kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung atau tidak langsung. Penertiban langsung dilaksanakan dengan mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk saksi disinsentif, antara lain melalui penerapan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. (Widjajanti, 2000)

Berdasarkan dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa penertiban merupakan kegiatan, usaha atau cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah kondisi sosial yang sesuai dengan kondisi yang seharusnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Lamo Tobing, salah satu staff di Dinas Sosial Kota Medan, penertiban anak jalanan secara umum dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menciptakan ketertiban serta ketentraman bagi masyarakat. Di samping itu, penertiban bertujuan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati, menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat, menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai, mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng), Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran adalah suatu kegiatan yang sering disebut dengan istilah razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan maksud untuk menjaring dan menertibkan anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang meresahkan bahkan

mengganggu kehidupan masyarakat maupun pengguna jalan di Kota Medan, pusat perbelanjaan, taman kota, perumahan, rumah ibadah, dan tempat ramai lainnya. Dalam melaksanakan operasi penertiban atau razia terhadap anak jalanan, Dinas Sosial Kota Medan tidak hanya sendiri. Dinas Sosial Kota Medan bersama-sama dengan Polresta Medan, Satpol PP Kota Medan, Dinas Sosial Provinsi, serta tenaga lapangan Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Medan melakukan operasi penertiban atau razia.

Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi dari anak-anak jalanan yang terjaring razia. Pada tahap ini, staff Dinas Sosial akan meminta dan mengumpulkan informasi serta keterangan anak jalanan seputar nama, alamat tempat tinggal, status pendidikan, keberadaan orang tua, pekerjaan orang tua, nomor telepon orang tua dan lain sebagainya.

Setelah pihak Dinas Sosial melakukan pendataan tersebut, anak jalanan juga dimintai keterangan untuk mengungkap penyebab anak tersebut turun ke jalanan. Di samping itu, Dinas Sosial menghubungi keluarga dari anak jalanan tersebut dan meminta orang tua atau keluarga anak jalanan untuk datang dan menjemput anak yang terjaring razia. Adapun terdapat orang tua yang tidak memiliki alat komunikasi serta berdomisili di kota Medan, pihak Dinas Sosial akan menghubungi orang tua dari anak jalanan melalui Kepala Lingkungan maupun pihak Kelurahan tempat tinggal anak jalanan.

Pada tahap ini, pemberian tindakan lanjutan dari Dinas Sosial terhadap anak jalanan yang terjaring operasi penertiban dikelompokkan berdasarkan keberadaan orang tuanya, yaitu:

1. terhadap anak jalanan yang memiliki orang tua

Orang tua dan/atau keluarga dari anak jalanan akan di verifikasi terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa pihak yang hadir merupakan orang tua asli dari anak jalanan. Verifikasi tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan data anak jalanan dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang dibawa oleh orang tua dan/atau keluarga dari anak tersebut. Jika data sesuai, Dinas Sosial akan meminta pihak orang tua dan/atau keluarga dari anak jalanan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang mengandung substansi bahwa anak tidak akan mengulangi kesalahannya menjadi anak jalanan lagi. Orang tua dan/atau keluarga diperbolehkan untuk membawa anaknya pulang setelah seluruh rangkaian proses administrasi di Dinas Sosial Kota Medan terselesaikan.

2. terhadap anak jalanan yang tidak memiliki orang tua

berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kota Medan, anak jalanan yang tidak memiliki orang tua anak dirujuk ke Panti Gepeng di daerah Binjai. Anak tersebut dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan akan di proses lebih lanjut oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Dinas Sosial Kota Medan sendiri tidak memiliki rumah singgah, melainkan Shelter. Shelter tersebut hanya dapat memfasilitasi orang-orang terlantar seperti lansia selama hanya 3 hari saja. Untuk anak jalanan hasil operasi penertiban atau razia yang dalam hal ini tidak memiliki orang tua tidak dibawa ke shelter.

Bapak Lamo Mayjen Tobing adalah seorang pegawai di Dinas Sosial Kota Medan yang menjabat sebagai Staff Pelaksana Koordinator Unit Reaksi Cepat. Beliau merupakan petugas yang terjun ke lapangan dalam menangulangi permasalahan anak jalanan, mulai dari operasi penertiban di lapangan, pendataan sampai rehabilitasi maupun pemulangan kepada pihak keluarga.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Lamo, penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan memang belum menerapkan upaya pencegahan. Beliau menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Medan lebih kepada menekan jumlah anak jalanan melalui kegiatan operasi penertiban atau razia.

Berikut hasil wawancara yang peneliti cantumkan dalam penulisan.

"ya, kalau untuk upaya pencegahan sendiri kami tidak pernah membuatnya, baik itu seperti sosialisasi atau yang lain. Tapi kami pernah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk membuat pamflet tentang penanganan anak jalanan dan berbagai PMKS. Selain itu, kami dalam melakukan pembinaan anak jalanan lebih ke menekan jumlah anak jalanan dengan kegiatan operasi penertiban."

Peneliti bertanya kepada informan kunci "Sejauh ini hal-hal apa saja yang menjadi kesulitan dalam penertiban anak jalanan pak?"

Berikut hasil wawancara yang peneliti cantumkan dalam penulisan.

"Saat berada di lapangan untuk melakukan penertiban atau razia, anak jalanan sering kali kabur sehingga sangat menyulitkan kami. Ada juga anak yang sudah tertangkap menangis, bertahan dan berontak agar tidak di bawa ke Dinas Sosial. Hal-hal itulah yang mempersulit kerja kami untuk menekan jumlah anak jalanan yang berada di Kecamatan Medan Sunggal."

Secara umum bapak Lamo menjelaskan bahwa jumlah anak jalanan yang berada di Kota Medan mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan.

Berikut hasil wawancara yang peneliti cantumkan dalam penulisan.

"Hal itu dikarenakan lapangan pekerjaan yang sedikit dan rendahnya skill yang mereka miliki. Dins os disini sudah semaksimal mungkin melakukan upaya penanggulangan, tapi mau bagaimana lagi, ada banyak hal yang membuat anak jalanan dan pengemis di jalanan semakin banyak. Mereka juga malas bekerja, karena mengemis ini kan mudah, hanya minta-minta dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Sehingga mereka juga nyaman dan semakin malas untuk mencari pekerjaan lain. Tapi tahun 2020 total jumlah anak jalanan di Kota Medan berjumlah 525 anak. Hal itu terjadi karena berbagai pelaksanaan upaya penanggulangan yang kami sudah lakukan."

Lebih lanjut bapak Lamo menjelaskan bahwa anak jalanan yang berada di Kota Medan banyak yang berasal dari luar kota. Namun dalam hal ini Dinas Sosial Kota Medan menerapkan penertiban yang sama dalam menanggulangi anak jalanan yang berasal dari luar Kota Medan.

Berikut hasil wawancara yang peneliti cantumkan dalam penulisan.

"Kalau anak jalanan di Kota Medan ini kan kebanyakan mereka berasal dari luar Kota Medan seperti dari padang sidempuan, nias, balige, tongging dll. Tentu hal ini tidak mengagetkan, karena Kota Medan kan Ibukota Sumatera Utara, jadi wajar saja kalau mereka ke sini. Jadi dalam menangani gepeng dari luar kota, kami tetap melaksanakan upaya kami, mulai dari operasi, pendataan sampai rehabilitasi."

Bapak Lamo juga mengatakan dalam pembinaan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Medan memiliki upaya yang dilakukan yaitu pengawasan dan penertiban atau yang biasa disebut dengan razia, pendataan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan setelah itu diberikan tindakan lebih lanjut. Dalam melaksanakan upaya tersebut, pihak Dinas Sosial Kota Medan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait.

Berikut hasil wawancara yang peneliti cantumkan dalam tulisan:

"jadi kami dalam penertiban anak jalanan ini punya upaya-upaya yaitu pengawasan dan penertiban atau yang biasa disebut dengan razia, pendataan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan setelah itu dilakukanlah pengarahan. Kami dalam menjalankan upaya itu bekerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti Satpol PP Kota Medan, kepolisian, masyarakat sekitarnya dan terkadang melibatkan Dinas Sosial Provinsi."

Pelaksanaan operasi atau penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan memiliki bentuk berupa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dengan cara berkeliling kota dengan menggunakan mobil Dinas Sosial Kota Medan. Dalam hal ini Bapak Lamo Tobing menjelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian ini bukan hanya sekedar patroli keliling, melainkan juga melakukan penertiban jika anak jalanan atau gelandangan masih tetap saja melakukan kegiatannya di jalan.

Berikut hasil wawancara yang peneliti cantumkan dalam penulisan.

"Untuk pengawasan sendiri, sih bukan hanya sekedar bersifat mengawasi mereka saja, kan tadi ada namanya pengendalian. Jadi ketika anggotaku turun kelapangan keliling menggunakan mobil patroli Dinas Sosial, mereka (anak jalananan, PMKS) yang sudah melihat kami dari kejauhan akan kabur dan ada juga yang langsung dimasukkan ke atas mobil patroli."

Peneliti bertanya setelah melakukan penangkapan kemudian apa yang dilakukan

"Setelah ditangkap kemudian mereka itu dibawa dan dilakukan pembinaan agar mereka tidak mengulangi lagi hidup dijalanan, kemudian ada yang disuruh nginep kalau asalnya itu jauh, ada juga yang disuruh pulang atau di jemput orang tuanya."

Operasi penertiban dilakukan oleh tim URC (Unit Reaksi Cepat) Dinas Sosial Kota Medan. Bapak Lamo Tobing menjelaskan kalau URC ini adalah tim yang beranggotakan 19 orang dan mereka adalah orang-orang yang turun ke lapangan dalam melakukan operasi penertiban razia. Tim ini merupakan pegawai yang direkrut oleh Pemerintah Kota Medan untuk ditempatkan di Dinas Sosial Kota Medan.

Peneliti lanjut bertanya bagaimana peran tim URC dalam melakukan penertiban anak jalanan tersebut?

"Sekarang Dinas Sosial punya URC (Unit Reaksi Cepat). URC inilah sebagai tangan kanan pak Kepala Dinas untuk di lapangan. URC inilah

yang mentertibkan anak jalanan, ada anak-anak, orang dewasa, anak-anak yang berjualan kaki lima. ", tegas Pak Lamo Tobing.

Peneliti bertanya apakah setelah melaksanakan penertiban ini jumlah anak jalanan semakin berkurang ?

"Jelas semakin berkurang lah dek, bahkan program ini kita buat bukan hanya untuk mengurangi anak jalanan, tetapi mencegah agar tidak boleh berjualan kaki lima atau mengemis juga, itulah tugas kita dek".

Peneliti lanjut bertanya apakah ketika diserahkan ke panti rehabilitas, Dinas Sosial mengadakan evaluasi ke panti untuk monitoring?

"Tidak ada, itu sudah menjadi wewenang mereka. Kita hanya merujuk saja, setelah di antar itu sudah wewenang Dinas Sosial di Provinsi". jawabnya.

Peneliti selanjutnya bertanya bagaimana cara pak Lamo untuk melibatkan masyarakat dalam hal meminimalisir anak jalanan di medan sunggal tersebut?

"Di sini kita sudah menyediakan nomor hp yang bisa dihubungi jika masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan anak jalanan, jadi semua bisa melapor. Kalau disini atau daerah ini ada anak jalanan atau pengemis, URC akan segera meluncur setelah memperoleh informasi langsung dari masyarakat.", sahut Pak Lamo Tobing.

Selain itu Pak Lamo juga menghimbau agar masyarakat tidak memberikan uang kepada anak-anak jalanan yang suka meminta-minta di lampu merah.

"Jangan diladeni anak-anak peminta-minta dilampu merah yang mengakibatkan membuat tumbuh berkembangnya terganggu dan menjadi kebiasaan", saran beliau.

4.3.2. Unit Reaksi Cepat (URC) dalam penanganan anak jalanan di Kota Medan

Sejak tahun 2016, Dinas Sosial Kota Medan membentuk tim URC (Unit Reaksi Cepat) sebagai tangan kanan Dinas Sosial ketika mengadakan program pengawasan dan penertiban di lapangan. Anggota URC ini direkrut dari Pemerintah Kota Medan dan ditempatkan di Dinas Sosial Kota Medan sebagai tenaga kerja honorer. URC ini merupakan tanggung jawab dari bidang pelayanan sosial Dinas Sosial dan dikoordinir

langsung oleh Pak Lamo Tobing.

Pengawasan dan penertiban ini ditujukan salah satunya kepada anak jalanan baik yang masih anak-anak maupun orang dewasa selain gepeng maupun kelompok anak *punk*. Program penertiban ini dibantu oleh Kepolisian, aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Saat ini pihak yang paling aktif rutin ke jalanan melaksanakan program penertiban adalah tim URC.

Program penertiban semakin dipermudah dengan adanya bantuan laporan dari masyarakat yang menghubungi pihak Dinas Sosial ketika melihat dan mengetahui keberadaan anak jalanan di lingkungannya. Masyarakat dapat menghubungi melalui kontak telepon yang sudah dikhususkan untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan anak jalanan kepada Dinas Sosial bidang pelayanan sosial. URC akan segera bertindak segera ketika terdapat laporan dari masyarakat tersebut.

Unit Reaksi Cepat (URC) ini merupakan tenaga honor yang direkrut oleh Pemerintah Kota yang ditempatkan di Dinas Sosial Kota Medan. Setelah terjaring razia, anak jalanan akan di bawa ke Dinas Sosial untuk melanjutkan tahapan

Menurut hemat peneliti, jika penanganan seperti ini yang masih dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan, maka tidak akan menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Medan. Mereka akan datang dan datang lagi baik dari Kota Medan ataupun dari luar Kota Medan. Karena fator ekonomi menjadi faktor dominan anak menjadi anak jalanan. Dan penanganan menggunakan sistem panti seperti yang selama ini dilakukan juga bukan solusi untuk mengembalikan hak-hak anak jalanan layaknya anak normal lainnya yaitu belajar dan bermain serta mendapatkan pengasuha dari keluarga (jika masih ada). Maka pendekata Asset Base Community

yang merupakan modal sosial dalam upaya mengembalikan hak-hak anak jalanan tersebut dapat menjadi pilihan atau solusi bagi pencegahan, penagananan dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan

4.4. Sistem Panti dan Non Panti dalam memberikan pelayanan kesejahteraan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan di Kota Medan.

Departemen sosial sudah melaksanakan beberapa program penanganan anak jalanan yang bekerja sama dengan lembaga internasional antara lain United Nation Devel opment Program (UNDP) dalam uji coba 10 rumah singgah di 7 propinsi di Indonesia; Asian Development Program (ADB) dalam progran Social Protection Sector Development Program (SPSDP) dan Health and Nutrition Sector Development Program (HANSDP). Program tersebut diberikan kepada anak jalanan dalam bentuk pendampingan, pelatihan ketrampilan, pemberian makanan tambahan dan pemberian beasiswa bagi anak yang sekolah melalui model rumah singgah. (Setiawan, 2007)

Ada 3 model penanganan anak jalanan antara lain : penanganan berbasis jalanan (*street based*), penanganan anak jalanan terpusat (*center based*), dan penanganan anak jalanan berbasis komunitas (*community based*). Dalam prakteknya lebih banyak diterapkan model *street based* dan *center based*, padahal model community based tidak kalah pentingnya dibandingkan pendekatan yang lainnya karena masing-masing pendekatan mempunyai kelemahan dan kelebihan. (Setiawan, 2007)

Penanganan anak jalanan sampai saat ini cenderung lebih dititik beratkan pada upaya pemberdayaan langsung kepada anak. Keberadaan keluarga atau orang tua anak jalanan yang cenderung sebagai penyebab anak turun ke jalanan belum tersentuh pelayanan secara optimal. Padahal dilihat dari perkembangannya, penyebab banyaknya anak jalanan dikota-kota besar bersumber dari keluarga yang mengalami kemiskinan maupun keretakan hubungan orang tua. Bila dilihat lebih jauh lagi ada dua faktor utama yaitu: pertama, ketidak siapan orang tua melakukan pernikahan baik fisik maupun mental. Kedua, faktor eksternal yang disebabkan karena faktor ekonomi seperti terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya pemutusan kerja secara masal. Anak yang berada dalam kondisi keluarga seperti itu mempunyai resiko sangat tinggi (children at high risk). (Setiawan, 2007)

Menurut Departemen Sosial RI (1995), ada 3 model penanganan anak jalanan yaitu *street based, center based dan community based*. Masing-masing model ini memiliki kelemahan dan kelebihan tertentu.

Community based adalah model penanganan yang berpusat di masyarakat dengan menitik beratkan pada fungsi-fungsi keluarga dan potensi seluruh masyarakat. Tujuan akhir adalah anak tidak menjadi anak jalanan dan mereka tetap berada di lingkungan keluarga. Kegiatannya biasanya meliputi peningkatan pendapatan keluarga, penyuluhan dan bimbingan pengasuhan anak, kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan dan kegiatan waktu luang dan lain sebagainya. Street based adalah kegiatan di jalan, tempat dimana anak-anak jalanan beroperasi. Pesan sosial menciptakan perkawanan, mendampingi dan menjadi sahabat untuk keluh kesah mereka. Anak-anak yang sudah tidak teratur berhubungan dengan keluarga,

memperoleh kakak atau orang tua pengganti dengan adanya pekerja sosial. Center based yaitu kegiatan di panti, untuk anak-anak yang sudah putus dengan keluarga. Panti menjadi lembaga pengganti keluarga untuk anak dan memenuhi kebutuhan anak seperti kesehatan, pendidikan, ketrampilan waktu luang, makan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain sebagainya. *Open house* (Rumah terbuka/Rumah singgah) di berbagai negara untuk melengkapi pendekatan yang sudah ada, termasuk di Indonesia. Keunikannya adalah mampu digunakan untuk memperkuat ketiga pendekatan diatas.

Tabel 4.1. Tipologi Anak Jalanan

Kategori Anak	Model Intervensi	Fungsi Intervensi
Anak yang mempunyai	Community based	Preventif
resiko tinggi menjadi anak		
jalanan. (Children at high		
risk)		
Anak yang bekerja	Street based	Street education
dijalanan (Children in the		
street)		
Anak yang hidup di jalan	Center based	Rehabilitatif Corectional
(Children of the street)		

Sumber: (Lusk, 1989 dalam Setiawan, 2007)

Model Penanganan Anak Jalanan Berbasis Masyarakat (*Community based*) adalah salah satu model penanganan anak jalanan yang menerapkan strategi pengembalian anak kepada keluarganya dan mencegah anak-anak menjadi anak jalanan. Anak yang menjadi sasaran adalah anak yang masih berhubungan atau tinggal dengan keluarga. Basis penanganan diarahkan pada penguatan fungsi

keluarga, peningkatan pendapatan, dan pendayagunaan potensi masyarakat. Anakanak memperoleh pendidikan formal maupun non formal, memenuhi kebutuhan dasar, pengisian waktu luang dan lain-lain. Tujuan model ini adalah meningkatkan kemampuan keluarga dan anggota masyarakat dalam melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anak. (Setiawan, 2007)

Childhope Asia (1990, 2) mengemukakan pengertian model community based sebagai pendekatan pencegahan. Pendekatan ini merupakan suatu alternatif untuk melembagakan anak jalanan. Hal itu merupakan suatu usaha yang menunjukkan bahwa permasalahan anak dimulai dari keluarga dan masyarakat. Proses pendekatan berbasis masyarakat adalah ditujukan pada keluarga anak jalanan, anak miskin perkotaan dan masyarakat untuk meyakinkan mereka membuat perubahan terhadap diri mereka sendiri agar tidak memanfaatkan anak mereka untuk mencari nafkah di jalan. Komponenkomponen pendekatan berbasis masyarakat antara lain : advokasi, pengorganisasian masyarakat, peningkatan pendapatan, bantuan pendidikan yang meliputi : klarifikasi nilai dan pelatihan ketrampilan. (Setiawan, 2007)

4.5. Model Pencegahan, Penanganan dan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Khususnya Anak Jalanan di Kota Medan.

Model Aset Evaluasi Perda Kota Medan No. 6 Tahun Kordinasi dan Base 2003 dan merevisi atau membuat kebijakan Kerjasama antar **Community** Pemerintah Kota Baru Tentang Pencegahan, Penanganan dan Medan dengan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Kab/Kota di Propinsi Pencegahan, Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan Sumatera Utara untuk Penanganan dalam Pencegahan, dan Penanganan dan Modal Manusia. Modal Sosial. **Fasilitasi** Fasilitasi Pemerlu Modal Fisik, Modal Keuangan, Pemerlu Pelayanan Moda Lingkungan. Pelavanan Kesejahteraan Sosial Kesejahtera (PPKS) khususnya an Sosial Anak Jalanan (PPKS) Khususnya **Model Pelayanan** Kerjasama NGO (Panti Asuhan) **Model Pelayanan** Anak PPKS khususnya dengan OPD terkait antara lain: **PPKS** Jalanan di Anak Jalanan 1. Satuan Polisi Pamong Praja khususnya anak Kota Medan (New Style) Kota Medan jalanan 1. Community 2. Dinas Sosial Kota Medan (Old Style/Lama) **Based Social** 3. Dinas Tenaga Kerja Kota 1. Sistem Panti Service Medan. 2. Sistem Non 2. Street Based 4. Dinas Pendidikan Kota Medan Panti **Social Service** 5. Dinas Kesehatan Kota Medan (Rumah 3. Centre Based 6. Dinas Kependudukan dan Perlindungan **Social Service** Catatan Sipil. Sosial) Community Based Social Services Street Based Social Services Centre Based Social Services Pencegahan Penanganan **Fasilitasi** Gunakan Tim Reaksi Cepat Panti Anak yang ada, LSM OPD terkair (Prorgam Kerja, (TCR) Dinas Sosial Kota konsen dibidang anak, dan Pelatihan Keterampilan, Medan, Pekerja Sosial OPD terkait Wirausaha, Penempatan Satpol PP bersama Kota Kerja/Modal Usaha) Medan Monitoring dan Evaluasi Pogram 1 Pogram 1 Pogram 1

Asset Base Community ini sebagai tawaran model pencegahan, penanganan, dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan. Pemanfaatan modal-modal kapital yang dimiliki masyarakat ditiap lingkungan di Kelurahan Kota medan dapat dijadikan aset komunitas dalam pencegahan, penganganan dan fasilitasi bagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khuusnya anak jalanan di Kota Medan.

Asumsi dari pengembangan berbasis asset adalah bahwa yang dapat menjawab suatu masalah masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dan segala usaha perbaikan ini harus dimulai dari perbaikan modal sosial. McKnight dan Kretzman percaya bahwa salah satu masalah sentral dalam masyarakat kita adalah bahwa modal sosial telah rusak oleh profesionalisasi kepedulian dalam perencanaan dan layanan sistem. Lingkungan dan penduduk hanya dipandang sebagai objek yang "membutuhkan" dan dipandang sebagai "masalah" yang harus diselesaikan (McKnight, 2010 dalam Fuadillah, 2015). Aset terdapat dalam beberapa bentuk di dalam suatu komunitas. Green dan Haines (2002) menyatakan terdapat lima konsep utama dalam asset based community development, yaitu kapital manusia/sumber daya manusia, kapital sosial/ modal sosial, kapital fisik/infrastruktur, kapital keuangan dan kapital lingkungan/sumber daya alam.

1. Modal Manusia (*Human Capital*) *Human capital* Modal Manusia ini dapat dilakukan dengan memanfaatka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimiiki Kota Medan antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dan Dinas lainnya yang bisa membangun Sumber Daya Manusia (SDM) orang tua dari anak jalanan tersebut dan memenuhi hak-hak anak jalanan yaitu belajar dan bermain. Kegiatan ini dilakukan dilingkungan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat ditingkat lingkungan menjad kunci

sukses dari modal manusia tersebut. Sebelum tahap ini perlu dilakukan assesment, penyuluhan dan penyadaran betapa pentingnya anak dan hak-hak anak dilingkungan keluarga tempat tinggal anak jalanan, sehingga keluarga dan lingkungan tempat anak jalanan tinggal terbuka wawasan dan kesadarannnya dalam mengembangkan modal manusia tersebut. Modal manusia tersebut bisa dilakukan melalui intervensi komunitas dengan cara direct service (jika kondisi sumber daya manusia memungkinkan disekitar tempat tinggal atau lingkungan anak jalanan).

2. Modal Sosial (Social Capital) Social capital

Lingkungan sosial masyarakat Kota Medan dapat memungkinkan modal sosial diperoleh lingkungan keluarga tempat tinggal anak jalanan di Kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari norma, aturan masyarakat, budaya yang telah ada dan dapat dijumpai ditengah masyarakat yang memiliki kesamaan. Biasanya lingkungan tinggal anak jalanan adalah lingkungan yang slum area (area kumuh), memiliki rasa senasib sepenanggungan sehigga memiliki emosional dan kedekatan yang lebih erat. Tiga macam bentuk modal sosial dalam kaitannya dengan perilaku warga masyarakat di dalam dan antar kelompok. Peran communit worker disini adalah membantu menemukan dan mengidentifikasi modal sosial yang potensial dan dapat digunakan untuk membangun lingkungan disekitar tempat tinggal anak jalanan di Kota Medan.

3. Modal Fisik (*Physical Capital*)

Moda fisik ini dapat memanfaatkan rumah singgah seperti Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang direncanakan Kota Medan, panti-anti asuhan yang dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masrakat baik menggunakan sistem panti ataupun non panti. Infrasturktur, sarana dan prasarana perlu mendapatkan perhatian khususn dari

Pemerintah Kota Medan bukan dalam artian membangun panti anak jalanan tetapi lebih kepada mendekatkan sistem sumber yang dimiliki pemerintah yang bisa diakses oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan, sehingga mereka bisa mengakses layaknya warga Kota Medan lainnya tanpa diskriminasi.

4. Modal Keuangan (Financial Capital)

Setelah orangtua anak jalanan atau keluarga mendapatkan pelatihan atau skill dari Dinas Tenaga Kerja ataupun progam lainnnya dari Pemerintah Kota Medan dan difasilitasi dalam bentuk bantuan keuangan, maka modal tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk kewirausahaan yang dapat dijadikan sumber pendapatan ekonomi keluarga anak jalanan. Yang bekerja disini adalah orang tua atau keluarga atau warga dilingkungan tempat tiggal anak jalanan tersebut kemudian menjadi modal keuangan untuk menjamin kehidupan anak jalanan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak anak jalanan belajar dan bermain tetap terpenuhi tanpa mereka harus bekerja dijalanan bai sebagai *child on the street* atau pun *child of the street*.

5. Modal Lingkungan (Environmental Capital)

Lingkungan yang mendukung baik sumber daya alam, lingkungan tempat tinggal yang tersedia mejadi salah satu faktor penting, hal ini dapat tercapai dari partisipasi aktif masyarakat dan keluarga dalam lingkungan tempat tinggal anak jalanan seperti menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong dan hal lainnya.

Asset Base Community ini dapat berjalan secara efektif dan dan efisien dengan syarat sebagai berikut:

1. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Medan Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang

Larangan Gelandangan dan Pengemis sera Tuna Susila di Kota Medan, dan mengganti atau revisi Peraturan Daerah Kota Medan tentang pencegahan, penanganan, dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan.

- 2. Harus ada kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara dalam hal penegahan, penanganan dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan, karena penyumbang paling banyak anak jalanan di Kota Medan berasal dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.
- 3. Pemerintah Kota Medan melalui Peraturan Peraturan Daerah Kota Medan yang baru tentang Pencegahan, Penanganan dan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) khususnya anak jalanan berkordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Sosial Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam hal Pencegahan, Penanganan dan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan.
- 4. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsentrasi selama ini dalam memberikan pemberdayaan kepada anak jalanan seperti Komisi Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) Kota Medan, Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, dan panti-panti asuhan anak yang selama ini memberikan

pelayanan kepada anak jalanan yang memberikan pelayanan sistem panti dan non panti. Sehingga pencegahan, penanganan, dan fasilitasi dapat dilakukan secara maksimal.

5. Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang akan difungsikan oleh Dinas Sosial Kota Medan sebagai penampung sementara hasil razia terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khusunya anak jalanan dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat diakses oleh masyarakat lingkungan untuk mendapatkan manfaatnya tentunya program yang dijalankan tidak hanya sistem pelayanan panti tetapi harus dimasukkan Asset Base Community yang ada di masyarakat khususnya keluarga dimana anak jalanan tersebut tinggal di Kota Medan.

4.6. Menyongsong Kota Layak Anak (KLA) Nindya di Kota Medan Tahun 2022

Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan upaya Pemerintahan Kota/Kabupaten untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Secara normatif yuridis pengembangan KLA terdapat dalam *World Fit for Children*, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28b, 28c), Program Nasional bagi Anak Indonesia 2015, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Permenneg Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Kebijakan KLA. Kota Layak Anak sendiri menurut Unicef Innocenti Research Centre21 adalah adalah kota yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Dalam konteks kebijakan publik, maka adopsi nilai-nilai anak dalam kebijakan publik seyogyanya memenuhi beberapa unsur, yakni: 1) dimensi anak memengaruhi keputusan terhadap kota/kabupaten; 2) dengapresiasi pendapat anak tentang kota, Misalnya kawasan bebas asap rokok; 3) tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana bermain bagi anak yang aman dan nyaman bagi ruang bermain, berkreasi, tumbuh kembang bagi anak. Misalnya kebijakan tentang pemenuhan gizi bagi balita melalui posyandu atau dasawisma.; 4) pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, misalnya melalui penidikan dasar gratis bagi anak dan jaminan kesehatan, ketersediaan Puskesmas yang mudah dijangkau; 5) mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik. 6) melindungi anak dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah; 7) aman berjalan di jalan melalui ketersediaan jalan yang baik, memadai, mudah bertemu dan bermain dengan temannya; 8) mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hidup di lingkungan yang bebas polusi; 9) anak dapat dilibatkan dalam banyak hal, termasuk dalam kegiatan budaya, temu anak dan berbagi pengalaman dalam kehidupan sesuai dengan keampuan anak; 10) setiap anak berhak atas kehidupan untuk pegembangan fisik, mental, spritual, dan moral. (Duadji dan Tresiana, 2018)

Kota Layak Anak (KLA) tingkat Madya telah diterima Kota Medan pada tahun 2021, namun dengan melihat realita fenomena anak jalanan baik child on the street dan child of the street dikhawatirkan pada tahun-tahun selanjutnya akan menghambat medan menjadi Kota Layak Anak Madya lagi. Hal ini dikarenakan anak

jalanan yang ada di Kota Medan juga mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya yang ada di Kota Medan. Jika anak jalanan tersebut tetap dibiarkan beraktivitas dijalanan baik *Child on The Street* maupun *Child of the street* tentunya akan menghalangi hak-hak anak jalanan tersebut untuk belajar dan bermain, meskipun mereka anak jalanan yang berasal dari luar wilayah Kota Medan maupun anak jalanan yang berasal dari Kota Medan. Karena pada dasarnya hak mereka semua adalah sama yaitu bermain dan belajar tanpa dibedakan.

Variabel mengukur pemenuhan terhadap hak anak di daerah yang terdiri atas klaster kelembagaan dan lima klaster hak anak. Kelima klaster anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Fenomena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak jalanan tentunya harus mendapatkan perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Medan tentunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar indikator tersebut dapat dijalankan dengan baik, sehingga Kota Medan dapat mempertahankan Kota Medan Layak Anak tingkat Madya pada tahun 2021 dan dapat meraih predikat Kota Layak Anak Nindya pada tahun 2022.



Gambar 4.19. Tingkatan Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten/Kota

Sumber: Google, 2022

Penelitian yang dilakukan Masdin dan Beti Mulu pada tahun 2020 dengan judl Anak Jalanan di Kotandari Menuju Kota Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan sebagian dari anak jalanan di kota Kendari bersekolah pada sekolah formal dan sebagian lainnya belajar melalui lembaga komunitas anak jalanan kota Kendari (Kojak), dan yang lainnya putus sekolah dengan alasan tidak mampu secara ekonomi. Anak-anak jalalan di Kota Kendari mencari nafkah dijalanan untuk membantu ekonomi orang tua. Sebagian mereka masih kembali ke orang tua, namun sebagian lainnya tidak memiliki tempat tinggal dan hidup dijalan. Mereka bekerja sebagai pengamen dan pengasong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejauh ini belum tersedia model pendidikan khusus bagi anak jalanan di Kota Kendari yang difasilitasi oleh pemerintah. Dalam kerangka Kota Layak Anak (KLA)

anak jalan perlu mendapatkan akses pendidikan, agar mereka mendapatkan hak belajar demi masa depan mereka. Pemerintah kota kendari belum memfasilitasi pendidikan bagi anak jalan, mereka yang bersekolah merupakan inisiatif dari orang tua atau lembaga swadaya masyarakat.

Hasil kajian di atas dapat djadikan bahan rujukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan Kota Layak Anak level Nindya terutama bagai pendidikan anak jalanan dengan memanfaatkan Dinas Pendidikan dan Pusat Kajian Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarkat yang fokus kepada pendidikan anak dengan menyelenggarakan pendidikan Kejar Paket A, paket B, dan Paket C di Kota Medan.

Konsepsi pembangunan kota layak anak yang berbasis kolaborasi (collaborative governance), sehingga diharapkan akan lahir berbagai kebijakan dan program anak pada tingkat kabupaten/kota yang berkarakter holistik, integratif, dan berkelanjutan. Friedman memandang esensi pokok pembangunan kolaboratif adalah sebuah bentuk aplikasi atas pengetahuan ke dalam tindakan dan mengelompokkan perencanaan sebagai social reform, policy analysis, social learning, dan social mobilization. (Duadji dan Tresiana, 2018)

Perubahan pendekatan ini menjadikan perencanaan pembangunan tidak hanya milik pemerintah, tetapi milik kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya Ansell dan Gash (2007) dalam (Duadji dan Tresiana, 2018) memperkuat bahwa konsep membangun, termasuk merumuskan kebijakan pembangunan kota layak anak melalui proses kolaboratif, adalah suatu *proses adaptive system*, dimana pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu

konsensus. Proses kolaboratif menurut model ini akan terdiri dari berbagai tahapan, yaitu dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (*face-to-face dialogue*), membangun kepercayaan (trust building), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*). Tahapan ini merupakan suatu siklus sehingga terjadi proses pembelajaran di dalamnya. (Duadji dan Tresiana, 2018)

Untuk ketercapaian hak anak di atas, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Duadji, Tresiana dan Putri, dirumuskan model *collaborative governance* untuk merumuskan kebijakan pembangunan anak, yang selama ini dilakukan parsial, terpisah, belum berintegrasi dengan kelompok/kelembagaan masyarakat lainnya, kurang mengikutsertakan atau melibatkan potensi dan jejaring kelembagaan yang ada di masyarakat. Penguatan kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak akan berhasil, manakala semua komponen kelembagaan masyarakat melakukan komunikasi, tindakan dan kerjasama untuk mengambil suatu keputusan publik yang meupakan hasil konsensus melalui suatu proses dialog secara tatap muka. (Duadji dan Tresiana, 2018)

Dalam kebijakan membangun kota/kabupaten layak anak, pada intinya pemerintah dapat melakukan suatu jejaring/kemitraan yang seluas-luasnya dengan melibatkan semua pihak yang ada di kota. Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil. Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi

suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya (Duadji dan Tresiana, 2018)

Konsep Kota Layak Anak menggunakan Model *Collaborative Governance* di atas dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan capaian Kota Layak Anak menjadi level Nindya dan level lebih tinggi selanjutnya. Dengan model collaborative governance ini diharapkan semua indikator capaian dalam meraih Kota Layak Anak dapat terpenuhi dengan maksimal.

4.7. Hambatan dan Tantangan

- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila di Kota Medan masih menjadi acuan bagi Dinas Sosial Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan dalam pencegahan dan penagnanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khusunya anak jalanan
- Kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belum maksimal sehingga pencegahan, penanganan dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak jalanan belum dapat dijalankan secara efektif
- 3. Kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat masih rendah sehingga perlu dijembatani untuk bisa mengembangkan dan mengimplementasikan Asset Base Community dalam Pencegahan, Penanganan dan Fasilitasi anak jalanan di Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian sebagai berikut:

- A. Perkembangan anak jalanan di Kota Medan sebagian anak anak jalanan melakukan perubahan jenis pekerjaan misalnya menjadi manusia silver dan anak badut khususnya tiga tahun belakangan ini.
- B. Upaya Pemerintah Kota Medan dalam Pencegahan, Penanganan, dan Fasilitasi Anak Jalanan di Kota Medan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila di Kota Medan masih menjadi rujukan hukum Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja mencegah dan menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan,
- C. Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan di Kota Medan. Sistem Pelayanan Panti dan Sistem Pelayanan Non Panti yang dijalankan selama ini oleh pemerintah mapupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada pemberdayaan anak belum berjalan maksimal. Asset Base Community menjadi tawaran pencegahan, penanganan, dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan. Rumah Perlindungan Sosial yang akan difungsikan Dinas Sosial Kota Medan sebagai panti sementara menampung hasil razia bersama satpol PP tidak menjadi jawaban pencegahan, penaganan dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan jika masih tetap menggunakan sistem pelayanan panti saja

- D. Kota Medan menuju Kota Layak Anak. Kota Medan tahun 2021 mendapatkan Kota Layak Anak tingkat Madya dengan adanya fenmena anak jalanan di Kota Medan dikhawatirkan Kota Medan tidak dapat mempertahankan pemenuhan indikator penilaian Kota Layak Anak tingkat tingkat Madya, dan akan sulit mendapatkan Kota Layak Anak tingkat Nindya pada tahun 2022.
- E. Model Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan Kota Medan adalah Model *Asset Base Communnity* .

5.2. Saran/Rekomendasi

Adapun saran/rekomendasi yang ditawarkan peneliti sebagai Strategi untuk menurunkan serta menghapuskan anak jalanan di Kota Medan, adalah sebagai berikut:

 Mengevaluasi Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis sera Tuba Susila di Kota Medan dan menerbitkan atau revisi peraturan tersebut untuk Pencegahan, Penanganan, dan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan.

- Mengikutsertakan Pekerja Sosial dalam setiap razia yang dilakukan Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga penanganan dan assesment dapat maksimal.
- 3. Pemerintah Kota Medan melakukan koordinasi dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta dengan Lembaga Swdaya Masyarakat yang fokus pada kegiatan Pencegahan, Penanganan, dan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan.
- 4. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya di Propinsi Sumatera Utara, dalam hal menerbitkan Peraturan Bersama dalam hal Pencegahan, Penanganan, dan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan.
- Menerapkan Model Asset Base Community sebagai Pencegahan, Penanganan, dan Fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan.
- 6. Melakukan kerjasama dengan Laboratrium Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP USU untuk penerapan *Asset Base Community* bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak jalanan di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif "Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aruan, R.V. dan Halawa, R.F. (2019). "Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan di Medan. Jurnal: JURNAL DARMA AGUNG Volume XXVII, Nomor 3, Desember 2019: 1173–1178.
- Duadji, N dan Tresiana N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. Jurnal: SAWWA: Jurnal Studi Gender Vol 13, No 1 (2018): 1-22 DOI: http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201
- Hulu, S. A. (2017). *Model pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Di Kota Medan*, FISIP, Departemen Kesejahteraan Sosial, USU, Medan.
- Irwanto. (2003). *Potret Kehidupan Anak Jalanan Di Jakarta*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Irwanto. (2003). *Potret Kehidupan Anak Jalanan Di Jakarta*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muhsin, K dan Sukamto, B. (2012). *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*, Yogyakarta: Cakruk Publishing
- Putri. F, dkk tahun 2015 dengan judul Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan. Jurnal: Prosiding KS: Riset&PKKM Volume 2 Nomor. ISSN 2442-24480. Doi:10.24198/jppm.v2i1.13259
- Rahman. F., 2020. Model Penanganan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya. Jurnal Sociopolitico: Volume 2 Nomor 1 Februari, 2020,E-ISSN 2656-1026. DOI: ttps://doi.org/10.54683/sociopolitico.v2i1.25
- Ramdhani, M dkk. (2016). *Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol 6, No 11
- Riyanti, C. dan Raharjo, S.T. (2021). Asset Based Community Development Dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR). Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol. 3, Nomor 1. Halaman: 115-126. ISSN 2656-1786 (e). **DOI**: https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32144
- Santoso, T. (2002). "Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Setiawan, H.H. (2007). Mencegah Menjadi Anak Jalanan Dan Mengembalikannya Kepada Keluarga Melalui *Model Community Based*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 02, 2007: 44-53.
- Shalahuddin. (2000). Anak Jalanan Perempuan. Semarang: Yayasan Setara.
- Simon, J. (2017). Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kta Medan. Jurnal Publik Dharmawangsa, Volum 11 Nomor 2 (2017)
- Stiawati, T. Rusli, B. Saefullah A, D. Karnesih, (2019). Penanganan Anak Jalanan Di Kota Serang Provinsi Banten. Jurnal Administrasi Publik (JAP).Vol. 10 Nomor 2 (2019). DOI:10.31506/jap.v10i2.6792
- Surbakti, dkk. 1997. Pemberdayaan Anak-anak Terlantar. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suharto.E. (2007). "Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab

- Sosial Perusahaan". Bandung: Rafika Aditama.
- Sukoco.D.H. (2005)."Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaanya". Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos.
- Sutriminah. E. (2017). "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi" jurnal online dapat di unduh di http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62
- Suyanto, B. (2010). "Masalah Sosial Anak". Jakarta: Kencana
- Syahruddin, dkk 2021. Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 5, No. 4 Novmber 2021. e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944. DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2582/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/inde x.

Website Dinas Sosial Kota Medan 2021 diakses di https://dissos.pemkomedan.go.id/

Lampiran 1 Panduan Wawancara

Panduan Wawancara Kajian Anak Jalanan Pemko Medan Tahun 2022

Perhatian untuk tenaga lapangan pengumpul data, tugas anda melakukan wawancara mendalam, observasi dan dolumentasi, gunakan insting peneliti seperti anda melakukan wawancara kepada informan sewaktu mengerjakan skripsi (tidak mudah percaya pada hasil jawaban didapat).

Pengumpul data harus menguasa konsep street on the child, stret of the child, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Sistem Pelayanan Sosial berbasis Panti dan Non Panti, Community Based Approach (Pelayanan berbasis Masyarakat), Perwal Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan mengelandang dan mengemis di Kota Medan. Rumah Perlindungan Sosial (RPS)/

Gunakan 5~W~+1~H~(What,~where,~Who,~Why,~Whom~dan~How) untuk mengeksplorasi pertanyaan apabila ada yang dirasa pengumpul data jawaban yang dicari belum maksimal

Pertanyaan yang ingin di cari jawabannya dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana proses perkembangan anak jalanan *street on the child* dan *street of the street* menjadi manusia *silver*, badut, pengemis yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan?

- 1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengantisipasi dan memfasilitasi masalah Anak Jalanan yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan?.
- 2. Bagaimana Sistem Panti dan Non Panti memberikan pelayanan kesejahteraan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Eksplorasi Pertanyaan tambahan mengunakan (5W +1 H) sebagai berikut:

- 1. Perkembangan anak jalanan di Kota Medan?
- 2. Upaya pemerintah Kota Medan apa saja?
- 3. Sistem panti dan Non Panti Anak Jalanan di Pungai Sejahtera Binjai?
- 4. Rumah Perlindungan Sosial di Kota Medan?

Pertanyaan untuk OPD bidang hukum dan kebijakan Kota Medan menangani Anak Jalanan di Kota Medan. (BAPPEDA Kota Medan. dll)

- 1. Seperti apa bapak/ibu memandang PPKS anak jalanan di Kota Medan? (apakah seperti bunga liar yang merusak pemandangan kota? Atau seperti manusia yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial?.
- 2. Kebijakan saat ini Perwal Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan menggelandang dan mengemis di Kota Medan bisa dikatakan tidak efektif dan tidak ada kordinasi antara OPD bersangkutan (Dinas Sosial, Satpol PP Kota Medan, Kecamatan, Keluarahan, dll).

- 3. Faktor paling besar mempengaruhi anak jalanan adalah faktor ekonomi dan faktor keluarga, dan faktor sosial (lingkungan),, bagaimana pandangan anda mengenai tersebut?
- 4. Kita tahu Pemko Medan saat ini tidak memiliki Panti khusus Anak Jalanan, apakah perlu dibuat panti khusus anak jalanan? Kaitannya dengan Medan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 Pemko Medan sudah masuk kategori Median.
- 5. Apa saran anda terkait kebijakan Kota Medan mengenai penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya Anak Jalanan di Kota Medan?.
- 6. Model selama ini yang diterapkan dengan Perwal Nomor 6 Tahun 2003 adalah pendekatan hukum. Dinilai tidak efektif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan. Bagaimana tanggapan anda mengenai hal tersebut?
- 7. Seperti kita ketahui terdapat pelayanan sistem panti dan non panti dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), apa pendapat anda mengenai kelebihan dan kekurangan sIstem tersebut? Kemudian bagaimana pendapat anda mengenai *community based approach* (pendekatan berbasis masyarkat)?
- 8. Menurut pendapat anda model sistem pelayanan seperti apa yang paling tepat digunakan Pemerintah Kota Medan untuk memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya anak jalanan?
- 9. Apakah memungkinkan membuat Perda yang isinya bekerja sama dengan pemeritah/kota lain (di sumatera utara) yang bekerja sama menangani dan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial seperti pelatihan., pendidikan (peraturan bersama)?
- 10. Apakah memnungkinkan terjadi kordinasi antara OPD terkait (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, UMKM, Dunia Usaha, Universitas,) untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan formal, non formal, dan informal untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahtraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan?

Pertanyaan untuk LSM yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan di Kota Medan (KKSP Kota Medan, PKPA Kota Medan)

1. NGO anda bergerak dibidang apa ? berapa lama NGO menangani PPKS khususnya anak jalanan di Kota Medan?

- 2. Seperti apa pelayanan atau program yang diberikan oleh NGO anda kepada PPKS Khususnya anak jalanan?
- 3. Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan Kota Medan selama ini menangani anak jalanan (Perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis di Kota Medan)?
- 4. Apa perbedaan pelayanan atau program yang NGO anda lakukan dengan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Medan?
- 5. Menurut anda apakah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berasal dari luar Kota Medan harus diselesaikan atau diberikan pelayanan oleh Pemko Medan?
- 6. Bagaimana tanggapan anda mengenai perkembangan anak jalanan di Kota Medan saat ini (dari pengamen, jualan, anak badut hingga ke manusia Silver)
- 7. Bagaimana penanganan yang dilakukan NGO anda mengenai perkembangan anak jalanan (dari pengamen, jualan, anak badut hingga ke manusia Silver) ? masih sesuai dengan kondisi saat ini?
- 8. Bagaimana tanggapan anda mengenai rencana Pemerintah Kota Medan membuat Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang akan memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelaanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya anak jalanan di Kota Medan?
- 9. Bagaimana pandangan anda mengenai system pelayanan panti dan system pelayanan non panti menangani anak jalanan ?
- 10. Kita tahu Pemko Medan saat ini tidak memiliki Panti khusus Anak Jalanan, apakah perlu dibuat panti khusus anak jalanan?
- 11. Bagaimana pandangan anda mengenai pelayanan yang berbasis masyarakat dalam memberikan pelayanan sosial kepada anak jalanan ?
- 12. Menurut anda model pelayanan seperti apa yang tepat untuk diterapkan di Kota Medan?
- 13. Apa saran anda terkait pelayanan yang diberikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Jalanan di Kota Medan?.
- 14. Faktor paling besar mempengaruhi anak jalanan adalah faktor ekonomi dan faktor keluarga, dan faktor sosial (lingkungan),, bagaimana pandangan anda mengenai tersebut?

- 15. Seperti kita ketahui terdapat pelayanan sistem panti dan non panti dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), apa pendapat anda mengenai kelebihan dan kekurangan sIstem tersebut? Kemudian bagaimana pendapat anda mengenai *community based approach* (pendekatan berbasis masyarkat)?
- 16. Menurut pendapat anda model sistem pelayanan seperti apa yang paling tepat digunakan Pemerintah Kota Medan untuk memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya anak jalanan?
- 17. Apakah dimungkinkan kordinasi antara Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Dinas lainnya yang bisa memberikan pelatihan kerja pada keluarga ataupun untuk anak

Pertanyaan untuk pengelola panti/pekerja sosial di Panti Pungai Sejahtera Binjai.

- 1. Bagaimana alur PPKS yang mendapatkan pelayanan di panti di Pungai Sejahtera, khususnya anak jalanan ? (tolong ceritakan narasinya)
- 2. Seperti apa pelayanan yang diberikan panti terhadap PPKS khususnya anak jalanan seperti apa ? (ceritakan alurnya, programnya, dan lainnya)
- 3. Apa yang menjadi permasalahan di panti pungai sejahtera (dana, fasilitas, SDM, program) ? sehingga permasalahan PPKS khususnya anak jalanan tidak pernah selesai di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan.
- 4. Seperti kita ketahui terdapat pelayanan sistem panti dan non panti dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), apa pendapat anda mengenai kelebihan dan kekurangan sistem tersebut? Kemudian bagaimana pendapat anda mengenai *community based approach* (pendekatan berbasis masyarakat)?
- 5. Menurut pendapat anda model sistem pelayanan seperti apa yang paling tepat digunakan Pemerintah Kota Medan untuk memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya anak jalanan?
- 6. Faktor paling besar mempengaruhi anak jalanan adalah faktor ekonomi dan faktor keluarga, dan faktor sosial (lingkungan),, bagaimana pandangan anda mengenai tersebut?

- 7. Kita tahu Pemko Medan saat ini tidak memiliki Panti khusus Anak Jalanan, apakah perlu dibuat panti khusus anak jalanan? Kaitannya dengan Medan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 Pemko Medan sudah masuk kategori Median.
- 8. Apa saran anda terkait kebijakan Kota Medan mengenai penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya Anak Jalanan di Kota Medan?.
- 9. Model selama ini yang diterapkan dengan Perwal Nomor 6 Tahun 2003 adalah pendekatan hukum. Dinilai tidak efektif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan. Bagaimana tanggapan anda mengenai hal tersebut?
- 10. Seperti kita ketahui terdapat pelayanan sistem panti dan non panti dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), apa pendapat anda mengenai kelebihan dan kekurangan sIstem tersebut? Kemudian bagaimana pendapat anda mengenai *community based approach* (pendekatan berbasis masyarkat)?
- 11. Menurut pendapat anda model sistem pelayanan seperti apa yang paling tepat digunakan Pemerintah Kota Medan untuk memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya anak jalanan?

Pertanyan untuk Dinas Sosial Kota Medan atau OPD terkait khususnya Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Kota Medan?

- 1. Seperti apa konsep pelayanan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Kota Medan?
- 2. Siapa saja yang berhak mendapatkan pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Kota Medan?
- 3. Bagaimana sistem pelayanan yang diberikan bagi PPKS khususnya anak jalanan di Kota Medan?
- 4. Apakah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan mendapatkan layanan kesehatan seperti BPJS, pendidikan, (standar pelayanan minimal yang diberikan Negara) dan lainnya?
- 5. Bagaimana cara Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengakses layanan tersebut?
- 6. Faktor paling besar mempengaruhi anak jalanan adalah faktor ekonomi dan faktor keluarga, dan faktor sosial (lingkungan),, bagaimana pandangan anda mengenai tersebut?
- 7. Kita tahu Pemko Medan saat ini tidak memiliki Panti khusus Anak Jalanan, apakah perlu dibuat panti khusus anak jalanan? Kaitannya dengan Medan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 Pemko Medan sudah masuk kategori Median.
- 8. Model selama ini yang diterapkan dengan Perwal Nomor 6 Tahun 2003 adalah pendekatan hukum. Dinilai tidak efektif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan. Bagaimana tanggapan anda mengenai hal tersebut?
- 9. Seperti kita ketahui terdapat pelayanan sistem panti dan non panti dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), apa pendapat anda mengenai kelebihan dan kekurangan sIstem tersebut? Kemudian bagaimana pendapat anda mengenai *community based approach* (pendekatan berbasis masyarkat)?
- 10. Menurut pendapat anda model sistem pelayanan seperti apa yang paling tepat digunakan Pemerintah Kota Medan untuk memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya anak jalanan?

- 11. Apa saja kekuranngan Dinas Sosial terkait penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan?. Bantuan dari instansi apa saja yang anda butuhkan dan bentuknya seperti apa?
- 12. Apa saran anda terkait kebijakan Kota Medan mengenai penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya Anak Jalanan di Kota Medan?.

Pertanyaan untuk anak jalanan di Kota Medan (anak adalah usia di bawah 18 tahun, lihat pembagian child on the street dan child of the street)

- 1. Kenapa bekerja menjadi (manusia silver, badut, penjual jipang, pengamen) di jalanan ?
- 2. Apa motivasi bekerja menjadi (manusia silver, badut, penjual jipang, pengamen), apa karena ingin membantu perekonomian keluarga? Apa dipaksa oleh orang tua/orang lain untuk bekerja mnghasilkan uang?
- 3. Apakah orang tua tahu anda bekerja menjadi (manusia silver, badut, penjual jipang/makana, jual bendera, pengamen) di jalanan?, atau orang tua anda mendukung anda bekerja dijalanan?
- 4. Apa yang menjadi faktor utama dan dominan sehingga saudara bekerja di jalanan? (eksplorasi dari petugas lapangan)
- 5. Anda berasal dari daerah mana? Saat ini di Kota Medan tinggal dimana? Bersama siapa?
- 6. Apakah saat ini masih sekolah?, sekolah dimana? kelas berapa?
- 7. Jika tidak bersekolah apakah anda mau bersekolah seperti anak lainnya?, atau anda menginginkan model pendidikan seperti apa? (berikan penjelasan model sekolah formal, informal, kejar paket A, B, C, dan sekolah non formal sekolah keterampilan seperti kursus menjahit, dan keterampilan lainnya)?
- 8. Apakah pernah anda ditangkap/razia Satpol PP ?. Berapa kali anda ditangkap/razia?
- 9. Seperti apa prosesnya setelah anda ditangkap? (coba narasikan)
- 10. Apa yang anda alami sewaktu di Panti Pungai Sejahetera Binjai? Atau panti lainnya yang dirujuk oleh Dinas Sosial?
- 11. Program apa saja yang diberikan panti tersebut? Berapa lama anda disana? (pengumpul data eksplore mendalam)

- 12. Bagaimana menurut anda program tersebut,? Apakah merubah anda (mengembalikan fugsi sosial anda)?
- 13. Apa alasan anda kembali lagi ke jalanan setelah keluar dari Panti Sosial tersebut?
- 14. Program seperti apa yang anda inginkan dari Pemerintah Kota Medan ? (pengumpul data eksplore pertanyaan ini)

Lampiran 2. Verbatim hasil wawancara penelitian NOTULENSI

PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN MENGGUNAKAN SISTEM PELAYANAN PANTI DAN NON PANTI

Rabu, 18 Mei 2022

Ruang Rapat II Lantai 2, Kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara

No	Waktu	Masukkan	Keterangan		
1	09.20 –	Pembukaan acara Seminar Proposal Penelitian dan Bapak			
	09.30	Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Di Kota Medan Bahrian			
	WIB	oleh MC/moderator. Assalamualaikum Wr. Wb. Puji dan (Kepala			
		syukur atas nikmat yang diberikan tuhan sehingga dapat Bagian			
		berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selamat datang Sosial			
		diucapkan kepada para peserta yang telah berhadir. Seminar Budaya)			
		Proposal kali ini mengambil topik tentang "Anak Jalanan".			
		Pentingnya acara ini untuk memberikan kritik dan saran			
		dalam rangka menunjang keberhasilan penelitian tersebut.			
		Diharapkan peserta tetap fokus dan memperhatikan acara ini.			
2	09.30 –	Kata sambutan sekaligus membuka acara Seminar	Bapak		
	09.40	Proposal dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Di	Irwan		
	WIB	Kota Medan. Pertama puji syukur kepada Tuhan YME.	Ritonga		
		Karena telah memberikan kesempatan kepada kita menghadiri (Kepala			
		acara Seminar Proposal ini. Mengucapkan terimakasih atas Balitbang			
		keluangan waktu para peserta dan terima kasih kepada teman- Kota			
		teman yang telah mempersiapkan acara ini. Kita menyadari Medan)			
		petingnya acara ini karena memberikan pemahaman dan			
		masukkan kepada kita semua tentang "Anak Jalanan" secara			
		menyeluruh. Mengenai penanganan, pelayanan, serta apa			
		yang dapat diberikan kepada "Anak Jalanan" dan bagaimana			
		memberdayakan "Anak Jalanan". Melalui sambutan ini			
		diharapkan memberikan manfaat bagi kita semua.			
3	09.40 –	Pemaparan Proposal Kajian "Penanganan Anak Jalanan	Ibu Hairani		
	10.25	Di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan	Siregar (Tim		
	WIB	Non Panti". Anak Jalanan merupakan masalah yang kompleks	Peneliti)		
		karena mempengaruhi kondisi sosisal lainnya dan			
		mempengaruhi kondisi ekonomi. Banyak keluarga mencari			
		nafkah dengan memperkerjakan anak-anak dibawah umur.			
		Pada Juli 2020 Gubernur Sumatera Utara yaitu Bapak Edy			
		Rahmayadi menginstruksikan untuk meningkatkan ketertiban			

	1					
		anak jalanan.				
		Dikarenakan Kota Medan menjadi penyumbang anak				
		jalanan terbesar di Indonesia. Lembaga Pemerintah atau Panti				
		Asuhan merupakan pusat pelayanan sosial yang ditunggu				
		peran aktifnya. Selain itu anak jalanan bisa menjadi korban	, ,			
		penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi. Adapun yang				
		nantinya akan digunakan adalah Jenis Penelitian Deskriptif				
		dengan pendekatan Kualitatif. Lokasi Penelitian akan				
		dilaksanakan di Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini untuk				
		mengetahui dan menganalisa proses perkembangan anak				
		jalanan yang menjadi PPKS dan mengetahui upaya				
		pemerintah Kota Medan mengantisipasi dan memfasilitasi				
		anak jalan yang PPKS. Permasalahan anak jalanan akan				
		semakin rumit jika dibiarkan begitu saja. Artinya sangat				
		penting kerjasama antar pemerintah dengan banyak pihak				
		untuk menyelesaikan masalah ini.				
4	10.30-	Selama ini yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan	Ibu Ami			
	10.50	pada saat melakukan razia penertiban PMKS, sama seperti	Pratiwi			
	WIB	yang dijelaskan:	(DINAS			
		1. Kita tangkap, kita kumpulkan dikantor atau kita ada	SOSIAL)			
		Rumah Singgah.	,			
		2. Kita kumpulkan dikantor, seperti biasa kita data. Jika yang				
		punya keluarga, kita panggil keluarga kita <i>assasment</i>				
		untuk tidak melakukan lagi anak-anak ini dijalan. Kalau				
		ternyata masih berkali-kali dapat juga anak-anak yang tadi				
		juga sanksinya kita bawa ke panti.				
		3. Jadi yang punya keluarga kita pulangkan seperti biasa,				
		yang tidak ada keluarga ini kita kirim ke panti Provinsi.				
		Karena Medan tidak memiliki panti merupakan salah satu				
		permasalahan kita. Selama ini kami kirim ke panti				
		Provinsi kendalanya disana itu pantinya banyak yang				
		penuh, baik itu di Binjai, Sibolga, di Siantar macam-				
		macam pengirimannya,mana yang kosong. Kordinasi dulu				
		terhadap pihak pantinya. Adapaun kalau sudah dikirim ke				
		panti biasanya 3 (tiga) hari atau 2 (dua) hari kembali lagi.				
		HARAPANNYA RPS bisa untuk membenahi para				
		anak-anak jalanan dengan harapan ada pembinaan dalam				
		RPS. Misalnya kedepannya ada wacana kalau dia seperti				
		manusia silver mungkin kita buat komunitas. Pembinaannya				

		mungkin nanti setelah RPS duduk. Seperti pengamen- pengamen itu di bina ada yang ditonjolkan nanti seperti itu. Supaya tidak ada lagi yang berkeluyuran di jalan-jalan. RPS ini adalah solusi yang nanti bakal membenahi supaya Medan terlihat cantik dan indah, tidak ada lagi pengemis atau apapun itu.				
		ODGJ itu juga jadi permasalahan. Kenapa? Ketika ada masyarakat tidak melaporkan ke Dinas Sosial melalui				
		kelurahan ada ODGJ dipinggir jalan, Dinas Sosial tidak ada				
		background untuk menangani seperti itu ODGJ. Tetapi ketika				
		diperiksa di Rumah Sakit, Rumah Sakit mengatakan ini				
		"Belajar Gila" bukan gila beneran. Kalau gila beneran				
		mereka terima. Tetapi ini masih kondisi belajar gila. Belajar gila ini tidak mau mereka menampungnya. Nah ini siapa yang				
		menampungnya? Mungkin di RPS mungkin ada tempat yang				
		seperti itu untuk mengatasi ini juga. Jadi rata-rata orang tua	seperti itu untuk mengatasi ini juga. Jadi rata-rata orang tua			
		anak-anak ini yang menyuuruh anak-anak ini di jalanan,				
		meminta-minta, tambahan uang jajan. Terus karena si anak sudah mengenal uang satu hari bisa dapat 2.000 (dua ribu)				
		bisa kali berapa orang jadi ini yang menjadi kondisi dia malas				
		kembali ke rumah malah enak minta di jalan. Mungkin in PR				
		berat, bukan hanya Dinas Sosial, tetapi juga Pemko Medan.				
<i>E</i>	10.45-	Mungkin RPS lah yang menjadi solusi.	The XX7 - 42			
5	11.00	Dari pengalaman kita sendiri mengenai anak jalanan yang kami lihat selama ini penanganannya masih setengah	Ibu Wati (SAKTI			
	WIB	hati, belum serius. Ketika melakukan razia penertiban aak	PEKSOS)			
		jalananan kita hanya buang-buag anggaran. Karena ketika di	ŕ			
		razia, di data terus dikirim ke Binjai terus dipulangkan sore				
		itu juga dan tidak ada makan dan minum. Terus selanjutnya				
		ini lagi yang kan di razia, orang yang sama yang akan dirazia. Kan kita juga pernah terlibat dalam razia ketika kita				
		menemukan ada anak-anak dan kita tanya kita gali dan kita				
		tanya, tau gak alamat rumahnya? Tau Buk, ayo kita antar.				
		Kami melakukan tracing kerumah yang bernama Anjal ini				
		sampai di daerah Bromo. Disana memang banyak kos-kosan				
		terus menetap itu banyak orang-orang dari luar. Ada dari Rantau Prapat, Labuhan Batu, yang pasti bukan warga Kota				
		Medan. Kemudian kita cek KTP, KK nya bukan dari warga				
		Medan. Mereka disana menyewa perbulan, dan anak-anaknya				

di suruhlah untuk mengemis dengan alasannya itu dengan menjual "tipang". Menjadi masukan juga untuk penelitian, penjual tipang itu juga di amankan. Karena rata-rat anak-anak yang menjual tipang kita tanya ini dari mana? Di daerah Bromo itu juga penjual tipangnya. Jadi kayak ada pemasok tipang nya ini ke berapa komunitas-komunitas dan itulah yang dijalankan. Karena kalau misal dijalanan kalau mereka menyatakan mereka jualan kita kan tidak bisa ditangkap. Dia jualan, mencari nafkah. Ada juga itu yang mengamati orang tuanya itu duduk-duduk di simpang, pura-pura dia menjual minyak ketengan atau pura-pura tambal ban anaknya disimpang situ mengamati sambil razia nanti anaknya dibawa, anaknya ngikuti dari belakang sampai di Dinas Sosial itu yang terjadi, yang kita lihat. Dan orang yang sama, itu itu aja yang di razia. Nanti hanya pindah tempat saja, misalnya dari Simpang Juanda ketika di razia. Nanti bulan depan ketika diamankan sudah di Simpang Pos. Bulan depannya udah gak di Simpang Pos lagi, dia udah di Simpang Amplas.

Ketika membuat surat pernyataan itu bukan efek jera, ketegasan dari Pemko sebenarnya yang bikin takut kepada teman teman yang di razia ini. Tetapi perlu dicoba secara manusiawi ketika kita turun melihat anak-anak kita memang herus melakukan pendekatan kenapa mereka sampai turun dijalan. Kalau kita lihat, di jam operasional melakukan penertiban anak jalanan itu di jam kerja. Dari jam 10.00-16.00. Ternyata anak-anak ini banyak bermain dimalam hari seperti di Simpang Gelato, malam kita jumpai karena nanti karena di jam kerja tidak mencari kami lagi dan hari sabtu minggu itu banyak anak jalanan. Di Simpang Pemda ada ibu dan anaknya selalu disitu tapi kalau misalkan ada razia tidak ada dia disitu. Kebetulan tidak dilakukan dia disitu itu juga menjadi pertanyaan. Kenapa kalau dilakukan raziia dia tidak dapat. Tetapi kalau tidak razia berkeliaran disitu. Harapannya, untuk melakukan pencegahan sebenarnya perlu.

Kita sudah turun kejalanan ada namanya PKA "PENGUATAN KOMUNITAS ANAK" kita membuat kegiatan-kegiatan edukasi. Kita juga memberikan bantuan dan komitmen bersama disitu adalah ketika mereka sudah terlibat ikut dalam PKA ini mereka tidak boleh lagi turun ke jalanan

		dan itu sudah terlaksana. Tetapi memang ada yang kita kasih ada supportnya. Harapannya adalah ketika misalkan ada dilakukan razia penertiban kita harus melakukan penanganan yang tuntas. Jangan setengah-setengah. Misalkan keluarga ini membutuhkan ekonomi maka bantuan ekonomilah yang diberikan. Jadi keluarga tersebut bisa mandiri dan tidak menyuruh anaknya turun ke jalanan lagi. Kita juga memberikan pancing kepada keluarga ini, buka semena-mena hanya memberikan bantuan tetapi membangun kesadaran dari keluarganya sendiri. SARAN yang terbaik adalah dengan "KOMUNITAS" tadi, karena kalaupun dipanti tidak memberikan jawaban yang baik, bukan menjadi yang bijaksana. Tetapi di "KOMUNITAS" ini mungkin bisa bergerak dari tetangga. Ketika dia sudah megang goni nyari barang bekas tetangga mungkin bisa melarang seperti, jangan dek kita balik lagi di "KOMUNITAS" ini dibentuk.	
6	11.00-	Medan memang menjadi sebuah megapolitran,	Pak Syamsul
	11.15	metropolitan sebelumnya. Jadi sebuah kota yang besar, jadi	(KKSP)
	WIB	kalau kita tidak memikirkan mungkin 10 atau 20 tahun yang	
		lalu terkait dari dampak kota itu pasti sulit kita dalam	
		mengatasinya. Kalaulah kota tidak memikirkan dampak-	
		dampaknya muncul yang namanya pengangguran. Terkait	
		juga dengan lapangan pekerjaan, persoalan-persoalan sosial	
		yang lain salah satunya persoalan anak jalanan. Lahirnya	
		Perda No. 6 Tahun 2003 itu untuk mengantasipasi, tetapi itu	
		lebih kepada aspek sosialnya yang tidak muncul hingga sekarang ini. Kenapa begitu? Fokus kita untuk masalah sosial	
		ini sedikit.	
		Terkait dengan anaka jalanan kita harus pastikan harus	
		kita batasi yang namanya anak "yaitu lah manusia dibawah 18	
		tahun" artinya ketika dia menjadi anak jalanan, tentu dia akan	
		melekat ada hak-hak yang lain yakni Undang-Undang	
		Perlindungan Anak (UUPA). Saat ini kita lagi mengajukan	
		Perda bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
		Perlindungan Anak Masyarakat Kota Medan Tentang Perda	
		Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dan situ juga salah	
		satunya mengatur anak-anak yang mengalamai permasalahan	
		PMKS. Kalau dulu namanya PMKS, tapi agak diskriminatif	

oleh Kementerian Sosial. Ketika ada situasi anak jalanan maka yang muncul adalah situasi yang diskriminasi.

Di tahun 2013 kita pernah melakukan upaya-upaya penanganan anak jalanan:

- 1. Sejauh mana saat ini Kota Medan memandang persoalan anak jalanan? Terkait dengan yang namanya penerimaan sosial. Karena ketika mendengar namanya anak jalanan kita langsung pasti ini nyopet, segala macam tapi apakah anak jalanan saja yang nyopet? Kan tidak. Ada masa lain yang berpotensi melakukan kriminal juga. Stigma yang muncul pasti anak jalanan melakukan tindakan kriminal. Penanganan terhadap mereka sifatnya lebih kepada Penegakan Hukum, razia. Apakah mereka sebagai pelaku melakukan tindak pidana? Belum tentu. Makanya dilakukan razia. Kenapa tidak kita lakukan yang namanya "Penyelamatan?" kita selamatkan anak-anak ini agar tidak dijalan. Bukan kita razia. Pandangan saya lebih kepada sapek perlindungan anak jalanan. Bukan orang yang dijalan. Ada semacam komunitas yang bisa megembangkan potensi dan krativitas.
- 2. Terkait akses pelayanan. Misalnya yang disampaikan oleh teman-teman Sakti Peksos ada PKH segala macam, itu kan bagian dari upaya kita untuk mengeliminasi anak jalanan. Artinya zero anak jalanan yang kita rencanakan.
- 3. Kebijakan yang berpihak. Apakah selama ini adakah kebijakan yang berpihak kepada anak jalanan? Berpihaknya itu bagaimana memang mereka mendapatkan pelayanan sebagai orang-rang yang dianggap masalah, orang yang dibantu segera. Mungkin saja sekarang tidak ada kebijakan yang berpihak maka terombang ambing situasi ini. Maka tidak akan selesai karena tidak ada landasan hukumnya.

Anak jalanan kita satukan di kondisi dengan masyarakat sekitar. Misalnya mereka terlibat dalam hal-hal sosial dan kemasyarakatan, bagaimana masyarakat bisa menerima bahkan ada sebagian yang menjadi orang tua asuh. Walaupun butuh proses yang panjang. Juga bisa kita gunakan lembaga sosial keagamaan yang ada disekitar kecamatan maupun kelurahan. Ketika mereka ada masalah mereka menangani

		melalui lembaga keagamaan.		
7	11.15 – 11.25 WIB	1. Ada regulasi-regulasi yang harus diperbaiki termasuk di Perda No 6 Tahun 2003. Disitu tidak mengenal apapun, yang dikenal hanya pidana dan kurungan 6 (enam) bulan dan denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan juga regulasi dibawahnya tidak ada. Sama dengan waktu saya di Pertamanan, sama juga tidak ada juga regulasinya. Kalau tidak sama yang bersangkutan tidak berubah lah peraturan ini jadi tidak ada yang memikirkan siapa yang merubah regulasi ini. Harus ada hal yang jelas, apa, siapa, mengapa dan kenapa. Diperaturan kita termasuk tidak jelas, termasuk Kota Medan. 2. Contoh lain kita melakukan kegiatan SAMARATA itu ada 5 (lima) razia termasuk juga ODGJ kalau misalnya jumpa sudah lah pak kita lepas saja. Karena nanti kalau kami lapor jadi kami nanti terikut-ikut kata lurahnya. Karena kalau ada apa apa dengan pasien tersebut, lurahnya perpanggil diawal. Lurahnya bertanggung jawab atas kasus itu, bukan Dinas Sosialnya. Itukan juga tidak diatur dala ketentuan-ketentuan itu. Jadi saya berharap regulasi ini diperkuat. Bantuan PKH sudah ada, raskin sudah ada kenapa dia tidak terdata. Kenapa? Karena yang kaya di kita tidak sadar untuk mengundurkan diri untuk memberikan apa yang didapatkan sama orang yang belum dapat. Kesadaran-kesadaran seperti itu lah yag belum ada di kita ini. Jadi jumlah penduduk miskin bertambah. HARAPAN diperhatikan masalah regulasi. Di Satpol PP jadi aduan. Terhadap regulasi-regulasi berharap bidang yang pandai menangani terhadap regulasi ini kita berharap lebih cepat berkordinasi jangan tunggu UPD nya perlu. Banyak regulasi yang sangat berat. Banyak juga beberapa regulasi	Pak Doli (SATPOL PP)	
8	11.25 – 11.35 WIB	sangat berat di Satpol PP dijadikan laporan kembali. 1. Anak jalanan yang beberapa jam dijalanan, kontak dengan keluarga yang sekolah, tidak sekolah, pola penanganannya juga berbeda. Ada anak jalanan yang dikategorikan resikonya sangat tinggi. Resiko segala macam untuk mendapatkan kekerasan, eksploitasi atau bahkan mungkin akan menjadi berpotensi menjadi melakukan hal-hal	Ibu Lia Nasution (PKPA)	

- tindak kriminal. Punya kerentanan berpotensi besar untuk masuk ke hairis.
- 2. PKPA punya berbagai macam tawaran model penanganan soal yang ternyata kita evaluasi kurang nya disini, tidak era baiknya disini. Kalau di 90an rata-ratadari pemerintahan ada "Rumah Singgah" kalau PKPA tidak bilang rumah singgah, tetapi memang anak-anak sempat menginap, berkumpul, setelah kita evaluasi ini tidak benar. Ini sangat menjauhkan mereka dari keluarga, atau bahkan memunculkan kawan-kawan yang baru untuk datang. Jadi basecamp kita di terminal Pinang Baris dan Amplas. Ada satu panti asuhan yang ada di Piang Baris yang itu juga anak-anaknya justru keluar dari panti asuhan, anak jalanan yang datangnya ke kita. Pada era 2000an kita evaluasi bahwa adalah konsep rumah singgah ini tidak tidak tepat. Artinya untuk beberapa anak yang beresiko tinggi yang terlantar dijalanan mungkin butuh tempat tinggal iya. Tapi kalau bagi anak yang mempunyai keluarga tentu tidak. Tujuan kita seharusnya bisa meintegrasi kan mereka kembali kepada keluarga.
- 3. 2019 sampai sekarang kita coba kembangkan model "GOOD PARENTING" bahwa ini persoalan besar. Idealnya fungsi pendidikan ,perlindungan ini di keluarga yang dikuatkan, maka kita aan kembalikan fungsi-fungsi tadi. Anak-anak yang didampingi PKPA tidak banyak. Mobilitas anak saat ini sangat beragam. 200-350 anak di Kota Medandengan berbagai macam aktivitas dijalan. Ada yang pemulung, pengamen, pedagang asongan. Anak satu hari itu bisa berbeda-beda aktivitasnya. Pagi sampai siang sekolah, siang sampai sore mengamen. Sore sampa malam lain lagi profesinya. Ada juga yang ikut-ikutan karena tranding jadi anak siver, badut. Sekiatar jam-jam 2 atau jam jam bisa menghasilan pundi-pudi dia bisa pindah-pindah tempat ke prosi tersebut.
- 4. GOOD PARENTING harapannya di kita, untuk melihat perubahan paradigma diorang-orang tidak mudah. Perlu butuh kerjasama dari berbagai pihak. Nantinya akan menggandeng minimal pemerintah yang terkecil ada dari kelurahan. Kita mainnya ada di 3 di KP. Lalang basisnya

	1		
		di terminal, Sei Agul dan Sei Putih, pinnggiran ayahanda. Cuma kita bekum baik kerjsamanya . di Johor ada 2 tempat di Kwala Bekala. Itu juga kita melaukan pendekatan dengan kelarganaya. 5. Tahun-tahun sebelunya kita masuk lewat ekonomi membuat <i>credit opinion</i> bersama keluarga, karena bicara sama orang tua agak susah kalau tidak ada untungnya buat mereka. Apakah itu beupa makanan, ntah itu nomimal, pengetahuan itu kadang agak susah gitu kadang-kadang penguatan ke mereka. Khususnya di Kp. Lalang di tahun ini dengan kelurahannya melalui TIM. Sebenarnya kita banyak melibatkan pihak, dinas terkait, sampai ke crantika paling dekat dengan lingkungannya melalui PAR (Pola Asuh Anak Remaja) punya visi dan misi yang sama untuk melakukan pengasuhan yang baik. Pengasuhan yang baik itu tidak dilakukan degan kekerasan. Orang tua seharusnya bisa jadi pelindung bukan malah menjerumuskan anaknya, megeksploitasi anaknya jadi makin banyaak anak main banyak omset ketika semua anaknya diturunkan ke jalanan. Bagaiaman orang tua juga punya tanggung jawab. 6. Bicara Parenting bicara soal dengan <i>Gender</i> . Umumnya kalau bicara parenting umumnya ke perempuan saja, bapaknnya tidak tersentuh. Banyak dampingan kita yang ternyata pelaku kekerasannya itu di ayah. Dimana ayah melakukan kekerasan baik itu ekonomi, fisik, verbal, baik	
		megeksploitasi anaknya jadi makin banyaak anak main banyak omset ketika semua anaknya diturunkan ke jalanan. Bagaiaman orang tua juga punya tanggung jawab. 6. Bicara Parenting bicara soal dengan <i>Gender</i> . Umumnya kalau bicara parenting umumnya ke perempuan saja, bapaknnya tidak tersentuh. Banyak dampingan kita yang ternyata pelaku kekerasannya itu di ayah. Dimana ayah	
		itu kepada pasangan maupun anak. Bukan menjadi tulung punggung tetapi perempuan yang menjdi tulang punggung ayahnya lebih banyak menghabiskan waktu diwarung kopi. Tidak mudah melakukan pendekatan <i>parenting</i> ke orang tua, kami juga melibatkan partisipasi laki – laki itu juga harus punya peranan, seimbang. Harus ada kontribusi ayah sebagai pengasuhan. Kami mengajak para ayah, ibu	
		bisa menjadi model-model menjadi pendidik sebaya juga buat sebaya yang ada dikomunitas miskin tadi.	
9	11.35-	Bahwasannya keterkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja	Pak Riza
	11.45	dari rumusan masalah no 2 bagaimana upaya Pemerintah	(DINAS
	WIB	Kota Medan untuk mengantisipasi dan memfasilitasi masalah	TENAGA
		anak jalanan yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan. Dinas Tenaga Kerja memiliki	KERJA)

	T	1 1 1 1 1 1 1 1			
		beberapa program yang kami kaitkan dengan upaya untuk			
		penanganan masalah anak jalanan ini yaitu 1. Adanya program pelatihan gratis. Setian tahun kita selalu			
		1. Adanya program pelatihan gratis. Setiap tahun kita selalu			
		meanggarkan program ini dalam rangka meningatkan			
		kompetensi untuk mempermudah untuk mencari kerja dan			
		mendapatkan pekerjaan. Dari data yang disampaikan			
		Dinas Sosial ternyata kebanyakan dari anak jalanan			
		berumur dibawah 18 tahun. Ini kita keterbatasan disana,			
		karena persyaratan yang diikutkan dalam pelatihan gratis			
		itu harus beumur 18 tahun keatas, karena untuk bisa			
		masuk dalam usia kerja. Karena kalau nanti kita latih			
		dibawah 18 tahun tentu tidak bisa langsung mendapatkan			
		pekerjaan. Disampaikan UUPA yang 12 tahun.			
		MASUKKAN mungkin keluarga, atau orang tua dari si			
		anak itu bisa kita berdayakan melalui pelatihan yang ada di			
		Dinas Tenaga Kerja. Dan terikat lagi, bahwa ini khusus untuk			
		warga Medan, kalau ada yang diluar warga Medan tidak bisa			
		diikutkan dalam program pelatihan.			
10	11.45 -	Terkait dengan anak jalanan ini kalau bisa kita rangkum	BAGIAN		
	11.50	dan menjadi PERDA yang diajukan ke dinas terkait agar	HUKUM		
	WIB	mempunyai payung hukum untuk penertiban dan menjadikan			
		Medan ini indah kedepannya.			
11	11.50 -	1. Untuk permasalahan anak jalanan, belum dikaitkan dengan	Bu Adel		
	12.00	"Kota Layak Anak" dimana sudah ada Perpres No. 25	(BAPPEDA)		
	WIB	Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak			
		Anak. Di tahun 2021 Pemko Medan sudah masuk kategori			
		Median lagi berusaha untuk meningkatkan yang lebih. Jadi			
		di mohon juga untuk kajian ini dikaitkan kiat kiat apa yang			
		bisa kita lakukan untuk menaikkan kategori kita.			
		2. Terkait untuk pelayanan kesehatan yang dapat pemerintah			
		berikan di Dinas Kesehatan ada mengganggarkan ke			
		peserta itu PDIJK yang un register. Jika anak-anak jalanan			
		ini sakit atau memerlukan pelayanan kesehatan itu masuk			
		ke peserta PDIJK un register.			
		3. Untuk terkait RPS (Rumah Perlindungan Sosial)			
		sepengatahaun kami bagian Orta baru melakukan rapat			
		tentang kajian kelembagaannya. Disitu dibahas, apakah			
		nanti namanya menjadi "Rumah Singgah" karena memang			
		tidak bisa menetap untuk selamanya.			

		SARAN ibu boleh berkordinasi ke Orta sekalian penyempurnaan kelembagaannya. Memberikan saran dan masukkan supaya RPS ini seperti yang kita harapkan dan tidak sia-sia memenuhi kebutuhan di Kota Medan. 4. Perlu juga kita perhatikan SPM, karena SPM didala urusan sosial itu Kabupen/Kota mengurusi diluar panti. Mohon juga menjadi bahan perhatian kita, agar nanti kegiatan-kegiatan yang diusulkan menjadi tugas dan kewenangan Kabupaten/Kota.			
12	12.00 -	Masalah anak jalanan dari dulu sampai sekarang itu itu BAGIAN			
	12.10	terus yang terjadi. KESRA			
	WIB	1. Sebaiknya kita memberikan kesadaran kepada masyarakat,			
		khususnya anak-anak jalanan. Khususnya efek jera pada			
		saat kita tangkap sehingga mereka tidak melakukan hal			
		tersebut lagi berada di jalanan karena ekonomi.			
		2. Bagian Kesra sedang mengumpulkan data-data dari			
		Kelurahan di Kota Medan tentang Penyandang			
		Kesejahteraan Sosial. Kami siap mendukung untuk			
		memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian			
		ini.			

Informan Anak Jalanan dan orangtuanya, Panti Asuhan Anak Jalanan Gembira, dan LSM KKSP Medan

No	Instansi	Nama	Waktu	Keterangan
1.	Pedagang	Karoline	04 Juni 2022	Halo, nama adek siapa ? Karoline. Masih sekolah
	Asongan	(11 tahun)	16.06 - 16.42	kan ? Dimana ? di dekat lapangan merdeka,
				Amplas. Rumah adek dimana? Harjo Sari gang
				bakti. Adek setelah pulang sekolah langsung
				jualan ? iya. Sudah berapa lama jualan disini ?
				setahun ? dua tahun ? ada ?. dua tahun bang.
				Pernah nggak adek dirazia ? datang satpol PP
				terus nangkap gitu ? nggak pernah. Adek jualan
				disini dari jam berapa sampe jam berapa?
				Sepulang sekolah. Sampai jam ? sampai malam.
				Biasanya sampai jam berapa ? jam 9 minimal,
				jualannya tiap hari. Jadi orang ibu jualannya
				kemari iyakan? Dari rumah kesini naik apa ? jalan
				kaki, karena gak jauh. Untuk apa adek ini jualan ?
				apakah untuk keperluan sekolah ? seharri-hari untuk makan. Maaf bu sebelumnya, bapak masih
				ada ? suami ada, tapi kami lah yang mencari
				makan. Jadi bapak kerja juga? Jadi kami yang
				mencari makan karna bapak ada sakitnya. Maaf ya
				bu saya tanya lagi. Jadi udah dua tahun disini ya?
				kurang lebih ada dua tahun lah. Sama sama adek
				itu juga? Jadi adek inilah yang bantu bantu ? iya
				dia ikut bantu. Kalo misalnya lah bu ya, adek ini
				diberi kelayakan oleh pemerintah, misalnya
				membantu, bagaimana tanggapan ibu ?
				maksudnya bagaimana ini ? misalnya fasilitas
				sekolahnya . maksudnya bagian panti asuhan gitu
				? bukan panti nya. Misalnya begini bu, kalau di
				sekolah itu ada namanya bantuan-bantuan
				ekonomi, pernah gak diterima oleh adek karoline?
				pernah. Berapa jumlah bantuannya pada saat itu ?
				anak SD 450 ribu. Per berapa bu ? sekali
				setahun/setengah tahun sekali ? gak nentu, kadang
				sekali setahun, kadang setengah tahun. Adek
				karoline itu dapat ? dapat, tapi tahun ini gak dapat

				dia. Itu karena apa bu ? gak tau sih karena dari sana gak cair gitu. Jadi jualan nya ibu sama adek ini dari tengah sepuluh pagi? Pagi kalo gak sekolah, kalo misalnya libur dari pagi. Berarti kalo misalnya adek karoline sekolah ibu duluan, nanti dia nyusul. Alsan ibu jualan tadi, karena bapak tadi kurang ini ya. Tambah lagi kami kurang mampu. Jadi bu itu saja la dulu ya, maaf tadi pertanyaanya agak menyinggung tadi bu ya. Makasih bu ya.
2.	Panti Asuhan Anak Gembira	Drs. Besri Ritonga (Ketua Panti)	04 Juni 2022 13.26 - 14.17	Litbang (Penelitian dan Pengembangan) tentang kota medan, mengenai anak-anak terlantar, anak jalanan kota Medan/yang termarjinalkan. Jadi anggarannya itu ada 11 Milyar. Jadi untuk menangani hal seperti ini diperlukan tenagatenaga yang langsung bisa survey di lapangan. Jadi saya orangnya, saya setiap kali dijalan melihat anak-anak saya berhenti, kenapa dia ada dijalanan, bahkan kalo sudah keterlauan orang tua nya saya bawa kesini. Kalau misalnya diperlukan dari panti asuhan anak gembira kami siap untuk melayananinya. Pertanyaannya bagaimana progres kerjanya ke depan ? apa yang harus kami lakukan kira-kira, silahkan ? Kalo tadi kan sangat menarik juga anak yang langsung dibawa kemari, itu langsung diberikan layanan. Kalo begini pak, misalnya yang terdekatlah kita bilang Binjai. Antar panti asuhan binjai dengan disini pernah nggak bertukar ide untuk mengatasi permasalahan anak jalanan itu?. Sering, bukan pernah lagi, sering. Yang terakhir itulah satu ada anak India. Dia sudah sebatang kara, dia ditemukan mencuri gas tabung karna tidak makan, dan akhirnya dikerubungi massa dibawa ke kantor polisi. Setelah datang psikologi anak, kenapa sampai berbuat demikian, karna tidak makan gak ada yang memberi makan. Dia tidur di mesjid, rumah kosong dan pemerintah daerah tidak memperhatikan itu, dinas sosial setempat tak memperhatikan itu, nah ketika terjadi insiden tadi baru heboh. Sampai dia di dinas sosial langkat, ditanya ke panti setempat gak ada yang menerima. Walaupun dia masih dibawah umur, fisik dia

kekar, merokok, bahkan sudah berganja, tidak terkontrol. Nah dicarilah siapa di medan, oiya pak ritonga ada. Dibawa kesini. Saya sampai hari ini belum pernah menolak. Sampai sekarang masih disini pak ? tidak. Disini hanya bisa sebulan setengah. Ada jangka waktu ya pak? bukan. Yang buat dia bejangka adalah dirinya sendiri, karna ada kasus. Kita buat pelatihan, kita buat kelas, kita kasi makan, tidur, nah dia mulai mengulah, dia harus merokok. Yang bikin kita takut, dia tau pulak yang mana yang jual narkoba. Makanya kita kasi tau jangan. Maaf pak itu yang dimonitor ada foto anak-anak, mohon maaf pak itu asalnya darimana ?apakah mereka ditipkan atau jumpa di jalan?. Ada yang dititipkan ada yang kita jemput di jalanan. Contohnya ini namanya Paulus, ditinggalkan ibu nya disini, disewakan kamar, kamar ini sewanya satu bulan 300 ribu, disewa sama ibunya, anaknya 2. Dikasi masuk jendelanya terbuka tapi dia kunci dari luar, setiap harinya dia dikasi nasi bungkus lewat jendela. pergi, Makanlah anaknya. Tapi entah bagaimana sudah 10 hari mamanya gak pulang-pulang. Nah anak ini udah tekecing 3berak, bau lah. Abis itu dikasi tau ke dinas sosial. Waktu itu Paulus umur berapa pak ? tiga tahun lebih, dan gatau apa-apalah. Saya abis itu ditelpon kepala dinas langsung. Eksekusi pak, yaudah saya bawa langsung ke rumah sakit. Mencret 10, di infus la dia selamatla dia, nah abang nya gak selamat, terganggu. Bagus kian ngomong, tapi begitu dia selesai yang sakit itu karna demam sangat tinggi jadi payah ngomong. Jadi dia abangnya lain pulak, abangnya hutabarat dia simanjuntak. Kata nya ini 5 bersaudara ada napitupulu, ginting dll. Jadi mamanya profesi. Jadi sampai sekarang itu profesinya.

Lalu pak, biasanya pelayanan yang biasa diberikan di panti pak? yang pertama adalah kesehatan. Ini aku lagi mencari anak ini, karena disuruh mamanya mengamen tidur di indomaret namanya si Andira, sampai disini kita kasi dia makan, mandikan dua kali sehari. Sudah disekolahkan kembali sudah bagus. Nah begitu datang dijemput mak tirinya ini, yang nyuruh dia jualan dan tidur

di indomaret. Lari lah dia. Sampai sekarang kami gatau dimana dia. Itulah contoh kasus sekarang yang sedang kita tangani. Ini saya bilang ke orang gojek kalo ketemu kabari saya. Dan ini sudah lapor polisi, dinas sosial untuk diadakan sesi konferens bertujuan untuk dinas sosial membuat surat keputusan kepada kita, agar anak ini menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Karna ibu aslinya sudah meninggal, bapak aslinya sudah dengan ibu tirinya. bercerai Ibu tirinva memperlakukan dia untuk cari uang. Tidak dikasi makan. Murni eksploitasi, ini sedang berjalan kasusnya.

Jadi jumlah anak disini ada berapa pak? Anak disini dengan anak kami ada 21. Jadi keseharian rutinitas mereka apa pak ? seperti kita dengan orang tua kandung. Jadi dari A – Z bagaimana kita diperlakukan ayah ibu kita, itu lah kami lakukan sama anak ini.

Pak biasanya pak permasalahan di panti seperti apa pak, apakah fasilitas, sumberdayanya, anggaran, apa yang menjadi kendala la gitu pak? Kalo kendalanya tuhan itu adil, dia ciptakan manusia yang berbeda-beda dia ciptakan anak satu sifat, satu karakter. Jadi kalo anak kita, ada 3 karakter yang harus kita ikuti. Kalo tadi dia karakternya normal, saya bilang ini karakternya parah, tapi coba kita tekan supaya karakter itu terbentuk.

Kita tau ini pemko Medan ini tidak punya panti khusus, jadi semisalnya kita kaitkan dengan Medan sebagai kota layak anak, bagaimana tanggapan bapak? belum layak. Dasarnya apa pak? kelihatannya penghargaan itu diberikan secara kedekatan emosional bukan berdasar fakta di lapangan, kalo fakta di lapangan jujur ya. Jadi peran pemerintahnya belum? bukan pemerintah, peran petugas, SDM nya tidak maksimal.

Jadi sarannya seperti apa ? alangkah bahagia nya kami jika pimpinan panti dilibatkan kami bekerja sama. Jika ada anak dibawah umur, kita yang konsul kenapa dia ada di jalanan dll. Tapi ini pekerjaan yang berulang ulang terjadi bahkan ada yang mengorganisir. Jadi ada orang sekarang

buatan yang kemarin sama besok besoknya sama. Itu barista tadi. Jadi itu saran dari kami KKSP Maman 04 Juni 2022 Saya mulai ya pak ya, pertama yang sekarang kita					diangkutnya ditempat, di tembung sana dibawanya ke marelan sana. Tujuannya kita gatau untuk apa, itulah salah satu contoh. Makanya saran saya tadi libatkan lah pimpinan panti asuhan. Yang terakhir perhatikanlah anggarannya, panti asuhan di kota medan ini tidak ada yang dapat jatah dari pemerintah dari 2015, sebelumnya ada, Rp. 2.100/hari per anak. Itu gak ada alasan pak? misalnya subsidi itu udah gak masuk lagi ke panti begitu? maaf saja dari 2015 berapa walikota yang masuk kelas. Mungkin anggarannya ada tapi kita tidak tau kita kemana. Jadi sebenarnya panti asuhan dengan pemko itu sudah ada hubungan? harusnya. diuapkan gak ada yang kelihatan. Jadi pak, penelitian ini sebenarnya menjadi media lah, mudah mudahan didengar walikota semua perangkat yang ada disitulah, harapan bapak seperti apa. Harapan saya untuk anak jalanan yaitu, SDM nya itu ada pelatihan, jadi siapa yang bertugas ke lapangan berikan pelatihan, dan tolong libatkan kaula muda, ada banyak generasi kita yang siap bekerja bukan harus digaji mengabdikan diri untuk menangani anak jalanan dan beri pelatihan ke mereka. Dan menangani anak tersebut. Bayangkan temuan kami dari helvetia ada 7 ibu yang menyewakan anaknya. Jadi bukan hanya menangkap anak dijalanan, jadi mengerti asesmennya, jadi mengerti kasus per kasus orang yang menangani mengerti solusinya. Saran saya beri pelatihan kepada mereka yang menangani anak di jalanan. Yang kedua, bawalah anak jalanan itu ke posko yang benar, bukan dibawa ke dinas sosial, tetapi bawalah ke panti, jangan hanya diantar kasilah anggaran nya, kan beli sabun pake duit juga. Dan yang terakhir berilah mereka harapan, perdayakan. Jadi barista kopi. Ada gojek mau mesan kopi, dia gamau dibuatin sama orang yang berbeda, dia maunya
3 KKSP Maman 04 Juni 2022 Saya mulai ya pak ya, pertama yang sekarang kita					yang buat dia kemarin karna rasa kopinya sama buatan yang kemarin sama besok besoknya sama.
1 main juju 1 no 1000 ma amam mi pak ya momona yang matak	3	KKSP	Maman Natawijaya	04 Juni 2022 14.54 – 15.36	Saya mulai ya pak ya, pertama yang sekarang kita tau umum lah pak ya fenomena yang marak

(Direktur	umunya di kota Medan itu banyak sekali anak
Eksekutif)	jalanan berbagai profesinya, ada yang jadi
	manusia silver, jual kipang dll. Jadi menurut
	abang sendiri bagaiman dengan hal ini ? apakah
	mereka perlu diberikan pelayanan atau hal lain
	menurut bapak khususnya anak yang dibawah
	umur. Baik kalau terkait dengan anak jalanan,
	anak jalanan inikan ada dua jenis, anak jalanan
	yang offline dan online. Offline maksudnya
	rumahnya masih di dekat situ. Nah kalau online.
	On 24 jam di jalanan, mungkin anak yang diliuar
	kota Medan. Nah terkait dengan fenomena
	manusia silver, sebetulnya itu hanya alat cara
	mereka bertahan hidup, karena manusia silver ini
	hanya anak-anak saja ada juga yang sudah
	dewasa, malah anak- anak yang dibawah umur
	malah jadi badut. Tapi semuanya itu adalah cara
	mereka bertahan hidup, besok-besok mungkin
	mereka bisa merubah cara lagi yang apa kita gak
	tau, jadi sesuatu yang aneh, karna itu adalah cara orang bertahan hidup.
	• •

Nah pak, apakah KKSP sendiri ada melakukan program yang bersinggungan dengan anak jalanan tersebut? ada, tapi tidak secara rutin. Kami tidak memiliki mungkin lembaga lain punya ya, programnya sudah selesai setahun yang lalu, program inklusi namanya bagaimana mendorong agar kehadiran mereka diterima oleh masyarakat, artinya kehadiran anak jalanan dalam mengakses kesehatan, pendidikan, itu tidak didiskriminasi, ya upaya itu juga dengan pemerintahan kota medan tapi program itu selesai nah program selanjutnya tidak pendamping secara rutin mendampingi anakanak yang ada di belakang ace hardware biasanya mendampingi anak-anak dibelakang sana.

Apa yang bapak pandang dari kebijakan pemerintah khususnya kota medan tentang anak jalanan ini? sebenarnya anak jalanan sama dengan anak-anak kita, tinggal bagaimana pemerintah kota Medan itu adalah membuka akses seperti program inklusi kami bagaimana pemerintah secara aktif untuk menyediakan fasilitas kepada anak-anak itu artinya akses mereka ketika pendidikan kesehatan, itu kan mereka tinggal

disini tu, jadi akses mereka ke kesehatan itu mesti dipikirkan untuk dibantu, walau kemudian ini berkaitan dengan administrasi tentang KTP atau apa. Tapi kita harap pemerintah melalui kepling nya bertanggung atas wilayah masing-masing, itu sudah kami lakukan dan bekerja aktif ya, katakanlah pembinaan, pendataan kepada anak jalanan itu termasuk penerimaan mereka bahwa anak jalanan itu tidak kriminal. Nah ini memang perlu keterlibatan terutama yang dekat dengan mereka yaitu kepala lingkungan untuk aktif. Pendekatan nya ya dirangkul bukan dirazia atau diusir. Secara rutin mereka dilakukan pertemuan entah dilakukan aktifitas positif. Jadi jangan menunggu juga ada kejadian baru dilakukan razia. Pak kalau misalnya pemerintah kota Medan itu kan belum ada panti khusus untuk perlindungan, jadi kalau seandainya pemerintah membangun panti, rumah perlindungan sosial untuk anak jalanan itu bagaimana tanggapan bapak soal itu? Ya baik cuman butuh kerjasama ya bagaimana untuk mendesain rumah panti yang seperti apa, mekanisme, manfaat nya yang seperti apa dan semua orang harus tau terutama keterlibatan khususnya tingkat lingkungan agar mereka memahami ada rumah panti, sehingga jika terjadi kejadian-kejadian itu mereka tahu sistem rujukan nya harus jelas artinya baik itu menunjukan tanggung jawab pemerintah kota Medan.

Kalau bicarakan kebijakan ya, itu kan anak- anak jalanan itu dirazia untuk diamankan lalu diturunkan ke suatu tempat, nah kalau dari kebijakan seperti itu apa yang bisa ditawarkan oleh bapak supaya hal semacam itu tidak terjadi lagi karena itu kurang tepat lah kita bilang. Ya pendampingannya secara rutin jadi jangan ketika ada masalah baru dirazia, artinya harus secara rutin seperti yang dilakukan oleh para LSM, terjadwal melakukan komunikasi kepada anakanak, diajak beraktifitas, seperti pengetahuan tentang pendidikan, narkoba dan sebagainya dan dilakukan rutin.

Supaya legitimasinya itu kuat dalam menangani permasalahan anak jalanan, kira-kira menurut

bapak perlu kah kita membuat perda yang bekerjasama antara pemko, LSM dan sebagainya? ya itu penting untuk keperluan semua pihak ya, baik pegangannya LSM itu sendiri maupun para kepling-kepling dan PPKK nya perlu dilibatkan juga harus jelas ini. Keplingnya juga harus jelas punya payung hukum supaya dia bisa kerja. Jadi keterlibatan lurah juga semua sama persepsinya jadi anak jalanan bukan kriminalitas yang harus diperangi. Keterlibatan lingkungan itu penting. Selama ini pak apa yang menjadi kendala LSM sendiri sehingga agak sulit lah menyelesaikan permasalahan anak jalanan, apakah soal program/anggarannya/SDM. Apa yang menjadi kendala?. ya itu semua, tapi kan itu LSM itu hanya suporting ya, kewajiban ini kan negara, jadi tanggung jawab itu ada di negara. Dan sesuai dengan UUD perlindungan anak, tanggung jawab untuk perlindungan adalah negara. Kita LSM, kita semua masyarakat sipil hanya membantu, bukan mengganti peran mereka, dan tadi soal anggaran, SDM, kita kan terbatas uang dari mana kita bukan negara yang punya PDB, punya anggaran tetap begitu. Kalau ada donatur bisalah kita buatkan program kurun waktu 12 bulan tapi kan terbatas, 2 tahun nah yang punya uang tetap kan negara. Kalau untuk merancang kegiatannya bagus itu tadi dibicarakan bersama uang nya negara baru KKSP apa, PKPA apa berbagi tugas begitu. Tapi payungnya tetap negara artinya kita menggantikan peran negara yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Apakah memungkinkan menurut bapak adanya koordinasi antara dinas tenaga kerja, dinas sosial atau dinas lainnya, universitas, LSM dan sebagainya. Sangat mungkin, tapi semua harus koordinasi.

Nah apakah memungkinkan juga pak semua badan melakukan pelatihan? Sangat, mungkin selama ini juga sudah seperti itu sebenarnya dan sebenarnya banyak lah artinya kalau sekarang ini udah gadak masalah sih hubungan pemerintah, NGO, LSM, sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Jadi harapan bapak yang mewakili KKSP terhadap

	anak jalanan ini termasuk pada pemerintah supaya masalah ini selesai, walaupun tidak seratus persen selesai ? jadi bukan membuat kota ini bersih dari anak jalanan, tapi payung hukum fasilitas, kejelasan pelayanan, SDM, semua perangkat
	pemerintah itu harus jelas untuk menaungi.

DISNAKER dan BPS Kota Medan.

No	Instansi	Nama	Waktu	Keterangan
1.	Disnaker	Timbul	08 Juni 2022	Begini pak, fenomena yang terjadi begitu banyak
		Antonius,	13.35-14.15	dijalan, banyak sekali anak jalanan yang berprofesi
		SH		sebagai manusia silver, mengamen, dll. Apakah menurut
				bapak sendiri ini seperti pemandagan buruk seperti
				pemandangan bunga liar, atau seperti apa pak?
				Secara organisasi bahwa sebenarnya kami tidak masuk
				kategori usia kerja, bahwa sebenarnya mereka tidak diminta, kasarnya sebenarnya mereka sekolah bukan
				kerja, jadi ketika ada seorang anak yang ada dijalanan,
				ya kita seharusnya menuntut mereka untuk tidak kerja
				karena usia kerja itu usia 15 tahun-64 tahun. (pandangan
				secara organisasi). Tapi kalau secara pribadi, itu
				fenomena termasuk manusia silver atau badut, dari segi
				hiburan juga tidak. Karna sudah pernah bertugas di
				sosial saya tidak pernah memberi karena saya sudah tau
				sistemnya terorganisir dan ada sistem setoran dan yang
				herannya dulu, waktu razia sebelum 2017, karna
				berpisahnya 2017 sosial dan tenaga kerja, itu kalo hakikatnya anak kecil sekolah dan orang tua nya yang
				bekerja. Bahwa ketika kami angkut mereka kami suruh
				tinggal di panti, tapi orang tua nya bisa bebas, melihat
				ataupun menengok. Karena kata orang tuanya bilang
				tidak sanggup lagi alasannya seperti itu, tapi orang
				tuanya gak mau. Mereka tetap mau ke jalan, artinya itu
				sudah suatu habit la kita katakan dan mereka menikmati
				itu, beberapa yang kami minta keterangan yang bekerja
				sama dengan kepala lingkungan tapi mereka tidak mau,
				mereka ingin tetap dengan orang tua dan mereka tetap di
				jalan dengan keadaan di jalan yang serba bebas. Jadi
				memang ada faktor di dalam diri mereka yang terus ke
				jalan begit pak?
				Ya ada, karna satu masalah mereka tidak terbiasa
				dengan lingkungan yang seperti itu. Lalu pak ada kebijakan dari kota Medan (Perwal 6 tahun
				2003 tentang larangan menggelandang dan mengemis di
		L		2005 tentang larangan menggerandang dan mengerins di

Medan) bagaimana bapak memandang hal ini? Kalo saya melihat ada perwal aja seperti ini apalagi tidak ada, sebetulnya kan keputusan wali kota dan perwal ini kan senjata. Jadi pak mandeg nya ini dimana, apakah pelaksanaannya atau gimana pak? masalah nya pelaksanaannya oke, buktinya sosial selalu ada tindakan razia. Artinya begini, misal saya dilarang minum ini peraturan dilarang minum. Yasudah selesai. Bagaimana caranya orang tidak minum itu yang mungkin kekurangan itu yang kurang di pembinaannya, kalau hanya sekedar larangan yang terjadi adalah razia-razia dan razia lagi, bagaimana agar orang tidak minum itu yang mesti kita cari solusinya sama seperti orang menggelandang, tapi bagaimana supaya orang tidak menggelandang, itu yang jadi tanda tanya besar. Anggaplah keputusan walikota ini tentang larangan, seharusnya ada satu peraturan walikota lagi yang berisi tentang pembinaan. Saya dulu pernah jadi kasubbag program, saya waktu itu dulu dirapatkan kepala dinas sosial, kami ditanya apakah disnaker siap melaksanakan pelatihan bagi warga atau orang-orang yang dijalanan. Kami siap asal memenuhi syarat, tapi terus terang pak sekda saya dulu itu di DISOSNAKER, mereka selalu ingin melarikan diri ketika kami ingin rehabilitasi, nah sekarang kita harus bisa membuat grand desain bagaimana cara menanggulangi gelandangan, anak jalanan. Misalnya kami latih, latihan tambal ban, dikasilah kompressor jangan pulak dijual kompresornya. Jangan pulak kami melatih sesuatu yang sia-sia, karna sudah terdoktrin, sama seperti yang saya bilang diawal dia sudah menikmati alam yang seperti itu, bagaimana caranya situasi lingkungan itu dia tidak menikmati lagi. Tolonglah dinas sosial membuat grand desain, bagaimana supaya orang- orang di jalanan bisa terindokrinasi bahwa ini bukan tempat yang nyaman. Jadi beberpa faktor yang membuat orang menjadi anak jalanan seperti faktor ekonomi, sosial dll, tanggapan bapak seperti apa? Faktor ekonomi betul dan itu tidak termasuk bagi anak punk. Tapi bukan faktor dominan. Artinya faktor ekonomi memungkinkan tapi bagi saya tidak terlalu besar, yang pasti adalah faktor keluarga, artinya keluarganya ingin cara yang gampang, cepat. Saat ini Medan belum memiliki panti khusus terkait anak jalanan, tanggapan bapak seperti apa pak? Grand desaian dahulu, jangan kita pelatihan yang kurang matang. Yang penting adalah bagaimana panti itu, paling tidak rumah singgah, tapi sambil dikasi indoktrinasi. Kalo bisa ada di selter-selter tiap

2	Badan Pusat Statistik (BPS)	Julroi Perangin angin	08 Juni 2022 15.28-15.45	kecamatan untuk pembinaan-pembinaan. Dibuatkan kegiatan-kegiatan yang menyenang, artinya ketika orang senang, kegiatan yang dilakukan itu masuk. Jadi menurut bapak bagaimana agar supaya tingkat kepercayaan mereka itu tumbuh supaya tercapai kreatifitas yang diinginkan tadi? Sebenarnya ujung tombak dari yang paling apa adalah kepling, saya bilang katakan dari keluarga, anaknya bukan tidak percaya kepada pemerintah, tapi orang tua lebih percaya kepada kepling, artinya masuk kepada yang ingin dicapai. Memungkinkan tidak pak membuat perda untuk menangani anak jalanan? Perda perwal itu hanya tools, lebih kepada praktik yang perlu diterapkan, jadi harus ada perencanaan teknis. Kalau menurut bapak, ada misalnya kerja sama baik itu dari kampus, UMKM, dalam menangani masalah ini, misalnya dari UMKM mereka bisa diberi pelatihan? Bisa tapi dengan catatan sudah masuk di usia kerja, cuman permasalahannya itu. Harapan bapak baik instansi atau pribadi terhadap permsalahan ini? Secara organisasi siap membantu, dengan grand desain yang lebih matang. Fenoma yang terlihat sekarang ini banyak sekali anak jalanan yang dikatakan untuk mencari makan nya, ada yang menjadi manusia silver, pengamen dll. Memandang fenomena ini menurut bapak seperti apa? Inilah yang namanya fenomena di urban seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan nya. UUD menyatakan negara harus memberikan penghidupan yang layak kepada warga negaranya. Medan pada tahun 2003 Medan mengeluarkan SK perwal no 6 tentang larangan tentang menggelandang dan mengemis di kota medan. Ini bisa dikatakan kurang efektif karena kurang koordinasi antar OPD yang bersangkutan. Jadi pak apakah OPD nya kurang koordinasi atau memang pelaksanaannya ini? Karena saya tidak disitu, jadi saya tidak bisa membilangkan kurang koordinasi, tapi yang jelas kalo memang itu perwal itu sudah ada, tentu ada satpoll PP yang tugasnya itu tentu adalah menegakkan perda atau nerwal
				memang itu perwal itu sudah ada, tentu ada satpoll PP

relatif, dari tahun 2010-2020.

Jadi menurut bapak faktor yang melatarbelakangi tumbuhnya anak jalanan ini seperti apa pak ?

Saya kebetulan bukan pengamat anak jalanan, jadi saya tidak punya preferensi yang spesifik kenapa munculnya ada anak jalanan, menurut saya itu harus dikaji dengan analisis kuantitatif yang hasil kajiannya lebih mendalam, jadi bukan opini yang dipakai tetapi hasil kajian.

Beberapa lembaga, apakah memungkinkan terjadi koordinasi antar lembaga, menjadi wadah untuk menangani anak jalanan?

Ya sangat mungkin, tapi kan itu tergantung kemauan, kalo kita mau itu semua bisa dilakukan, tinggalkan. Kemauan itu kuncinya.

Medan ini kan belum memiliki panti khusus, jadi perlu tidak kita memiliki panti khusus tersebut untuk menangani anak jalanan tersebut ?

Saya tidak mau berandai-andai, tapi kalau kita memiliki riset yang mendalam tentang asbabun nuzulnya, tentang anak jalanan ini tadi, maka kita punya solusi yang bernas. Tapi kalau kita punya riset yang mendalam tentang anak jalanan ini, dari situ kita baru punya solusi. Jadi jangan kita langsung ke solusinya.

Kalau panti milik pemko itu kan gak ada ya pak, mungkinkah pemerintah kita koordinasi dalam mewacanakan ini/atau mewujudkannnya?

Saya tidak bisa memberikan jawaban yang mengenakkan tapi harus based on data. Wong datanya aja saya tidak punya kok, datanya gak ada data penelitian mengapa orang medan menjadi anak jalanan kita tidak punya kok. Kenapa kita harus bicara tentang rumah singgah oleh pemkonya.

Misalnya yang lebih tinggi begitu, menurut bapak memungkinkan tidak membuat perda yang isi nya kerjasama tentunya antar pemerintah regional sumut dalam menangani anak jalanan tentunya pak?

Kalau kamu tanya mungkin, sangat mungkin.

Menurut bapak dampaknya seperti apa misalnya jadi? Artinya kasus anak jalanan ini bukan hanya kasus satu kabupaten atau kota. Makanya saya bilang tadi kita harus punya datanya dulu yang bernas, baru kita bicara ke depannya. Jangan bicara ke depan dulu dari dipaksakan kita ke belakang. Contoh, anak jalanan ini kan bukan hanya di Medan, kota medan ini kan dikelilingi deli serdang, tentu kerja sama ini akan jadi lebih baik dari pada hanya sendiri.

Harapan bapak terhadap penanganan anak jalanan pak? Harapan saya, kembalikan ke regulasi yang ada artinya ada sebenarnya regulasi tentang anak jalanan, tapi di sisi

	lain	pemerintah	juga	harus	bertanggung	jawab
			gan pek	terjaan (dan penghidupa	n yang
	lebil	ı layak.				

Balitbang Kota Medan.

No	Instansi	Nama	Waktu	Keterangan
	Badan	Titri	02 Juni 2022	Seperti apa ibu memandang Pemerlu
1	Penelitian dan	(Sub	13.00 -13.25	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ini,
	Pengembangan	Koordinator	WIB	anak jalanan di Kota Medan ini, apakah
	Kota Medan	Perencanaan		seperti bunga liar yang merusak
		dan		pemandangan, atau seperti manusia yang
		Keuangan)		membutuhkan pelayanan? PPKS itu perlu
				karena ada pembinaannya, gak hanya
				diambil dari jalanan kemudian diletak di situ
				terus dikeluarkan lagi kan gak ada
				dampaknya, perlu sih itu menurut saya.
				Kebijakaan saat ini Perwal Kota Medan No.6
				Tahun 2003 tentang Larangan
				Menggelandang dan Mengemis di Kota
				Medan bisa dikatakan tidak efektif dan tidak
				ada koordinasi diantara OPD yang
				bersangkutan seperti Dinas Sosial, Satpol
				PP, Kecamatan atau Kelurahan, tanggapan
				ibu seperti apa? Sebenarnya bukan kurang
				efektif, tapi karena kurang pembinaan,
				setelah itu kan tindak lanjut tidak ada lagi
				arahnya ke mana, hanya sekedar begitu saja.
				Seperti Satpol PP pekerjaannya sudah bagus,
				sudah dilakukannya, tapi kan perlu juga rumah semacam pembinaan kepada anak
				jalanan ini, tidak hanya sekedar dimasukkan
				ke tempat ini, harus ada berkelanjutannya
				ada bagi mereka, mereka kan juga butuh
				makan kan di situ, kita kan gak hanya
				meminta bersihkan ini kota, orang ini
				bertolak darimana harus ada juga
				pembinaan-pembinaan agar mereka tetap
				hidup, penampungannya seperti apa, itu
				sebabnya PPKS diperlukan. Tapi gak rumah
				singgah saja ya, harus ada program
				pembinaannya.
				Beberapa faktor yang membuat orang
				menjadi anak jalanan diantaranya, faktor

ekonomi, keluarga, lingkungan, sosial, dan ekonomi, nah bagaimanatanggapan ibu mengenai hal ini? Memang iya, menurut saya yang paling utama adalah faktor ekonomi, mungkin membantu orangtua, kedua lingkungan juga berpengaruh penting, keluar juga mungkin saja dia tidak senang berada di rumah, dia ke jalan akhirnya. Ujungnya adalah ikut bersama kawan-kawannya menjadi anak punk gitu ya atau ada komunitas tersendiri.

Semuanya saling berkaitan satu sama lain, faktor utamanya menurut saya itu ekonomi dan keluarga. Seperti yang kita tahu bersama, Pemko Medan dalam hal ini belum memiliki Panti

Khusus untuk anak jalanan, apakah perlu dibuatkan hal tersebut karena ini berkaitan dengan Medan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Ini bukan persoalan layak tidak layak ya, mumpuni tidak Kota Medan melakukan hal tersebut, karena kan harus ada kriterianya juga, yang mesti ditampung di situ tidak hanya masuk ke situ, dicomot begitu saja. Anak-anak itu bisa menjadi

anak jalanan karena beberapa faktor tadi, ujung yang mana kan, kalau ujung nya hanya untuk memindahkan mereka ke panti tidak ada gunanya juga. Ini kan untuk kepentingan mereka juga, karena mereka ini sebenarnya bisa menjadi seperti ini gitu, cuma memang mereka harus mempunyai wadah untuk mengembangkan reativitas mereka. Saya kira Panti Khusus itu perlu juga, tapi tergantung kebutuhannya juga sih. Saran ibu seperti apa terkait penanganan

PPKS khususnya anak jalanan? Paling utama sih menurut saya adalah pembinaan, karena dengan pembinaan ini, anak jalanan itu saya kira hidupnya akan lebih terarah khususnya menyangkut masa depannya. Model yang diterapkan hingga hari ini Perwal Nomor 6 Tahun 2003 adalah pendekatan hukum, dinilai ini kurang efektif dalam penanganan

PPKS khusus anak jalanan, tanggapan ibu seperti apa? Saya kira bukan kurang efektif ya, ini harus kembali kepada pembinaan tadi, bila anak jalanan tadi ditangkap, lalu kemudian dikeluarkan lagi, kerjaan kita kan gak siap-siap, saya sih cenderung untuk menekuni di bidang pembinaan itu. Terdapat beberapa pelayanan, diantaranya panti asuhan atau non panti terhadap penanganan anak jalanan, kira-kira menurut kelebihan dan kekurangan ragam pelayanan tersebut menurut ibu dan bagaimana pendapat ibu mengenai penanganan berbasis Sebenarnya masvarakat? lebih dimasukkan ke panti dibina terlebih dahulu, setelah dianggap sudah matang untuk kembali ke masyarakat, baru lah Daripada dibiarkan diperbolehkan. lalu dipanggil sebentar, dibina bentar sepertinya kurang efektif. Menurut Ibu metode dan sistem seperti apa yang harus diterapkan Pemko Medan dalam menangani anak jalanan ini? Saya kira perlu untuk membangun Panti Khusus kota ya, lalu ditelusuri dahulu anak jalanan ini, kalau tidak memiliki rumah masuk kan mereka ke panti itu untuk dibina. Memungkinkah ibu membuat Perda dan bekerjasama dengan daerah lain di SUMUT yang kegiatannya berupa pendidikan, pelatihan, pengembangan kreativitas, untuk jalanan seperti Medan dengan Binjai? Iya, kalau begini terlebih dahulu dibicarakan antara Medan dengan Binjai. Artinya membangun kerjasama dalam penanganan anak jalanan, kalau anak jalananannya berasal dari Binjai terus datang ke Medan, apakah dia mesti dibalikkan ke Binjai begitu ya, saya kira memungkinkan membuat Perda itu. Memungkinkah ibu ada koordinasi antara dinas sosial, universitas, UMKM dan lainlain untuk memberikan pendidikan formal maupun non-formal dan latihan kepada anak jalanan ini? Harusnya bisa ya,

	Iranana kita Iran mammunyai mua guam nan aana
	karena kita kan mempunyai program rencana
	lima tahun, antara perangkat daerah kita
	harus bekerja sama, tetapi terlebih dahulu
	mengirim usulan tertulis lalu kemudian
	dikaji pada tahun tertentu, sesuai kebutuhan
	kita, atau selama lima tahun ini. Berarti
	memungkinkan sharing antara dinas yang
	lain dan harus berkelanjutan. Masukan ibu
	seperti apa kepada anak jalanan ini? Kami
	sih ingin membersihkan mereka sesuai
	aturan, bukan dibuang begitu saja ya, tapi
	kami ingin mereka tidak kembali lah ke
	Medan ini dengan kegiatan yang sama
	mestinya yang lebih positif lah
	ya.

Dinas Sosial Kota Medan

No	Instansi	Nama	Waktu	Keterangan
1.	Dinas	Lamo	Juni 2022	Adakah syarat lain untuk mendirikan panti?
	Sosial	Tobing	14.00-	Ada, banyak. Syaratnya yang pasti akta notaris, SK
	Kota	(Pengelola	14.10	kementerian hukum dan HAM, surat domisili panti,
	Medan	Rehabilitasi		struktur organisasi, rekening yayasa, NPWP, foto
		Sosial)		kegiatan.
				Pandangan bapak terkait banyaknya anak jalanan di
				kota Medan ini seperti apa pak?
				Yang namanya anak jalanan di kota Medan ini
				sudah bukan rahasia umum lagi, yang namanya
				anak jalanan di pusat ibu kota ini tidak akan ada
				habis. Satu ya mungkin pastinya karena ibu kota,
				rasa iba orang Medan tinggi. Kalau dari data yang
				kami buat anak jalanan ini, 70% bukan dari Medan,
				ada yang datang dari Deli Serdang, dll. Jadi tidak
				semua memang yang kami tertibkan itu berasal dari
				Medan.
				Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi
				dan memfasilitsi anak jalanan ini?
				Yang pasti, kewalahan itu pastinya, Medan tidak
				memiliki wadah atau penampungan. Karena Medan
				tidak boleh mendirikan yang namanya panti jadi
				solusinya adalah kita ini sedang membuat rumah
				persinggahan sosial, tapi hampir mirip seperti panti.
				Lalu ada pelatihan pemberian keterampilan untuk
				anak jalanan, namun setelah covid melanda itu tidak
				ada lagi, kemarin katanya efisiensi anggaran,
				sehingga kami tidak ada lagi namanya memberikan
				pelatihan keterampilan kepada anak jalanan.
				Panti itu bang, ada gak laporannya ? misalnya ada
				anak baru atau kegiatan-kegiatan nya ?
				Ada. Semua kegiatan nya dilaporkan karena kita
				memberikan surat izin, jadi kita harus tau seperti
				apa perkembangannya.
				Siapa saja yang berhak tinggal RPS nya bang?
				Mungkin karen kajian akademiknya belum selesai,
				makanya belum diresmikan oleh pak wali.
				Mungkin nanti ada SOP nya karena bukan hanya
				untuk anak saja, bahkan untuk yang gangguan jiwa
				ada disitu.
				Apa yang menjadi ukuran dinas sosial sendiri
				terkait penanganan anak jalanan? Lalu bantuan apa

yang diperlukan dinas sosial dari instansi lain?
Untuk kedala yang begitu berat tidak ada. Kalo untuk instansi lain diluar dinas sosial sepertinya bagus, jadikan di produk hukum kita belum ada produk langsung dalam menangani anak jalanan. Lalu untuk bantuan-bantuan kami ada kok untuk kemudian diberikan ke lembaga nya, karena ada dana rutin tiap tahunnya dari kota Medan. Cuman untuk bantuan langsung ke orangnya atau individu

Apa saran dan harapan bapak terkait anak jalanan dan kebijakan yang dibuat oleh pemko?

itu tidak ada ya.

Saran saya pribadi, karena memang di Medan ini tidak ada peraturannya yang khusus dalam mengatur penanganan anak jalananan, kiranya ke depan kalau bisa ada lah produk hukumnya. Yang kedua, masalah rumah perlindungan sosial, karena kajian akademis dan kendala lainnya semoga cepat progresnya untuk selesai, sehingga untuk penanganan ke depan kami bisa lebih cepat. Jadi kendala kemarin yang tadi lupa saya bilang juga. Kalau anak jalanan ini kan mereka 90% memiliki keluarga, jadi karena memiliki keluarga kami tidak bisa serta merta kami bawa ke panti, cuman kami membuat datanya dokumentasi memang anak ini dua tiga kali kami tertibkan kalau memang orang tuanya tidak sanggup mengarahkan anak ini, membimbing, mengarahka, menafkahi, lebih baik serahkan ke kami.

Dinas Pendidikan Kota Medan

No	Nama	Instansi	Waktu	Keterangan
1.	Ismail	(Dinas	09.36-10.10	Bentuk kerjasama Dinas Pendidikan dengan
	Marzuki	Pendidikan)	WIB	instansi lain terkait menangani anak jalanan
	Siregar	Kepala		dan pelayanan apa saja yang diberikan Dinas
		Pembinaa		Pendidikan? Selama ini belum ada laporan
		PAUD dan		anak jalanan atau belum ada kontak secara
		Pendidikan		langsung antara anak jalanan dengan Dinas
		Non Formal		Pendidikan hanya saja Dinas Pendidikan ada
				program PNF (Pendidikan Non Formal).
				Pendidikan Non Formal ini diperuntukkan
				kepada anak yang tidak berkesempatan untuk
				mengecam pendidikan formal. Pendidikan
				Non Formal itu ada 2 (dua): Pertama bagian
				LKP (Lembaga Khusus Pelatihan) dan yang
				satu lagi PKBM (Pusat Kegiatan Belajar
				Masyarakat) itu lah yang disebut dengan kejar
				Paket A, Paket B, Paket C. Inilah program
				kita yang menangani anak yang putus
				sekolah, tapi masih ingin mendapatkan
				layanan pendidikan secara non formal. Kata
				non formal, tetapi tetap melakukan kegiatan
				belajar mengajar seperti biasa. Cuma kalau
				PKBM inikan banyak teknik belajarnya. Ada
				yang berupa modul, ada yang beruba
				pertemuan langsung dengan pengajarnya, ada
				yang mereka datang sendiri. Jadi sejauh ini,
				peran Dinas Pendidikan seperti itu.
				Mencoba untuk menarik anak-anak yang tidak
				sempat untuk mengecam pendidikan formal supaya tetap melanjutkan sekolah. LKP
				supaya tetap melanjutkan sekolah. LKP (Lembaga Khusus Pelatihan) ini
				diperuntukkan untuk anak-anak yang usia
				sekolah, tetapi tidak bisa melanjutkan kedunia
				pendidikan formal. Misalnya untuk
				melanjutkan ke SMA. Jadi di LKP ini mereka
				di tampung (Lembaga Khusus Pelatihan)
				memberikan pembelajaran. Misalnya untuk
				kecantikan, tata rias pengantin, tata rias
				busana, desain grafis. Anak-anak putus
				sekolah kita tarik belajar dengan keahlian-
				keahlian yang ada. Biasanya Dinas
				Pendidikan bekerjasama dengan OPD
				(Organisasi Perangkat Daerah) apa saja? Dan
				(Organisasi i Ciangkat Dacian) apa saja: Dan

siapa saja? Kita SPK (Surat Perjanjian Kerja) tidak ada. Kolaborasi kita sesuai dengan hastag Pak Walikota #KolaborasiMedanBerkah misalnya. Dinas Pendidikan mereka minta data ke kita dan sebaliknya kita minta data kemereka mau melakukan kerjasama. Berkolaborasi saja kerjanya. Kalau SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) secara tertulis tidak ada. Hanya kerjasama secara kolaborasi saja.

Kendala yang sering dialami di Dinas Pedidikan baik dari anggaran, program, SDM (Sumber Daya Manusia) dalam menangani anak jalanan? Salah satu nya yaitu kita kurang Sumber Daya Manusia (SDM) seperti guru kan kita kurang. Makanya sekarang kita menerima guru PPPK sedang besar-besaran. Kemarin ada sekitar 500 (lima ratus) lebih, tahun berikutnya ada 1000 (seribu) lebih, tahun depan nambah lagi 2000 (dua ribu). Kendalanya disitu. Sumber Daya yang kurang.

Kalau untuk OPD instansi lain atau (Organisasi Daerah) Perangkat lain kendalanya kordinasi dimana? Misal Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan ada kendala? Kalau kita selalu hubungan yang baik, pasti tidak ada tutup menutupi sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jadi apa yang mereka butuhkan pasti tanya kekita. Apa yang kita butuhkan pasti tanya ke mereka. Sama seperti kita bekerjasama tiap bidang. Disperindag Perindustrian (Dinas dan Perdagangan) akan melaksanan pelatihan ketenagakeriaan. Ada 100 (seratus) orang yang mereka minta. Jadi mereka menghubungi kita. Pak Kabid, kira-kira Dinas Pendidikan gimana? Karena fokusnya ke guru-guru kami butuh 100 (seratus) orang. Dinas Pendidikan melalui saya sebagai penghubung saya sampaikan PAUD 20%, kemudia SD 50%, SMP 30% jadi seperti itu. Kita saling memberikan informasi, saling memberikan data supaya program-program

yang ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing bisa terjalankan. Sama dengan Dinas Kesehatan bulan **Imunisasi** Anak Nasional. PAUD kan pesertanya. Kita persiapkan pesertanya. Berapa jumlah yang ingin kita siapkan, setiap

Kecamatan tolong kordinasikan. Disana ada lah IGTK (Ikatan Guru Taman Kanakkanak), Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Akan selalu mulus perjalanan kalau baik secara kordinasinya, seperti yang dituntut oleh Pak Walikota untuk kolaborasi, jangan ada nanti kendala-kendala dilapangan. Kalaupun ada kendala-kendala dilapangan hanyalah komunikasi yang mungkin misalnya tidak sampai komunikasinya karena jaringan atau semacamnya dan mereka akan datang kemari atau kami datang kesana. Kalau yang

namanya komunikasi yang tidak baik atau rusak, tidak ada sejauh ini.

Pemerintah Kota Medan belum ada Panti Asuhan Anak, di Dinas Sosial yang ada hanya RPS (Rumah Perlindungan Sosial) bagaimana pandangan Dinas Pendidikan tekait hal tersebut? Panti Asuhan tidak diranah kita dan kita setuju kalau ada panti asuhan. Kita siap membantu kalau ada Panti Asuhan. Sama dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) sedang digalakkan, tapi kan bukan diranah kita. Itu diranah Provinsi tetapi yang nangani kolaborasi dengan kita begitu. Kalau seandainya ada yang menyampaikan bagaimana panti asuhan? Kita mendukung lah pada itu. Cuma ditempatkan ditempat yang pas. Dinas sosial dikordinasikan dengan panti asuhan. Kita bisa membantu kordinasikan.

Ada tidak kemungkina kerjasama tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bersama dengan Universitas, atau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya untuk rancangan Perda Penanganan Anak Jalanan? Itu bisa saja terjadi. Kalau untuk Universitas kita sudah ada PKS nya (Perjanjian Kerja Sama) tetapi tidak dengan itu. Masalah

peningkatan Sumber Daya Manusia Guru. Misalnya mereka ada kerja dengan itu Misalnya mau naik kerja sama ke S1 PAUD guru-guru yang masih SMA itu sudah ada kerjasama kita. Kalau untuk pembuatan Perda bisa aja. Nanti untuk Perda Kota Layak Anak (KLA) ini mau kita buat, sedang digalakkan Kota Layak Anak (KLA). Sedang dirancang, semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hadir. Perda Kota Layak Anak (KLA) sedang dibuat, sedang disusun. Semuanya akan ada. Hal yang sama, tetapi sifatnya untuk pelatihan? Untuk pelatihan sudah banyak, sekitar sebulan yang lalu kita buat pelatihan kewirausahaan untuk anak pendidikan non formal. Kemudian pelatihan bahaya narkoba, baru selesai sebulan yang lalu. Kalau untuk pelatihan sudah banyak.

Anak jalanan yang pulang sekolah mencari uang jajan tambahan untuk biaya sekolah. Bagaimana pandangan Dinas Pendidikan? Apakah ada program untuk mereka? Untuk disekolah tidak ada bayar, sekarang sekolah gratis. Ada Bantuan Indonesia Pintar ini sedang kita data untuk anak-anak yang bisa mendapatkan program itu. Salah satunya mereka akan kena itu kepada anak-anak yang dijalan. Nanti berkordinasi dengan kepala sekolahnya, dengan gurunya. Nantikan tau siapa siapa saja anak-anak yang butuh bantuan. Kalau sekolah kan sudah gratis. Negeri, swastapun kan sudah banyak yang menggratiskan. Kan ada bantuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk PAUD ada BOP nya, untu SD, SMP ada BOS nya. Dan itu tidak melalui dinas pendidikan lagi, dari pusat langsung di transfer ke sekolah. Sekolah lah yang mengetasinya itu. Misalnya membuat sesuatu disitu yang membuat anak tertarik. membuat suatu kegiatan ekstrakurikuler, salah satu itu usaha kita. Kalau masalah tiba-tiba masih ada yang turun kejalanan kita tidak bisa 24 (dua puluh empat) jam mengawasi. Pengamen itu bukan orang

miskin semua, karena memang hobi dia turun dijalanan. Tugas dinas pendidikan hanya memberikan pelatihan saja, memberikan penanganan yang bisa ditangani.

Saran dan harapan terkait anak jalanan, mulai dari peraturan, Perda, kerjasama antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau ada hal lain? Kalau masalah anak putus sekolah yang sedang kita jalankan disitu inklud Kota Layak Anak (KLA) sudah ikut semua. Masalah anak jalanan, masalah sekolah anak-anak. Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah terkait, kemudian pemerintah sudah mempelopori itu pemerintah daerah. Itu langsung dari pusat, sudah dilaksanakan, sudah dalam proses dalam waktu dekat ini sudah muncul berkas itu. Salah satu indikator Kota Layak Anak (KLA) angka putus seklah berkurang, bagaimana penanganan jalanan, bagaimana sekolah anak-anak. Kalau kita Dinas Pendidikan akan selau berkordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain dan juga selalu dalam ranah pendekatan pimpinan. Apa yang diperintahkn pimpinan akan selalu kita kerjakan.